

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) Banda Aceh tahun 2025-2029 telah dapat diselesaikan oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kota Banda Aceh. Penyusunan Pemutakhiran SSK Banda Aceh, merupakan tindak lanjut dari keikutsertaan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyusun dokumen Buku Putih dan SSK pada tahun 2009. Pada tahun 2014 Kota Banda Aceh melakukan pemutakhiran pertama Dokumen SSK untuk periode 2015-2019. Pada tahun 2019 dilakukan pemutakhiran kedua Dokumen SSK untuk periode 2020-2024, dan pada tahun 2024 dilakukan pemutakhiran ketiga Dokumen SSK untuk periode 2025-2029.

Dokumen SSK Banda Aceh tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan strategis sanitasi jangka menengah yang bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas dan menyeluruh dalam pembangunan sanitasi agar pengelolaan sanitasi Kota Banda Aceh bisa berjalan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, tepat sasaran, sesuai kebutuhan, berkelanjutan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen ini menjadi pegangan untuk mencapai target indikator kinerja sanitasi sesuai waktu dan kualitas yang ditentukan dalam rangka pengelolaan sanitasi lebih baik sehingga tercapainya pembangunan Kota Banda Aceh terkait sanitasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

Apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Dokumen Pemutakhiran SSK Banda Aceh tahun 2025-2029, terutama kepada Pokja PKP Kota Banda Aceh dan OPD terkait. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan terkait pengelolaan sanitasi untuk mewujudkan kondisi sanitasi permukiman yang layak bagi masyarakat Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, Desember 2024
Pj. Walikota Banda Aceh

Almunizal Kamal, S.STP., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Metode Penelitian	3
1.3. Dasar Hukum	6
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II Profil Sanitasi Saat ini	11
2.1 Gambaran Wilayah	11
2.2 Profil Sanitasi Saat ini	15
2.3 Area berisiko dan Permasalahan Sanitasi	83
BAB III Kerangka Pengembangan Sanitasi	97
3.1 Visi dan Misi Sanitasi	98
3.2 Rencana Pengembangan Sanitasi	99
3.3 Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah	106
BAB IV Strategi Pengembangan Sanitasi	112
4.1 Air Limbah Domestik	112
4.2 Pengolahan Persampahan	114
BAB V Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi	119
5.1 Ringkasan	119
5.2 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan sumber Pendanaan Pemerintah	121
5.3 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan sumber Pendanaan Non Pemerintah	123
BAB VI Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Banda Aceh	12
Gambar 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Banda Aceh	13
Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kota Banda Aceh	14
Gambar 2.4 Sarana Pengangkutan SPALD-Setempat Kota Banda Aceh	17
Gambar 2.5 Sarana Pengolahan SPALD-Setempat Kota Banda Aceh	18
Gambar 2.6 Sarana pengolahan IPAL yang dimiliki	31
Gambar 2.7 Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik	32
Gambar 2.8 Analisis Rantai Layanan	35
Gambar 2.9 Sarana Pengumpulan yang dimiliki	59
Gambar 2.10 Sarana Pengangkutan yang dimiliki	61
Gambar 2.11 Sarana Pengolahan dan Pemrosesan Akhir yang dimiliki	65
Gambar 2.12 Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Sampah Perkotaan	68
Gambar 2.12 Analisis Rantai Layanan Sanitasi	70
Gambar 2.13 Peta Lokasi Genangan	82
Gambar 2.14 Peta Area Beresiko Air Limbah	85
Gambar 2.15 Peta Area Beresiko Persampahan	90
Gambar 2.16 Peta Area Beresiko Drainase	94
Gambar 3.1 Peta Zonasi Air Limbah	103
Gambar 3.2. Peta Zonasi Sampah Perkotaan	105

DAFTAR TABEL

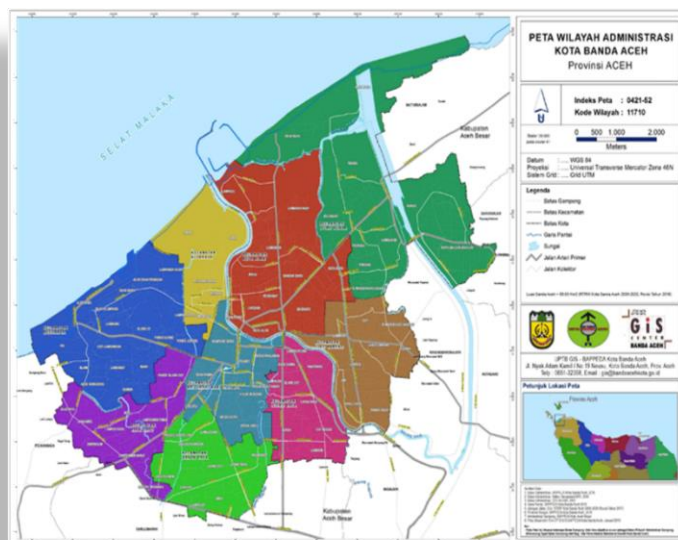
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah per-Kecamatan	12
Tabel 2.2 Capaian Akses Air Limbah Domestik	16
Tabel 2.3 Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat	16
Tabel 2.4 Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat).....	17
Tabel 2.5 Sub-Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD-Terpusat.....	19
Tabel 2.6 Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2020-2024	33
Tabel 2.7 Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting	34
Tabel 2.8 Daftar (pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Air Limbah ..	36
Tabel 2.9 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelola Air Limbah	36
Tabel 2.10 Format Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Tahun 2024.....	38
Tabel 2.11 Pemetaan Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah Domestik.....	55
Tabel 2.12 Pemetaan Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah Domestik.....	55
Tabel 2.13 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik.....	56
Tabel 2.14 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (Air Limbah)	57
Tabel 2.15 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Air Limbah	57
Tabel 2.16 Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan.....	58
Tabel 2.17 Timbulan Sampah.....	58
Tabel 2.18 Pengumpulan Sampah	59
Tabel 2.19 Penampungan Sementara dan Pengangkutan	60
Tabel 2.20 Pengolahan.....	63
Tabel 2.21 Pemrosesan Akhir.....	64
Tabel 2.22 Pengurangan Sampah	67
Tabel 2.23 Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan Berdasarkan Target RPJMN 2020-2024	69
Tabel 2.24 Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah	71
Tabel 2.25 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan	72
Tabel 2.26 Format Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2023.....	74
Tabel 2.27 Pemetaan Kelembagaan Non Pemerintah.....	75
Tabel 2.28 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Persampahan	77
Tabel 2.29 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (Persampahan)	79
Tabel 2.30 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Persampahan.....	80
Tabel 2.31 Lokasi Genangan Kota Banda Aceh	81
Tabel 2.32. Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan di	

Kota Banda Aceh.....	83
Tabel 2.33 Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik.....	86
Tabel 2.34 Daftar permasalahan terkait pengelolaan air limbah domestik.....	87
Tabel 2.35 Area Berisiko Sanitasi Persampahan.....	91
Tabel 2.36 Permasalahan Persampahan.....	92
Tabel 2.37 Area Berisiko Drainase	95
Tabel 2.38 Permasalahan Drainase	96
Tabel 3.1 Visi Misi Sanitasi Kota Banda Aceh	98
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik.....	99
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Persampahan	100
Tabel 3.4 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Banda Aceh.....	102
Tabel 3.5 Tahapan Pengembangan Sampah Perkotaan	104
Tabel 3.6 Skenario pencapaian Sasaran	106
Tabel 3.7 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Banda Aceh untuk Sanitasi	107
Tabel 3.8 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan	108
Tabel 3.9 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Banda Aceh untuk Operasional/ Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi.....	109
Tabel 3.10 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kota Banda Aceh untuk Kebutuhan Operasional/ Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2029 .	110
Tabel 3.11. Perkiraan Kemampuan APBD Kota Banda Aceh dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK.....	111
Tabel 4.1 KKL Air Limbah Domestik	117
Tabel 4.2 KKL Persampahan.....	118
Tabel 5.1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun	119
Tabel 5.2 Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 tahun	120
Tabel 5.3 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran	120
Tabel 5.4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kota Banda Aceh	121
Tabel 5.5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi	121
Tabel 5.6 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN	122
Tabel 5.7 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	122
Tabel 5.8 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR.....	123
Tabel 5.9. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat.....	123
Tabel 6.1. Tabel Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK Tahun 2025-2029	126

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kota Banda Aceh telah menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) pada tahun 2009. Pada tahun 2014 Kota Banda Aceh melakukan pemutakhiran pertama dokumen SSK untuk periode 2015-2019. Sehubungan dengan berakhirnya periode pelaksanaan SSK 2015-2019 dan adanya pembaharuan data, maka pada tahun 2019 dilakukan pemutakhiran kedua dokumen SSK untuk periode 2020-2024.. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir rencana program yang disusun dalam pemutakhiran dokumen SSK tahun 2019 (periode 2020-2024), sehingga pada tahun 2024 dirasa perlu melakukan pemutakhiran kembali untuk periode 2025-2029. Hal ini dilakukan untuk sinkronisasi perencanaan dan strategi terkait pengelolaan sanitasi Kota Banda Aceh. Pemutakhiran SSK disusun berdasarkan **RPJMK Teknokratik** periode 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Penyusunan pemutakhiran SSK ini dilaksanakan oleh Pokja PKP yang terdiri dari beberapa OPD serta dukungan dari Tenaga Ahli Pemutakhiran SSK. Kajian yang dilakukan mencakup 2 sektor, yaitu air limbah dan persampahan.

Gambar 1
Peta Administrasi Kota Banda Aceh



Sumber: Bappeda Kota Banda Aceh, 2024

Kareng.

Berdasarkan instrument SSK Kota Banda Aceh Tahun 2024, Kecamatan Meuraxa merupakan kecamatan dengan jumlah gampong terbanyak, dimana terdapat 16 gampong dalam wilayah administrasi kecamatan

tersebut. Kecamatan Kuta Raja merupakan kecamatan dengan jumlah gampong paling sedikit yaitu 6 gampong. Kecamatan Kuta Alam mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 42.691 jiwa atau 12.864 Rumah Tangga (RT) diikuti Kecamatan Syiah Kuala 34.247 jiwa atau 10.251 RT dan Kecamatan Baiturrahman 32.506 jiwa atau 9.963 RT. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh tahun 2023 adalah 633 jiwa perhektarnya. Kecamatan Baiturrahman memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 107 jiwa/ ha. Sedangkan Kecamatan Syiah Kuala memiliki kepadatan penduduk terendah adalah 43 jiwa/ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah per-Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan		Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah Rumah Tangga		Kepadatan di area terbangun (jiwa/ha)
	Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
MEURAXA	0	16	483,65	0	27.090	0	7.740	56
JAYA BARU	0	9	394,20	0	27.157	0	7.828	69
BANDA RAYA	0	10	437,47	0	26.607	0	7.798	61
BAITURRAHMAN	0	10	304,43	0	32.506	0	9.963	107
LUENG BATA	0	9	368,16	0	25.702	0	7.615	70
KUTA ALAM	0	11	644,90	0	42.691	0	12.864	66
KUTA RAJA	0	6	154,86	0	14.928	0	4.414	96
SYIAH KUALA	0	10	789,64	0	34.247	0	10.251	43
ULEE KARENG	0	9	441,27	0	28.610	0	8.248	65
Jumlah		90	4.018,58		259.538		76.721	633

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2024

Profil Sanitasi Saat ini.(Air Limbah Domestik)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Banda Aceh saat ini telah menggunakan Off-site System (Sistem Terpusat) yaitu suatu sistem pengolahan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah kesuatu tempat untuk selanjutnya diolah sebelum dibuang ke badan air.

Kepemilikan Jamban Sehat Permanen (JSP) di Kota Banda Aceh telah mencapai 100% dengan praktek BABS ditempat terbuka 0%. Pencanangan dan pendeklarasian Kota Banda Aceh sebagai kota yang telah bebas dari prilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada tahun 2017 membuat Kota Banda Aceh telah berstatus Kota Open Defecation Free (ODF) sampai dengan saat ini.

Persentase RT menggunakan tangki septik individual aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT) adalah 7,04% atau 5.398 Rumah Tangga (RT) dari total seluruh Rumah Tangga yang ada di Kota Banda Aceh yaitu 76.721. Persentase RT menggunakan tangki septik komunal aman (yang pernah disedot dan

dibuang ke IPLT) sebesar 5,07% atau sebanyak 3.890 RT, akses layak bersama sebanyak 0% dan akses layak individu sebesar 87,89% atau sebanyak 67.433 RT, BABS ditempat terbuka sebesar 0%.



Gambar 2. Truk Tinja DLHK3 Kota Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki 3 unit truk tinja dengan kapasitas masing-masing 4 m³ namun pada saat ini yang beroperasi hanya 1 unit untuk melayani masyarakat, 1 unit rusak dan 1 unit lagi dikhususkan untuk menyedot IPAL. Pihak swasta di Kota Banda Aceh sudah mulai terlibat dalam hal pelayanan pengurusan lumpur tinja.

Mereka memiliki 11 unit truk tinja dengan kapasitas masing-masing 4 m³, beroperasi rutin setiap harinya 2 unit. Volume truk tinja yang dibuang ke IPLT sebanyak 13 m³/hari. Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT sebanyak 3 truk/hari dengan rata-rata rumah tangga terlayani pengurusan lumpur tinjanya sebanyak 8 RT/hari.

Jumlah IPAL skala permukiman yang telah dibangun di Kota Banda Aceh mulai dari Tahun 2012 sampai dengan 2023 berjumlah 95 Unit dengan sumber pendanaan dari Dana DAK Sanitasi, Dana Otsus dan Bantuan IDB melalui Program SANIMAS. Kapasitas terpakai dari IPAL yang dibangun bervariasi, ada yang 10 m³/hari dan ada yang 27 m³/hari.

Berbagai upaya tengah dilakukan agar Kota Banda Aceh bergerak menuju tahapan akses sanitasi yang lebih tinggi, yaitu sanitasi aman. Kota Banda Aceh pada Tahun 2029 diharapkan dapat meningkatkan akses sanitasi aman sebagaimana yang ditargetkan sebesar 33%, yang mana saat ini capaian masih sebesar 12,11%.

Tabel 2. Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2029 (%)		Target Jangka Pendek Kota Banda Aceh	Capaian (%) Tahun:2023	GAP (%) Terhadap Target 2029	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh				
1	Akses Aman	15%	13%	33%	22,56%	12,11%	20,89%	10,45%
2	Akses Layak	90%	80%	100%	100%	100%	0%	0%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	67%	77,44%	87,89%	-20,89%	-10,45%
	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	0%	0%	0%	0%	0%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	0%	0,00%	0%	0%	0,00%
3	Akses Belum Layak*	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	BABS Tertutup							
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian Akses Aman Kota Banda Aceh Tahun 2023 sebesar 12,11 %, capaian tersebut belum dapat memenuhi target jangka panjang Akses Aman Kota Banda Aceh sebesar 33 % sehingga Gap terhadap target jangka Panjang 20,89 % dan rencana target jangka pendek Akses Aman Kota Banda Aceh sebesar 22,56 % sehingga Gap terhadap target jangka pendek 10,45 % sehingga kondisi capaian Akses Aman Kota Banda Aceh Tahun 2023 tidak mendukung capaian target 5 Tahun Nasional.

Capaian Akses Layak Kota Banda Aceh Tahun 2023 sebesar 100%, capaian tersebut telah mencapai target Jangka Panjang Akses Layak Kota Banda Aceh sebesar 100% sehingga tidak terdapat Gap terhadap target Jangka Panjang dan target Jangka Pendek Akses Layak Kota Banda Aceh Tahun 2023.

Tabel 3. Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting

Infrastruktur	Persentase
SPALD-S	
Kapasitas Penggunaan IPLT	9,63%
Kapasitas penggunaan truk	13,54%
Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	71,11%
Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	46,61%
Kapasitas IPLT terhadap total RT	33,15%
SPALDT	
Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	53,52%
Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	60,00%
Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	0%

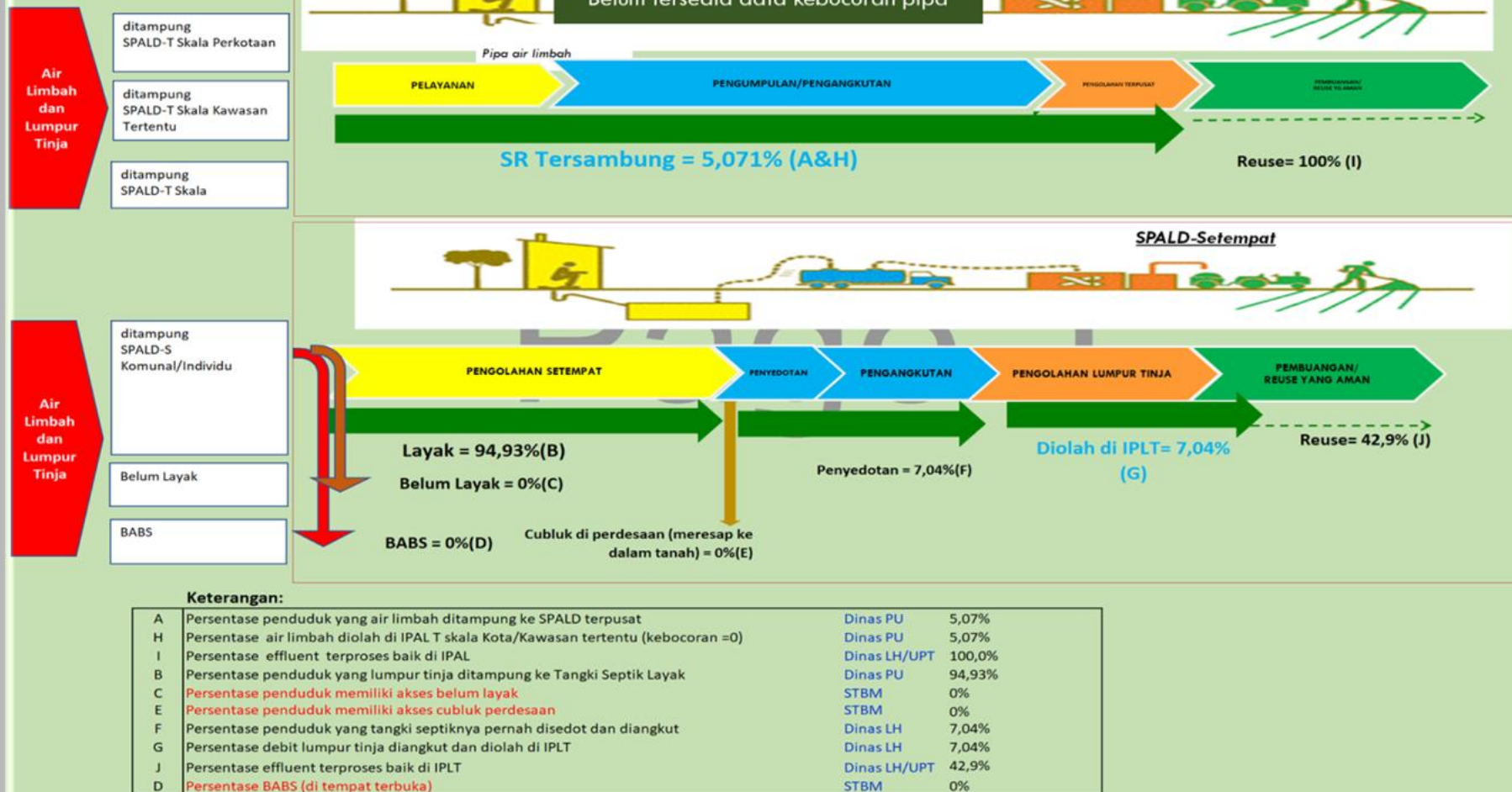
Sumber : Instrumen SSK Tahun 2024

Kapasitas IPLT yang dibangun pada tahun 2005 dan 2007 memiliki kapasitas desain 135 m³/hari, dengan kapasitas operasional aktual IPLT sebesar 13 m³/hari sehingga saat ini kapasitas penggunaan IPLT masih mencapai 9,63%. Untuk sarana truk tinja saat ini ada 3 unit yang beroperasi dengan kapasitas angkut aktual 13 m³/hari. Sehingga kapasitas penggunaan truk masih mencapai 13,54%. Apabila semua truk tinja yang dimiliki oleh DLHK3 dan Swasta beroperasi dengan volume rata-rata tangki truk tinja 4 M³ dan optimal ritasi perhari 2 ritasi/hari/unit maka kapasitas angkut terhadap IPLT (desain) telah mencapai 71,11%, kapasitas truk tinja terhadap total RT sebanyak 46,61 % dan kapasitas IPLT terhadap total RT 33,15 dari total jumlah rumah tangga atau 72.831 RT yang menggunakan tangki septik individual dan

komunal di Kota Banda Aceh. Sedangkan kapasitas penggunaan SPALDT permukiman telah mencapai 53,52 % atau sebanyak 3.800 SR yang terpasang dari total kapasitas desain sebanyak 71.000 SR.

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

Gambar 3. Analisis Rantai Layanan



Lembaga atau dinas yang mengelola air limbah domestik di Kota Banda Aceh adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3). Dinas-dinas tersebut mempunyai tugas dan wewenang dalam hal pelayanan kepada masyarakat tentang Air Limbah Domestik.

Profil Sanitasi Saat ini.(Persampahan)

Timbunan sampah Kota Banda Aceh Tahun 2023 sebesar 188,43 ton/hari atau 68.774, 97 ton/tahun yang berasal dari seluruh Wilayah Perkotaan. Komposisi sampah dari tiban sampah rumah tangga tersebut 53% merupakan sampah organik dan 47% merupakan sampah anorganik.

Tabel 4. Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	16,2%
2	Penanganan Sampah	82,3%
3	Sampah Tidak Terkelola	1,5%
Total		100%

Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh Tahun 2024



Gambar 5. Motor Roda Tiga DLHK3 Kota Banda Aceh

Infrastruktur persampahan dalam melakukan pengumpulan terdiri dari 4 unit gerobak motor dengan kapasitas angkut total dari unit yang beroperasi adalah 6 m³. Jumlah ini tidak mencukupi untuk melayani keseluruhan gampong yang ada di Kota Banda Aceh sehingga banyak gampong yang tidak terlayani dalam pengumpulan sampah. Peningkatan infrastruktur pengumpulan sampah ini sangat di butuhkan agar sampah-sampah yang berada di gampong-gampong yang belum terlayani pengumpulan

sampah dapat dilakukan pengumpulan sampah secara terjadwal.



Gambar 6. Compactor Truck DLHK3 Kota Banda Aceh



digunakan adalah Controlled Landfill, dengan jumlah sampah yang ditimbun sebesar 30,74 ton/hari dengan jumlah RT terlayani sebanyak 10.585 RT pada tahun 2023.

Kota Banda Aceh telah memiliki TPS-3R

sebanyak 3 unit yang dibangun pada tahun 2009 yang tersebar di 3 gampong yaitu gampong Ilie, Surien dan Lambung, Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan Pemda) sebanyak 8 unit yang tersebar

Sarana penampungan sementara yang ada di Kota Banda Aceh terdiri dari 1 unit Transfer Depo dengan kapasitas tampung 0,66 m³, TPS 236 unit dengan kapasitas masing-masing TPS 0,236 m³, Kontainer 47 unit dengan kapasitas 4 m³, dan Tong Sampah Pejalan Kaki 222 unit dengan kapasitas 0,12 m³. Alat angkut berupa Compactor Truk 3 unit dengan kapasitas angkut 18 m³, Arm roll truck 5 unit dengan kapasitas operasional total dari unit yang beroperasi 30 m³, Dump Truck 41 unit dengan kapasitas operasional total dari unit yang beroperasi 246 m³ dan Pick Up 25 Unit dengan kapasitas operasional total dari unit yang beroperasi 100 m³. Alat-alat angkut yang ada ini beroperasi 4 rit/hari.

Pengolahan sampah di Kota Banda Aceh belum dilakukan hal ini disebabkan sumber daya manusia yang belum ada, lahan yang belum tersedia dan sumber anggaran yang belum di rencanakan.

Pemrosesan akhir hanya di lakukan di TPA Gampong Jawa yang berada di Kecamatan Kuta Raja. TPA Gampong Jawa di bangun tahun 2009 dengan usia pakai 11 tahun. System TPA yang

Gambar 7. Landfill TPA Gampong Jawa Kota Banda Aceh

di 6 gampong yaitu Gampong Jawa 2 unit, Gampong Mulia 2 unit dan Gampong Keudah, Lantemen Timur, Lam Ara, Batoh masing-masing 1 unit. Selanjutnya Bank Sampah 19 unit yang tersebar di beberapa gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh. Jumlah sampah yang tereduksi di TPS3R sebesar 0,093% atau 63,89 ton/tahun, di Bank Sampah 0,14% atau 93 ton/tahun dan di Sektor Informal sebesar 15,98% atau 10.989 ton/tahun.

Tabel 5.

Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan Berdasarkan Target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target - 2029 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun:2023	GAP (%) Terhadap Target 2029	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Aceh	Kota BANDA ACEH	Kota BANDA ACEH			
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	79,0%	62,0%	68,0%	82,3%	-20,3%	-14,3%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	21,0%	38,0%	32,0%	16,2%	21,8%	15,8%

Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian Penanganan Sampah Perkotaan Kota Banda Aceh Tahun 2023 sebesar 82,3% dan Pengurangan Sampah Perkotaan sebesar 16,2%. Capaian tersebut belum dapat memenuhi target jangka panjang Penanganan Sampah Perkotaan sebesar 62% dan Pengurangan Sampah Perkotaan Kota Banda Aceh sebesar 38%. Antara capaian Tahun 2023 dengan terget capaian yang ditetapkan Tahun 2029 terdapat Gap sebesar -20,3% untuk Penangan dan 21,8% untuk Pengurangan Sampah Perkotaan.

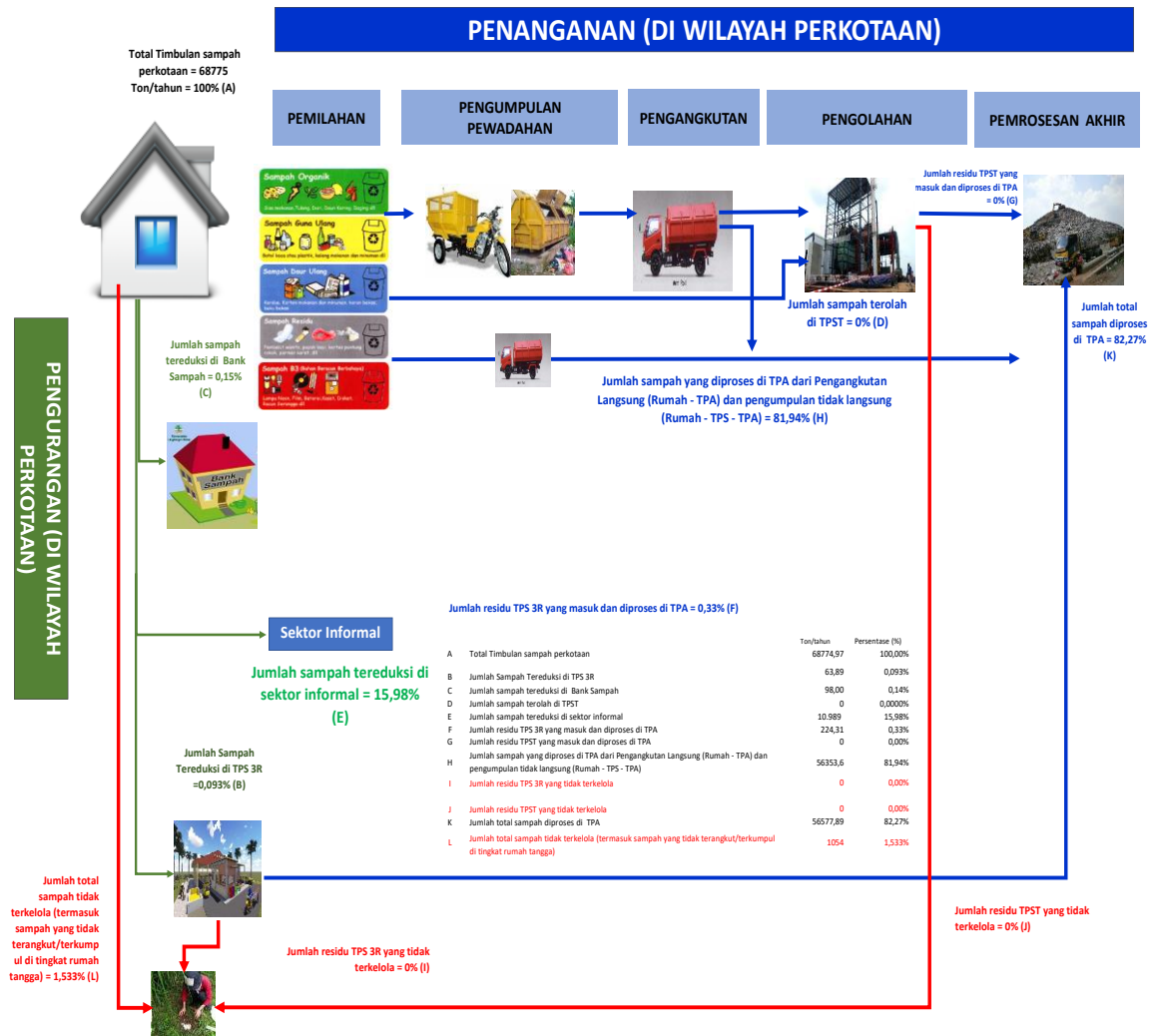
Target jangka pendek Penanganan Sampah Perkotaan Kota Banda Aceh sebesar 68% dan Pengurangan Sampah Perkotaan sebesar 32% sehingga terdapat Gap terhadap target jangka pendek untuk Penangan Sampah Perkotaan sebesar -14,3% dan 15,8% untuk Pengurangan. Kondisi capaian Penanganan dan Pengurangan Sampah Perkotaan Kota Banda Aceh Tahun 2023 belum mendukung capaian target 5 Tahun Nasional.

Rantai Layanan Sampah berikut ini menjelaskan bahwa timbulan sampah Kota Banda Aceh 68.775 ton/tahun. Dikumpulkan di tong sampah, container dan becak motor diangkut dengan menggunakan dump truck dan arm roll truck dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA sebesar 81,94% atau 56.353,3

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

ton/tahun. Tereduksi di Bank sampah sebesar 0,15%, tereduksi disektor Informal sebesar 15,98% dan tereduksi di TPS3R sebesar 0,033%. Residu TPS3R yang masuk dan di proses di TPA sebesar 0,33%. Sedangkan total sampah tidak terkelola (termasuk sampah yang tidak terangkut/terkumpul di Tingkat rumah tangga) sebesar 1,53% atau 1.054 ton/tahun.

Gambar 8. Analisis Rantai Layanan Sanitasi



Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh Tahun 2024

Kegiatan pengelolaan persampahan di Kota Banda Aceh dilaksanakan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Kota Banda Aceh.

Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan di Pemerintahan Daerah Kota Banda Aceh baik Perencanaan, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Pengaturan dan Pembinaan serta

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Bidang/Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3).

Untuk menangani permasalahan terkait pengelolaan air limbah di Kota Banda Aceh telah dirumuskan beberapa strategi yaitu menindaklanjuti pembentukan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan air limbah dan pelayanan sanitasi kota, meningkatkan SDM terkait pengelolaan air limbah domestik baik kualitas maupun kuantitas, meningkatkan pengolahan air limbah dengan SPALD-S dan SPALD-T, melakukan edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pengolahan air limbah domestik dan menyediakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Sedangkan untuk menangani permasalahan terkait persampahan juga telah dirumuskan beberapa strategi yaitu penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi, meningkatkan peran serta masyarakat melakukan pengurangan sampah dari sumbernya, menindaklanjuti pembentukan UPTD Pengelolaan Persampahan, menyediakan mesin pemilah sampah di TPA Kota Banda Aceh, melakukan Operation and Maintenance armada pengangkutan sampah, pengadaan armada pengangkutan sampah yang baru, pengadaan lahan untuk Pembangunan TPS Bawah Tanah, meningkatkan jumlah armada truck besar pengangkut sampah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik.

Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan untuk masing-masing sektor, kemudian disusun rencana program dan kegiatan untuk jangka menengah (2025-2029). Untuk pelaksanaan program akan digunakan pendanaan dari berbagai sumber termasuk APBK (Rp. 12.786.000.000,-), APBK Provinsi (Rp. 400.000.000), APBN (Rp. 62.150.000.000,-), DAK (Rp. 46.562.000.000,-), serta dari non pemerintah seperti Swasta/CSR (Rp. 5.670.000.000,-) dan Masyarakat (Rp. 60.000.000,-). Sedangkan program dan kegiatan yang masuk dalam daftar tunggu sebesar (Rp. 24.200.000.000,-).



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan Kota Banda Aceh harus dapat memberikan perhatian lebih besar kepada program peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas permukiman dan kesehatan masyarakat serta mengantisipasi permasalahan sosial. Prioritas dalam peningkatan kualitas lingkungan adalah pengelolaan sanitasi. Sanitasi yang mencakup bidang air limbah dan persampahan merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Sehubungan makin berkembangnya Kota Banda Aceh, permasalahan sanitasi juga makin kompleks. Rendahnya kualitas pengelolaan sanitasi juga menjadi salah satu faktor bagi menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Untuk mengatasinya perlu konsep-konsep pengelolaan sanitasi yang aman dan terpusat.

Menyadari perlunya perhatian lebih terhadap sektor sanitasi, Pemerintah Kota Banda Aceh kemudian menyusun strategi untuk pengelolaan sanitasi, yang tertuang dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Banda Aceh, dimana SSK Banda Aceh merupakan dokumen rencana strategis berjangka menengah yang disusun untuk percepatan sektor sanitasi Kota Banda Aceh, yang berisi tentang potret kondisi sanitasi Kota Banda Aceh saat ini, rencana strategi dan rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah. SSK dibutuhkan agar pengelolaan sanitasi Kota Banda Aceh bisa berjalan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, tepat sasaran, sesuai kebutuhan, berkelanjutan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Kota Banda Aceh telah menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) pada tahun 2009. Pada tahun 2014 Kota Banda Aceh melakukan pemutakhiran pertama dokumen SSK untuk periode tahun 2015-2019. Sehubungan dengan berakhirnya periode pelaksanaan SSK tahun 2015-2019, maka pada tahun 2019 dilakukan pemutakhiran kedua dokumen SSK untuk periode tahun 2020-

2024. Pada tahun 2024 perlu dilakukan pemutakhiran SSK untuk periode tahun 2025-2029, hal ini dilakukan untuk sinkronisasi perencanaan, strategi pembangunan, dan identifikasi program terkait pengelolaan sanitasi Kota Banda Aceh.

Sebagai dokumen perencanaan, SSK harus selaras dengan dokumen perencanaan daerah yang ada di Kota Banda Aceh. Oleh sebab itu, dalam penyusunannya SSK mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029, RPD Aceh Tahun 2023-2026, dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Selain itu juga perlu mengacu kepada target-target *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta peraturan perundangan yang berlaku di tingkat nasional dan provinsi.

Pemutakhiran dokumen SSK diharapkan juga dapat mempercepat implementasi terutama terkait dengan target nasional yang mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2016-2030 yaitu:

1. Peningkatan akses kepada layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
2. Peningkatan implementasi promosi kesehatan dan pemberdayaan bagi masyarakat;
3. Sistem infrastruktur air limbah kota terpusat di 438 kota/Kota;
4. Pemenuhan air baku untuk rumah tangga, wilayah perkotaan dan industri;
5. Perbaikan kondisi dan fungsi reservasi air dan sumber air lainnya;
6. Peningkatan anggaran untuk pengembangan air dan sanitasi yang dialokasikan dalam APBN.

1.2 Metodologi Penyusunan

Dokumen Pemutakhiran SSK Banda Aceh ini disusun oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kota Banda Aceh berdasarkan Outline Penyusunan dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Penyusunan dilakukan secara partisipatif dan terintegrasi melalui diskusi secara rutin, lokakarya dan pembekalan baik yang dilakukan oleh Tim Pokja PKP sendiri maupun dengan dukungan Tenaga Ahli Fasilitasi Pemutakhiran SSK. Proses penyusunan Dokumen Pemutakhiran SSK terdiri dari beberapa langkah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Metodologi Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan menggunakan berbagai teknik antara lain :

a) *Desk Study* (kajian literatur dan data sekunder)

Data-data yang dibutuhkan adalah:

- Dokumen SSK Tahun 2020-2024, dokumen perencanaan kota (RPJM dan RTRW), data air limbah, data persampahan dan data drainase, Renja SKPD terkait, Banda Aceh Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka 5 tahun terakhir, dan laporan realisasi APBD Kota Banda Aceh.
- Konsolidasi data kelembagaan terkait sanitasi yang digunakan untuk mendapatkan gambaran atau peta kondisi kelembagaan sanitasi di Kota Banda Aceh. Pemetaan ini membantu Pokja PKP Kota Banda Aceh menilai kekuatan, kelemahan, potensi pengembangan, dan kebutuhan penguatan kelembagaan dan kebijakan guna menghasilkan suatu kerangka layanan sanitasi yang memihak masyarakat miskin, efektif, terkoordinasi dan berkelanjutan.
- Pemetaan keuangan dan perekonomian daerah
Peta keuangan dan perekonomian daerah menggambarkan kekuatan keuangan dan perekonomian daerah dalam mendukung pendanaan pembangunan sanitasi di masa depan, kecenderungan dalam pembiayaan pembangunan, dan prioritas anggaran selama 5 tahun. Informasi ini diperlukan sebagai salah satu dasar utama penyusunan strategi terkait aspek keuangan.

b) *Field Research* (observasi dan wawancara responden)

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- Pendataan area beresiko mengacu pada hasil Studi EHRA. Dalam pelaksanaan kajian EHRA menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yakni 1) wawancara (*interview*) dan 2) pengamatan (*observasi*).

B. Metodologi Analisis Data

Analisa data dilakukan setelah semua data terkumpul baik data sekunder maupun data primer. Data primer disusun dalam bentuk ringkasan eksekutif baik hasil studi EHRA dan kajian-kajian lainnya. Melakukan Analisa data dengan menggunakan instrument profil

sanitasi dengan terlebih dahulu memasukan data umum dan selanjutnya data-data sekunder meliputi:

- Nama kelurahan dan kecamatan se Kota Banda Aceh
- Informasi umum Kota
- Data air limbah
- Data persampahan
- Data drainase

Kemudian memasukan data analisa hasil studi EHRA untuk Index Resiko Sanitasinya (IRS) dan mengisikan Skor Persepsi SKPD dari pokja sanitasi terkait. Selanjutnya melakukan pembobotan EXPOSURE (%) yaitu pembobotan baik untuk data sekunder, primer (IRS EHRA) dan persepsi SKPD di sektor air limbah, persampahan dan drainase dan pembobotan IMPACT (%) yaitu pembobotan untuk jumlah penduduk, kepadatan penduduk, angka kemiskinan dan fungsi urban rural dari hasil kesepakatan pokja maka diperoleh skor resiko sanitasi dan akan dilakukan penyesuaian oleh pokja jika diperlukan. Hasil akhir instrument profil sanitasi adalah zona dan sistem sanitasi baik sektor air limbah, persampahan dan drainase, dan muncul data input planning tool yang akan dipakai pada instrument perencanaan selanjutnya baik air limbah, persampahan dan drainase.

C. Metodologi Penyusunan SSK

1. Menuliskan dan menggambarkan diagram alir sistem sanitasi Kota Banda Aceh dalam DSS (diagram System Sanitasi) baik air limbah, persampahan dan drainase berdasarkan alirannya (mulai dari *user interface* sampai pada daur ulang/ pengolahan akhir), yang selanjutnya membandingkan dengan system ideal seharusnya yang layak untuk lingkungan dimanakah ada permasalahan sanitasi berdasarkan DSS tersebut.
2. Menyusun Kerangka Kerja Logis (KKL) sanitasi baik air limbah dan persampahan, dimana KKL terdiri atas 8 kolom diantaranya: permasalahan mendesak sanitasi, Isu-isu strategis sanitasi, tujuan yang ingin dicapai yang dikaitkan dengan visi, misi sanitasi (*dimana visi misi tersebut harus sejalan dengan visi misi kota yang tercantum dalam RPJMD kota*), sasaran (*hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang SMART*), indicator (*capaian*

Sasaran pembangunan sanitasi yang telah disepakati), Strategi (dari hasil dari SWOT berdasarkan isu-isu strategis), dan terakhir adalah Indikasi program dan kegiatan.

3. Memasukkan hasil indikasi program dan kegiatan dari hasil KKL dan yang sudah selaras dengan hasil dalam Instrumen Perencanaan sanitasi baik air limbah dan persampahan ke dalam tabel program kegiatan dan pendanaan.
4. Memasukkan hasil konsultasi publik dan lokakarya.
5. Melakukan kajian komunikasi dan media untuk menyusun strategi kampanye dan komunikasi di Kota Banda Aceh. Kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana advokasi program pembangunan sanitasi di Kota Banda Aceh untuk pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kota, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain :

- Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemdada dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendana lain yang peduli sanitasi.
- Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.
- Memorandum program investasi Kota merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Kota dari aspek teknis, biaya dan waktu.
- Memorandum program investasi dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Walikota selaku Kepala Daerah.
- Program investasi sektor sanitasi telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan kota untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kota.
- Proses penyusunan rencana program investasi telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang

terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.

- Hasil akhir dalam kegiatannya adalah kesepakatan pendanaan program kegiatan sanitasi baik pendanaan indikasi dari pemerintah, Swasta (sumber-sumber pendanaan potensial) dan masyarakat. Pada indikasi pendanaan pemerintah melakukan pembahasan pada SKPD Terkait, dengan berbekal dari program kegiatan yang telah tersusun dari hasil KKL yang sudah selaras dengan instrument perencanaan dan dimasukkan dalam tabel program kegiatan dan pendanaan sanitasi, selanjutnya pokja melakukan kegiatan sinkronisasi konsolidasi pendanaan dengan melakukan kegiatan antara lain:
 - Internalisasi adalah kegiatan konsolidasi dan sinkronisasi program kegiatan dan pendanaan di tingkat kota.
 - Eksternalisasi adalah kegiatan konsolidasi dan sinkronisasi program kegiatan dan pendanaan di tingkat provinsi dan pusat melalui kegiatan Lokakarya.

1.3 Dasar Hukum

A. Undang-Undang Republik Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
8. Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

C. Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

D. Peraturan Menteri Republik Indonesia

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 16 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Sarana Dan Prasarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Sekjen/PLB.0/4/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga;
8. Permendagri Nomor 7 tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

E. Peraturan Daerah/Qanun Provinsi Aceh

1. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017-2025;
2. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
3. Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023 – 2026.

F. Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota Banda Aceh

1. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Jamban;
2. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
4. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen pemutakhiran SSK ini terdiri atas 6 (enam) BAB beserta lampiran-lampirannya. Gambaran umum dan urutan pembahasan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum serta sistematika penulisan dokumen pemuktahiran SSK.

BAB II : PROFIL SANITASI SAAT INI

Bab ini terdiri dari gambaran wilayah, profil sanitasi saat ini, serta permasalahan sanitasi dan area beresiko sanitasi.

BAB III : KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Bab ini menguraikan tentang visi dan misi sanitasi, tujuan dan sasaran sanitasi, pentahapan pengembangan sanitasi, skenario pencapaian sasaran serta kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

BAB IV : STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Bab ini menguraikan tentang strategi pengembangan sanitasi yang mencakup air limbah domestik dan pengelolaan persampahan.

BAB V : PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Bab ini berisi ringkasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non-pemerintah, dan antisipasi *funding gap*.

BAB VI : MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Bab ini menguraikan tentang hasil/capaian implementasi SSK sebelumnya (SSK 2020-2024) serta proses dan mekanisme monitoring dan evaluasi hasil/capaian implementasi SSK selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu periode implementasi tahun 2025-2029.

LAMPIRAN : Bagian ini terdiri atas 5 (lima) Lampiran utama yaitu :

1. Lampiran 1: Ringkasan Eksekutif Kajian EHRA
2. Lampiran 2: Ringkasan Eksekutif Kajian Keuangan Daerah dan Perekonomian Daerah
3. Lampiran 3: Peta Rencaa pengembangan berdasarkan rencana induk (apabila ada)
4. Lampiran 4: Lembar Kerja Analisis Area Beresiko menggunakan Instrumen SSK
5. Lampiran 5: Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan.

PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1. Gambaran Wilayah

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Provinsi Aceh yang masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Banda Aceh juga terletak pada posisi strategis di sekitar Selat Malaka yang menjadi pintu gerbang lalu lintas jalur laut dari segi perniagaan dan kebudayaan. Pada sekitar abad ke-17 dimasa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda, pengaruh agama dan Kebudayaan Islam begitu besar bagi masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan “Seuramo Mekkah” atau kini dikenal dengan Serambi Mekkah. Kota Banda Aceh juga menerapkan Qanun sebagai peraturan perundang-undangnya sejenis Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pada Tahun 2004, Kota Banda Aceh mengalami cobaan berat yaitu bencana Tsunami, namun kota ini tetap tegar dan berusaha pulih serta membangun kembali dirinya sebagai pusat ekonomi dan budaya di wilayah Aceh dan sekitarnya.

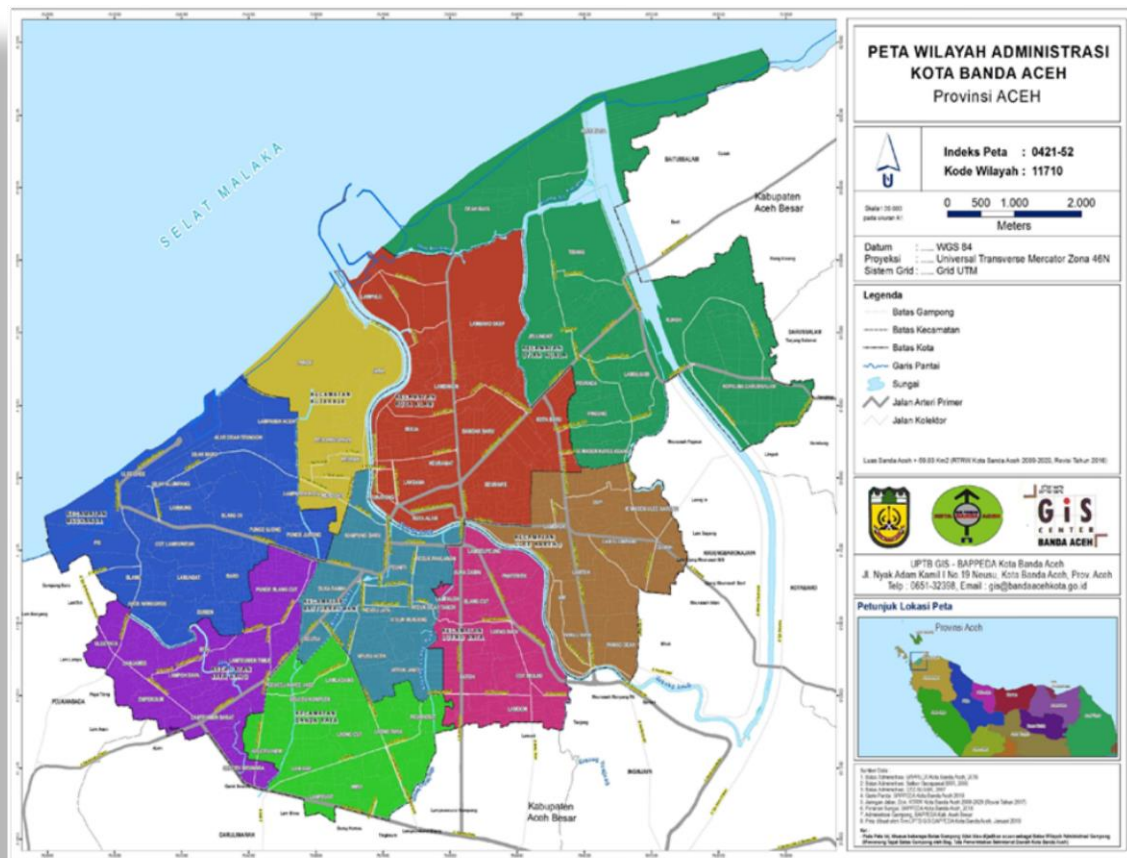
Secara astronomis, Kota Banda Aceh berada antara 05°16'15" – 05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15" – 95°22'35" Bujur Timur dan berada di belahan bumi bagian utara. Sementara menurut letak geografisnya, Kota Banda Aceh berada di ujung Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling Barat dari Pulau Sumatera dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia;
- Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar

Kota Banda Aceh masuk dalam katagori kota sedang dengan luas sekitar 61,36 km². atau 6.132 Ha. Dari luas tersebut, secara administrasi Kota Banda Aceh terbagi menjadi 9 kecamatan dan 90 gampong (desa). Wilayah administrasi kecamatan di lingkup Kota Banda Aceh adalah: Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng.

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kota Banda Aceh



Sumber: Bappeda Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah per-Kecamatan

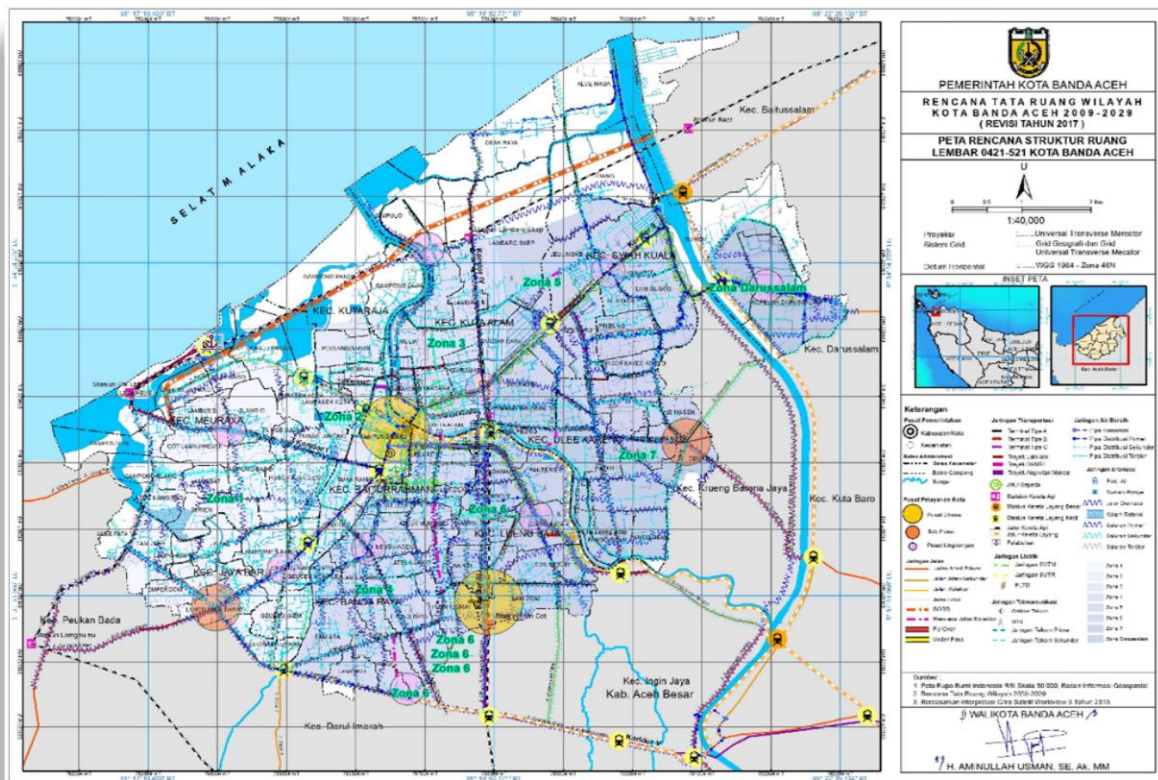
Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan		Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah Rumah Tangga		Kepadatan di area terbangun (jiwa/ha)
	Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
MEURAXA	0	16	483,65	0	27.090	0	7.740	56
JAYA BARU	0	9	394,20	0	27.157	0	7.828	69
BANDA RAYA	0	10	437,47	0	26.607	0	7.798	61
BAITURRAHMAN	0	10	304,43	0	32.506	0	9.963	107
LUENG BATA	0	9	368,16	0	25.702	0	7.615	70
KUTA ALAM	0	11	644,90	0	42.691	0	12.864	66
KUTA RAJA	0	6	154,86	0	14.928	0	4.414	96
SYIAH KUALA	0	10	789,64	0	34.247	0	10.251	43
ULEE KARENG	0	9	441,27	0	28.610	0	8.248	65
Jumlah		90	4.018,58		259.538		76.721	633

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2024

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

Dari tabel 2.1 di atas, Kecamatan Meuraxa merupakan kecamatan dengan jumlah gampong terbanyak, dimana terdapat 16 gampong dalam wilayah administrasi kecamatan tersebut. Kecamatan Kuta Raja merupakan kecamatan dengan jumlah gampong paling sedikit yaitu 6 gampong. Kecamatan Kuta Alam mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 42.691 jiwa atau 12.864 Rumah Tangga (RT) diikuti Kecamatan Syiah Kuala 34.247 jiwa atau 10.251 RT dan Kecamatan Baiturrahman 32.506 jiwa atau 9.963 RT. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh tahun 2023 adalah 633 jiwa perhaktarnya. Kecamatan Baiturrahman memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 107 jiwa/ ha. Sedangkan Kecamatan Syiah Kuala memiliki kepadatan penduduk terendah adalah 43 jiwa/ha.

Gambar 2.2.
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Banda Aceh



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029

Struktur ruang Kota Banda Aceh adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang Kota Banda Aceh dikembangkan dengan pendekatan multiple nuclei atau memiliki banyak pusat kegiatan.

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

Hal ini dapat dilihat dari rencana pengembangan Pusat Kegiatan Kota Banda Aceh sebagai berikut:

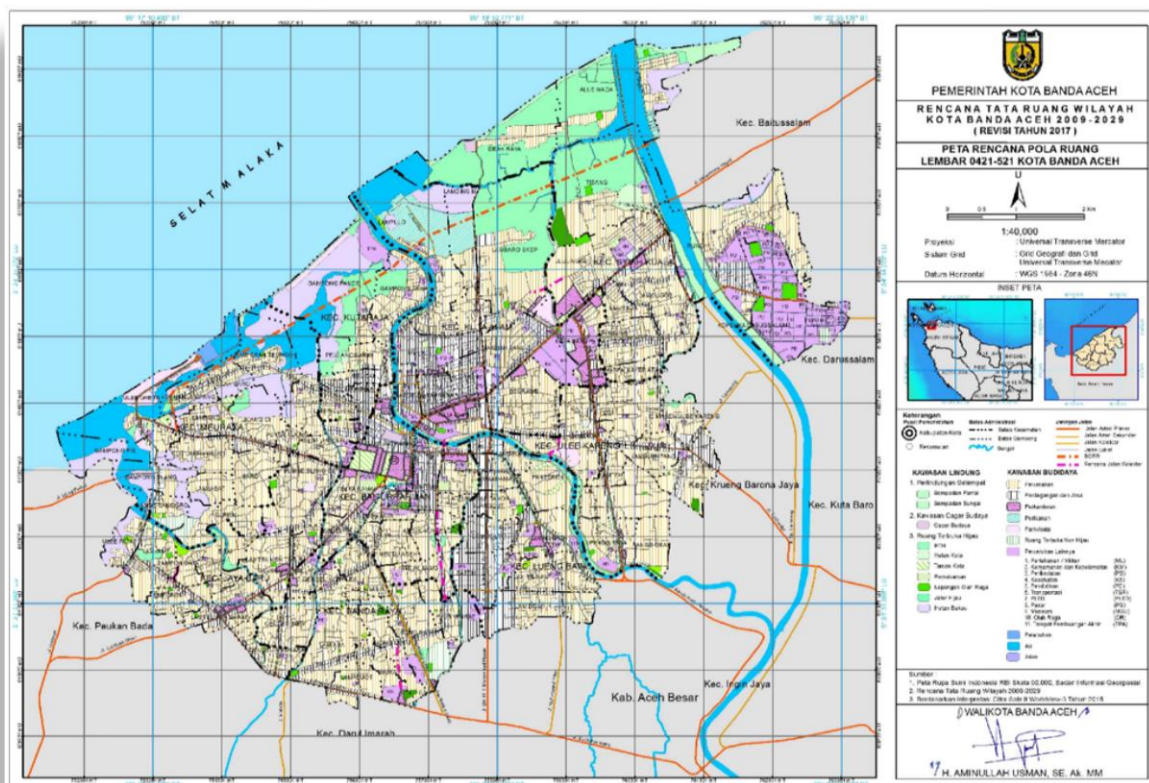
1. Pusat Kegiatan Lama Pasar Aceh/Peunayong melayani wilayah Kecamatan Meuraxa, Kuta Raja, Kuta Alam, Ulee Kareng, Syiah Kuala dan sebagian Baiturrahman; dan
2. Pusat Kegiatan Baru Batoh/Lamdom melayani wilayah Kecamatan Jaya Baru, Banda Raya, Lueng Bata dan sebagian Baiturrahman.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat Kota Banda Aceh juga mengembangkan Sub Pusat Kegiatan (SPK) sebagai berikut:

1. SPK Lamteumen melayani wilayah Kecamatan Meuraxa dan Jaya Baru; dan
2. SPK Ulee Kareng melayani wilayah Kecamatan Ulee Kareng dan Syiah Kuala.

Pengembangan pusat-pusat kegiatan ini didukung dengan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana. Adapun sistem jaringan prasarana dan sarana yang akan dikembangkan meliputi: 1). Rencana kependudukan 2) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi 3). Rencana pengembangan sistem jaringan energi 4). Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi 5). Rencana pengembangan sistem jaringan utilitas 6). Rencana jalur evakuasi bencana 7). Rencana ruang perpustakaan dan 8). Rencana jaringan sumber daya air.

Gambar 2.3.
Peta Rencana Pola Ruang Kota Banda Aceh



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029

Dalam Rencana Pola Ruang Kota Banda Aceh, peruntukkan ruang perkotaan secara garis besar dibagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang direncanakan di Kota Banda Aceh terdiri dari Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Suaka Alam, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana, dan Ruang Terbuka Hijau. Klasifikasi peruntukan kawasan budidaya di Kota Banda Aceh meliputi Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa Komersial, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perikanan, Kawasan Pelabuhan, Ruang Terbuka Non Hijau dan peruntukkan lainnya seperti militer, peribadatan, dan lain-lain.

2.2. Profil Sanitasi Saat Ini

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Banda Aceh saat ini telah menggunakan Off-site System (Sistem Terpusat) yaitu suatu sistem pengolahan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah kesuatu tempat untuk selanjutnya diolah sebelum dibuang ke badan air.

Kepemilikan Jamban Sehat Permanen (JSP) di Kota Banda Aceh telah mencapai 100% dengan praktek BABS ditempat terbuka 0%. Pencanangan dan pendeklarasian Kota Banda Aceh sebagai kota yang telah bebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada tahun 2017 membuat Kota Banda Aceh telah berstatus Kota Open Defecation Free (ODF) sampai dengan saat ini.

Berbagai upaya tengah dilakukan agar Kota Banda Aceh bergerak menuju tahapan akses sanitasi yang lebih tinggi, yaitu sanitasi aman. Kota Banda Aceh pada Tahun 2029 diharapkan dapat meningkatkan akses sanitasi aman sebagaimana yang ditargetkan sebesar 33%, yang mana saat ini capaian masih sebesar 12,11%. Terdapat Gap sebesar 20,89% yang harus dicapai dalam beberapa tahun kedepan.

Kondisi eksisting pengelolaan sanitasi Kota Banda Aceh saat ini dari tiap-tiap sub sektor dapat digambarkan sebagai berikut:

2.2.1 Air Limbah Domestik

1) Sistem dan Infrastruktur

Persentase RT menggunakan tangki septik individual aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT) adalah 7,04% atau 5.398 Rumah Tangga (RT) dari total seluruh Rumah Tangga yang ada di Kota Banda Aceh yaitu 76.721. Persentase RT menggunakan tangki septik komunal aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT) sebesar 5,07% atau sebanyak 3.890 RT, akses layak bersama sebanyak 0% dan akses layak individu sebesar 87,89% atau sebanyak 67.433 RT, BABS ditempat terbuka sebesar 0%. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2. Capaian Akses Air Limbah Domestik

No	Deskripsi	Persentase
1	Aman	
	Persentase RT menggunakan tangki septik individual aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT)	7,04%
	Persentase RT menggunakan tangki septik komunal aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT)	5,1%
2	Layak	
	Persentase RT menggunakan jamban bersama/MCK	0,0%
	Persentase RT terkoneksi ke tangki septik (komunal atau individu) layak	87,89%
3	Persentase RT menggunakan fasilitas yang belum layak	
4	Persentase RT yang BABS terselubung	
5	Persentase RT yang BABS di tempat terbuka	0,0%

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2024

Tabel 2.3. Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Pemerintah Daerah		
2	Jumlah truk tinja	Unit	1
3	Status aset	Serah terima aset atau pembelian sendiri (UPTD)	
4	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	4
5	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	5
6	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	1
	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	3
1	Swasta		
2	Jumlah truk tinja	Unit	11
3	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	4
4	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	8
5	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	2
	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	5

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2024

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

Sebagaimana Tabel 2.3 diatas dapat dijelaskan bahwa sehubungan dengan sub sistem pengangkutan SPALD-Setempat, Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki 3 unit truk tinja dengan kapasitas masing-masing 4 m³ namun pada saat ini yang beroperasi hanya 1 unit untuk melayani masyarakat, 1 unit rusak dan 1 unit lagi dikhususkan untuk menyedot IPAL. Pihak swasta di Kota Banda Aceh sudah mulai terlibat dalam hal pelayanan pengurusan lumpur tinja. Mereka memiliki 11 unit truk tinja dengan kapasitas masing-masing 4 m³, beroperasi rutin setiap harinya 2 unit. Volume truk tinja yang dibuang ke IPLT sebanyak 13 m³/hari. Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT sebanyak 3 truk/hari dengan rata-rata rumah tangga terlayani pengurusan lumpur tinjanya sebanyak 8 RT/hari.

Gambar 2.4.
Sarana Pengangkutan SPALD-Setempat Kota Banda Aceh



Foto 1 : Truk Tinja
Foto diambil : 15 /02/2024



Foto 2 : Truk Tinja
Foto diambil : 15 /02/2024

Tabel 2.4. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No	Deskripsi	IPLT 1		IPLT 2	
		Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah
	SPALD-S				
1	Nama IPLT	IPLT 2 Sistem Tertutup (Unicef)		IPLT 1 Sistem Terbuka (Jica)	
2	Status aset	Sudah		Sudah	
3	Kapasitas IPLT	m3/hari	85	m3/hari	50
4	Tahun Pembangunan		2007	2005	2005
5	Tahun Rehabilitasi		0		0
6	Wilayah Ckupan Pelayanan		90		0
7	Wilayah layanan terdekat	km	1	km	0
8	Wilayah layanan terjauh	km	35	km	0
	Deskripsi IPLT				
1	Sistem yang digunakan	Bak penerima-saringan+grit chamber - Bak Sedimentasi - Kolam anaerob-kolam aerasi-kolam maturasi - Anaerobic digester-sludge drying bed-pemanfaatan padatan		Bak penerima-saringan+grit chamber - Anaerobic digester - Kolam anaerob-kolam aerasi-kolam maturasi - Anaerobic digester-sludge drying bed-pemanfaatan padatan	
2	Kondisi IPLT	Bangunan Baik		Bangunan Baik	
3	Kualitas Effluen	1		2	
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Memadai		Ada, Memadai	
5	Kondisi jalan akses	Baik (Aspal)		Baik (Aspal)	

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2024

Gambar 2.5. Sarana Pengolahan SPALD-Setempat Kota Banda Aceh



Foto 1 : IPLT bantuan JICA
(Sistem Terbuka)
Foto diambil : 15 /02/2024



Foto 1 : IPLT bantuan Unicef
(Sistem Tertutup)
Foto diambil : 15 /02/2024



Foto 2 : IPLT bantuan JICA
(Sistem Terbuka)
Foto diambil : 15 /02/2024



Foto 2 : IPLT bantuan Unicef
(Sistem Tertutup)
Foto diambil : 15 /02/2024



Foto 3 : IPLT bantuan JICA
(Sistem Terbuka)
Foto diambil : 15 /02/2024



Foto 3 : IPLT bantuan Unicef
(Sistem Tertutup)
Foto diambil : 15 /02/2024

Tabel 2.5. Sub-Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD-Terpusat

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M ³ /Hari)	Kapasitas terpakai (M ³ /Hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
1	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Gp. Blang Kec. Meuraxa (DAK).	Gp. Blang Kec. Meuraxa	2023	48	21	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
2	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Gp. Kuta Alam Kec. Kuta Alam (DAK).	Gp. Kuta Alam Kec. Kuta Alam	2023	48	25	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
3	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Gp. Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru (DAK).	Gp. Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru	2023	48	17	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
4	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Gp. Deah Raya 1 Kec. Syiah Kuala (DAK).	Gp. Deah Raya 1 Kec. Syiah Kuala	2023	48	18	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
5	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Gp. Deah Raya 2 Kec. Syiah Kuala (DAK).	Gp. Deah Raya 2 Kec. Syiah Kuala	2023	48	18	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
6	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Gp. Deah Raya 3 Kec. Syiah Kuala (DAK).	Gp. Deah Raya 3 Kec. Syiah Kuala	2023	48	19	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
7	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK di Gampong Blang Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.	Gp. Blang Kec. Meuraxa	2022	24	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M ³ /Hari)	Kapasitas terpakai (M ³ /Hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
8	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK di Gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh.	Gp. Lampaseh Kota Kec. Kuta Raja	2022	24	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
9	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.	Gp. Jeulingke Kec. Syiah Kuala	2022	24	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
10	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK di Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.	Gp. Doy Kec. Ulee Kareng	2022	24	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
11	IPAL Pasar Mahira Gp. Lampulo Kec. Kuta Alam	Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam	2022	24	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	UPTD	Dilakukan	Sudah
12	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK pada Gp. Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.	Gp. Jeulingke Kec. Syiah Kuala	2021	24	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
13	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK pada Gp. Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.	Gp. Setui Kec. Baiturrahman	2021	48	14	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
14	Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK pada Gp. Ulee Lheue Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.	Gp. Ulee Lheue Kec. Meuraxa	2021	24	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M ³ /Hari)	Kapasitas terpakai (M ³ /Hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
15	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK pada Gp. Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.	Gp. Neusu Jaya Kec. Baiturrahman	2021	48	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
16	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK pada Rusunawa Blok A Gp. Keudah Kec. Kuta Raja.	Rusunawa Blok A Gp. Keudah Kec. Kuta Raja.	2020	48	47	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
17	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK pada Rusunawa Blok B Gp. Keudah Kec. Kuta Raja.	Rusunawa Blok B Gp. Keudah Kec. Kuta Raja.	2020	48	47	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
18	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK pada Rusunawa Blok C Gp. Keudah Kec. Kuta Raja.	Rusunawa Blok C Gp. Keudah Kec. Kuta Raja.	2020	48	47	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
19	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK pada Rusunawa Blok D Gp. Keudah Kec. Kuta Raja.	Rusunawa Blok D Gp. Keudah Kec. Kuta Raja.	2020	48	47	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
20	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK pada Rusunawa Blok E Gp. Peulanggahan Kec. Kuta Raja.	Rusunawa Blok E Gp. Peulanggahan Kec. Kuta Raja.	2020	48	37	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
21	Pembangunan IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK dengan layanan 50 KK pada Gp. Blang Oi Kec. Meuraxa	Gp. Blang Oi Kec. Meuraxa	2020	24	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
22	Pembangunan IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK dengan layanan 50 KK pada Meunasah Batoh Dusun Batoh Jaya Gp. Batoh Kec. Lueng Bata.	Meunasah Batoh Dusun Batoh Jaya Gp. Batoh Kec. Lueng Bata.	2020	24	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M ³ /Hari)	Kapasitas terpakai (M ³ /Hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
23	Pembangunan IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK dengan layanan 50 KK pada Meunasah Tuha Dusun Meunasah Tuha Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala.	Meunasah Tuha Dusun Meunasah Tuha Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala.	2020	24	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
24	Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 50 KK pada Dayah MUQ Darussalam Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala .	Dayah MUQ Darussalam Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala .	2020	24	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
25	Pembangunan MCK ++ dan jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 siswa menetap pada Yayasan Nurul Nabi Gp. Lambhuk Kec. Ulee Kareng.	Yayasan Nurul Nabi Gp. Lambhuk Kec. Ulee Kareng.	2020	24	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
26	Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 50 KK Dayah Darul Muallimin Gp. Doy.	Dayah Darul Muallimin Gp. Doy Kec. Ulee Kareng	2019	24	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
27	Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 50 KK Dayah Sirajussalikin Ilal Jannah Al Amiriah Gp. Baro Kec. Meuraxa	Dayah Sirajussalikin Ilal Jannah Al Amiriah Gp. Baro Kec. Meuraxa	2019	24	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
28	IPAL SANIMAS IDB Gampong Lam Jabat Dsn. Blang, Kec. Meuraxa 2019	Gp. Lam Jabat Dsn. Blang, Kec. Meuraxa	2019	48	17	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
29	IPAL SANIMAS IDB Gampong Lam Jabat Dsn. Paya, Kec. Meuraxa 2019	Gp. Lam Jabat, Kec. Meuraxa	2019	48	17	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M ³ /Hari)	Kapasitas terpakai (M ³ /Hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
30	IPAL SANIMAS IDB Gampong Kota Baru Dsn. Malikul Saleh, Kec. Kuta Alam 2019	Gampong Kota Baru, Kec. Kuta Alam	2019	48	17	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
31	IPAL SANIMAS IsDB Gampong Peunayong Dsn. Garuda , Kec. Kuta Alam 2019	Gampong Peunayong, Kec. Kuta Alam	2019	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
32	IPAL SANIMAS IDB Gampong Cot Mesjid Dsn. Lembah Hijau, Kec. Lueng Bata 2019	Gampong Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata	2019	48	22	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
33	IPAL SANIMAS IDB Gampong Cot Mesjid II Dsn. Cot Mesjid II, Kec. Lueng Bata 2019	Cot Mesjid II, Kec. Lueng Bata	2019	48	18	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
34	IPAL SANIMAS IDB Gp. Panteriek Dsn. Jempa II, Kec. Lueng Bata 2019	Gp. Panteriek Kec. Lueng Bata	2019	48	21	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
35	IPAL SANIMAS IDB Gp. Baro Dsn. Mangga Kec. Meuraxa 2019	Gp. Baro Dsn. Mangga Kec. Meuraxa	2019	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
36	IPAL SANIMAS IDB Gp. Baro Dsn. Nangka Kec. Lueng Bata 2019	Gp. Baro Dsn. Nangka Kec. Meuraxa	2019	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
37	IPAL SANIMAS IDB Gp. Surien Dsn. Geulumpang Kec. Meuraxa 2019	Gp. Surien Dsn. Geulumpang Kec. Meuraxa	2019	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M ³ /Hari)	Kapasitas terpakai (M ³ /Hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
38	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Dayah Babul Jannah Gp. Ceurih Kec. Ulee Kareng	Dayah Babul Jannah Gp. Ceurih Kec. Ulee Kareng	2018	24	12	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
39	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala.	Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala.	2018	24	12	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
40	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Dayah Darul Amin Gp. Ilie Kec. Ulee Kareng.	Dayah Darul Amin Gp. Ilie Kec. Ulee Kareng.	2018	24	12	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
41	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Gp. Ateuk Deah Tanoh Kec. Baiturrahman.	Gp. Ateuk Deah Tanoh Kec. Baiturrahman.	2018	24	12	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
42	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Gp. Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru.	Gp. Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru.	2018	24	12	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
43	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Gp. Deah Raya Kec. Syiah Kuala.	Gp. Deah Raya Kec. Syiah Kuala.	2018	24	12	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
44	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Gp. Alue Naga Kec. Syiah Kuala.	Gp. Alue Naga Kec. Syiah Kuala.	2018	24	12	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
45	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Gp. Batoh Kec. Lueng Bata.	Gp. Batoh Kec. Lueng Bata.	2018	24	12	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M ³ /Hari)	Kapasitas terpakai (M ³ /Hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
46	IPAL SANIMAS IDB Dsn. Sibayak Gp. Seutui Kec. Baiturrahman 2018	Dsn. Sibayak Gp. Seutui Kec. Baiturrahman	2018	48	27	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
47	IPAL SANIMAS IDB Dsn. Panyang I Gp. Mibo Kec. Banda Raya 2018	Dsn. Panyang I Gp. Mibo Kec. Banda Raya	2018	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
48	IPAL SANIMAS IDB Dsn. Kali Gp. Panteriek Kec. Lueng Bata 2018	Dsn. Kali Gp. Panteriek Kec. Lueng Bata	2018	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
49	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Gp. Ulee Lheu Kec. Meuraxa	Gp. Ulee Lheu Kec. Meuraxa	2017	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
50	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Gp. Lampulo Kec. Kuta Alam	Gp. Lampulo Kec. Kuta Alam	2017	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
51	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Gp. Asoe Nanggroe Kec. Meuraxa	Gp. Asoe Nanggroe Kec. Meuraxa	2017	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
52	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal GP. Lambaro Skep Kec. Kuta Alam	Gp. Lambaro Skep Kec. Kuta Alam	2017	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
53	IPAL SANIMAS IDB Gp. Tibang Dsn. Tgk. Meurah Kec. Syiah Kuala 2017	Dusun Tgk Meurah, Gampong Tibang Kec. Syiah Kuala	2017	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M ³ /Hari)	Kapasitas terpakai (M ³ /Hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
54	IPAL SANIMAS IDB Gp. Tibang Dsn. Tgk. Meulagu Kec. Syiah Kuala 2017	Dusun Tgk Meulagu, Gampong Tibang Kec. Syiah Kuala	2017	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
55	IPAL SANIMAS IDB Gp. Tibang Dsn. Tgk. Meulinje Kec. Syiah Kuala 2017	Dusun Tgk Meulinje I, Gampong Tibang Kec. Syiah Kuala	2017	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
56	IPAL SANIMAS IDB Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala 2017	Jl. Lhok Pata, Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala	2017	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
57	IPAL SANIMAS IDB Gp. Keuramat Dsn. Mawar Kec. Kuta Alam 2017	Dusun Mawar Lrg Mesjid Al-Ikhlas, Gampong Keuramat Belakang Kec. Kuta Alam	2017	48	27	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
58	IPAL SANIMAS IDB Gp. Keuramat Dsn. Sakura Kec. Kuta Alam 2017	Dusun Sakura Lrg. Mesjid Baiturrahman, Gampong Keuramat Depan Kec. Kuta Alam	2017	48	27	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
59	IPAL SANIMAS IDB Gp. Panteriek Kec. Lhueng Bata 2017	Dusun Jeumpa, Lr. Timur 6, Gampong Panteriek Kec. Lhueng Bata	2017	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
60	IPAL SANIMAS IDB Gp. Ilie 2 Kec. Ulee Kareng 2017	Dusun Kuta Alam, Gampong ilie Kec. Ulee Kareng	2017	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M ³ /Hari)	Kapasitas terpakai (M ³ /Hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
61	IPAL SANIMAS IDB Gp. ilie 1 Kec. Ulee Kareng 2017	Dusun Meunasah Tuha, Gampong ilie Kec. Ulee Kareng	2017	48	27	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
62	IPAL SANIMAS IDB Gp. Mulia Kec. Kuta Alam 2017	Ujong Blang, Kuburan Gampong Mulia Kec. Kuta Alam	2017	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Tidak dilakukan	Sudah
63	Pembangunan Toilet Umum Mesjid Gp. Doy SLBM	Gp. Doy Kec. Ulee Kareng	2016	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
64	Pembangunan Toilet Umum Pesantren Gp. Ceurih SLBM	Gp. Ceurih Kec. Ulee Kareng	2016	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
65	Pembangunan Toilet Umum Mesjid Gp. Blang Cut SLBM	Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata	2016	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
66	Pembangunan Toilet Umum Pesantren Gampong Cot Lamkuweuh SLBM	Gp. Cot Lamkuweuh Kec. Meuraxa	2016	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
67	Pembangunan Toilet Umum Mushalla Gampong Lamjame SLBM	Gp. Lamjame Kec. Jaya Baru	2016	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
68	Pembangunan Toilet Umum Pesantren Gampong Pango Raya SLBM	Gp. Pango Raya Kec. Ulee Kareng	2016	24	5	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M ³ /Hari)	Kapasitas terpakai (M ³ /Hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
69	Pembangunan MCK Plus Gampong le Masen Kec. Ulee Kareng	Gp. Pango Deah, Kec. Ulee Kareng	2015	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
70	Pembangunan MCK Plus Gampong Pango Deah, Kec. Ulee Kareng	Gp. Lamtemen Timur, Kec. Jaya Baru	2015	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
71	Pembangunan MCK Plus Gampong Lamtemen Timur Kec. Jaya Baru	Gp. le Masen Ulee Kareng, Kec. Ulee Kareng	2015	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
72	Pembangunan MCK Plus Gampong Beurawe Kec. Kuta Alam	Gp. Beurawe, Kec. Kuta Alam	2015	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
73	IPAL SANIMAS IDB Gampong Ceurih 1, Kec. Ulee Kareng 2015	Dusun Tgk. Dicot, Gampong Ceurih Kec. Ulee Kareng	2015	48	18	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
74	IPAL SANIMAS IDB Gampong Pelanggahan, Kec. Kuta Raja 2015	Dusun Syech Bandar, Gampong Peulanggahan Kec. Kuta Raja	2015	48	13	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
75	IPAL SANIMAS IDB Gampong Ceurih 2, Kec. Ulee Kareng 2015	Gampong Ceurih, Kec. Ulee Kareng	2015	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
76	IPAL SANIMAS IDB Gampong Ateuk Pahlawan, Kec. Baiturrahman 2015	Gampong Ateuk Pahlawan, Kec. Baiturrahman	2015	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M ³ /Hari)	Kapasitas terpakai (M ³ /Hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
77	IPAL SANIMAS IDB Gampong Panterik 1, Kec. Lueng Bata 2015	Gampong Panterik 1, Kec. Lueng Bata	2015	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
78	IPAL SANIMAS IDB Gampong Panterik 2, Kec. Lueng Bata 2015	Gampong Panterik 2, Kec. Lueng Bata	2015	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
79	IPAL SANIMAS IDB Gampong Beurawe 1, Kec. Kuta Alam 2015	Gampong Beurawe 1, Kec. Kuta Alam	2015	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
80	IPAL SANIMAS IDB Gampong Beurawe 2, Kec. Kuta Alam 2016	Gampong Beurawe 2, Kec. Kuta Alam	2015	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
81	IPAL Pasar Peuniti	Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman	2014	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	UPTD	Dilakukan	Sudah
82	IPAL Pasar Jl. Kartini Peunayong	Gp. Peunayong kec. Kuta Alam	2014	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	UPTD	Dilakukan	Sudah
83	Pembangunan MCK Plus SLBM Gampong Pango Raya Kec. Ulee Kareng	Gp. Pango Raya Kec. Ulee Kareng	2014	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
84	Pembangunan MCK Plus SLBM Gampong Pande Kec. Kuta Raja	Gp. Pandee, Kec. Kuta Raja	2014	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M ³ /Hari)	Kapasitas terpakai (M ³ /Hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
85	Pembangunan MCK Plus SLBM Gampong Mulia Kec. Kuta Alam	Gp. Mulia Kec. Kuta Alam	2014	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
86	Pembangunan MCK Plus SLBM Gampong Emperum Kec. Jaya Baru	Gp. Emperum Kec. Jaya Baru	2014	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
87	IPAL SANIMAS IDB Gampong Ceurih, Kec. Ulee Kareng 2014	Gp. Ceurih Kec. Ulee Kareng	2014	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
88	IPAL SANIMAS IDB Gampong le Masen, Kec. Ulee Kareng 2014	Gp. le Masen Ulee Kareng, Kec. Ulee Kareng	2014	48	24	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
89	Pembangunan MCK Plus SLBM Gampong Deah Baro, Kec. Meuraxa	Gp. Deah Baro Kec. Meuraxa	2013	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
90	Pembangunan MCK Plus SLBM Gampong Lampoh Daya kec. Jaya Baru	Gp. Lampoh Daya, Kec. Jaya Baru	2013	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
91	Pembangunan MCK Plus SLBM Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam	Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam	2013	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
92	Pembangunan MCK Plus SLBM Gampong Illie Kec. Ulee Kareng	Gp. Illie, Kec. Ulee Kareng	2013	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Tahun Pembangunan/ Rehabilitasi	Kapasitas Design (M ³ /Hari)	Kapasitas terpakai (M ³ /Hari)	Sistem yang digunakan	Kondisi Bangunan	Pengelola	Pengecekan Effluen	Status Aset
93	Pembangunan MCK Plus Gampong Deah Glumpang Kec. Meuraxa	Gp. Deah Glumpang Kec. Meuraxa	2012	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
94	Pembangunan MCK Plus Gampong Alue Deah Teungoh Kec. Meuraxa	Gp. Alue Deah Teungoh Kec. Meuraxa	2012	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah
95	Pembangunan MCK Plus Gampong Lanjabat Kec. Meuraxa	Gp. Lanjabat Kec. Meuraxa	2012	24	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Dilakukan	Sudah

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh/Instrumen SSK Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah IPAL skala permukiman yang telah dibangun di Kota Banda Aceh mulai dari Tahun 2012 sampai dengan 2023 berjumlah 95 Unit dengan sumber pendanaan dari Dana DAK Sanitasi, Dana Otsus dan Bantuan IDB melalui Program SANIMAS. Kapasitas terpakai dari IPAL yang dibangun bervariasi, ada yang 10 m³/hari dan ada yang 27 m³/hari.

Gambar 2.6. Sarana pengolahan IPAL yang dimiliki



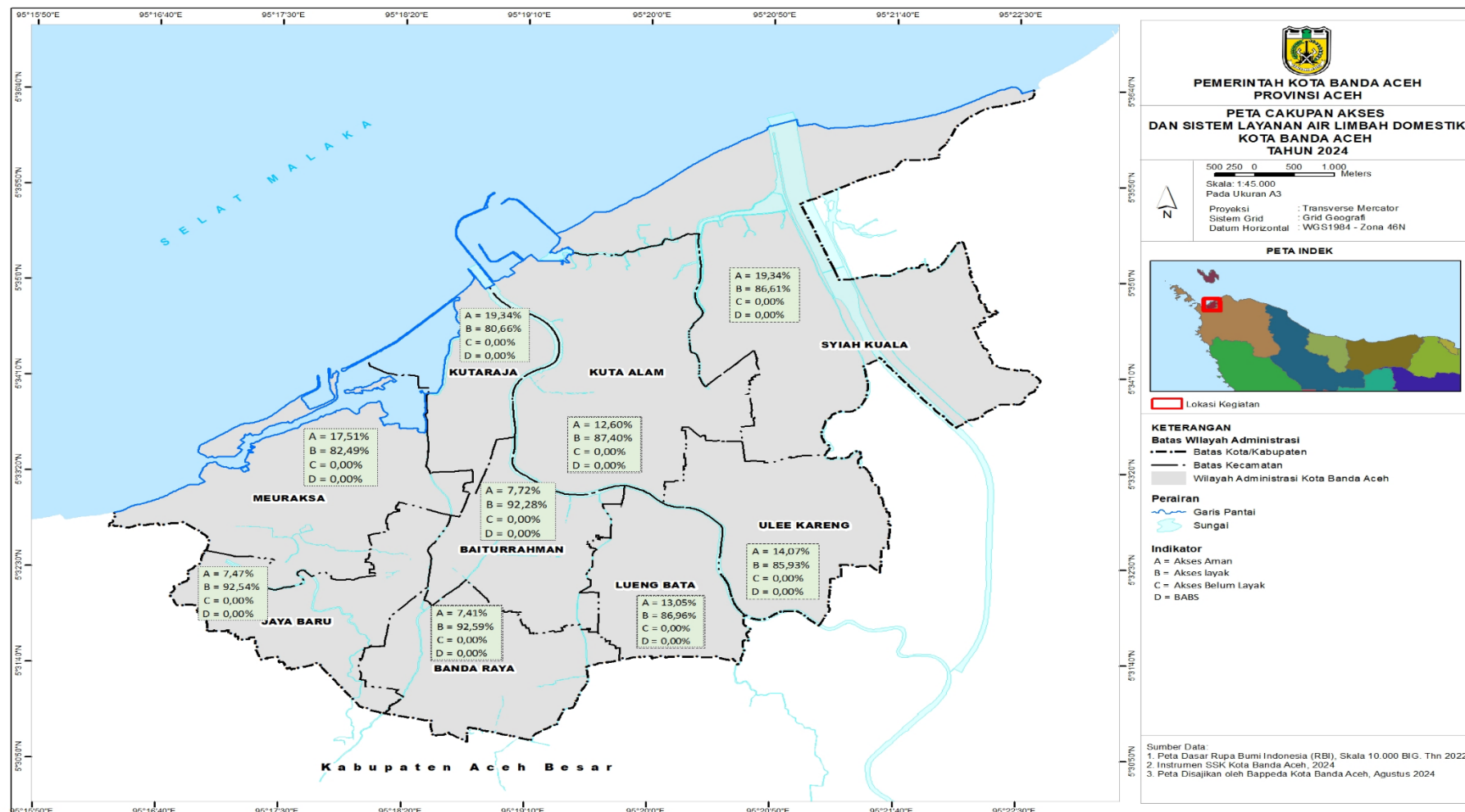
Foto 1 : IPAL Kec. Ulee Kareng
Foto diambil : 29 /02/2024



Foto 1 : IPAL Kec. Ulee Kareng
Foto diambil : 29 /02/2024

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

Gambar 2.7. Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik



Sumber : Bappeda Kota Banda Aceh/Instrumen SSK Tahun 2024

Tabel 2.6. Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2029 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun:2023	GAP (%) Terhadap Target 2029	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh			
1	Akses Aman	15%	13%	33%	22,56%	12,11%	20,89%	10,45%
2	Akses Layak	90%	80%	100%	100%	100%	0%	0%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	67%	77,44%	87,89%	-20,89%	-10,45%
	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	0%	0%	0%	0%	0%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	0%	0,00%	0%	0%	0,00%
3	Akses Belum Layak*	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	BABS Tertutup							
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian Akses Aman Kota Banda Aceh Tahun 2023 sebesar 12,11 %, capaian tersebut belum dapat memenuhi target jangka panjang Akses Aman Kota Banda Aceh sebesar 33 % sehingga Gap terhadap target jangka Panjang 20,89 % dan rencana target jangka pendek Akses Aman Kota Banda Aceh sebesar 22,56 % sehingga Gap terhadap target jangka pendek 10,45 % sehingga kondisi capaian Akses Aman Kota Banda Aceh Tahun 2023 tidak mendukung capaian target 5 Tahun Nasional.

Capaian Akses Layak Kota Banda Aceh Tahun 2023 sebesar 100%, capaian tersebut telah mencapai target Jangka Panjang Akses Layak Kota Banda Aceh sebesar 100% sehingga tidak terdapat Gap terhadap target Jangka Panjang dan target Jangka Pendek Akses Layak Kota Banda Aceh Tahun 2023.

Tabel 2.7. Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting

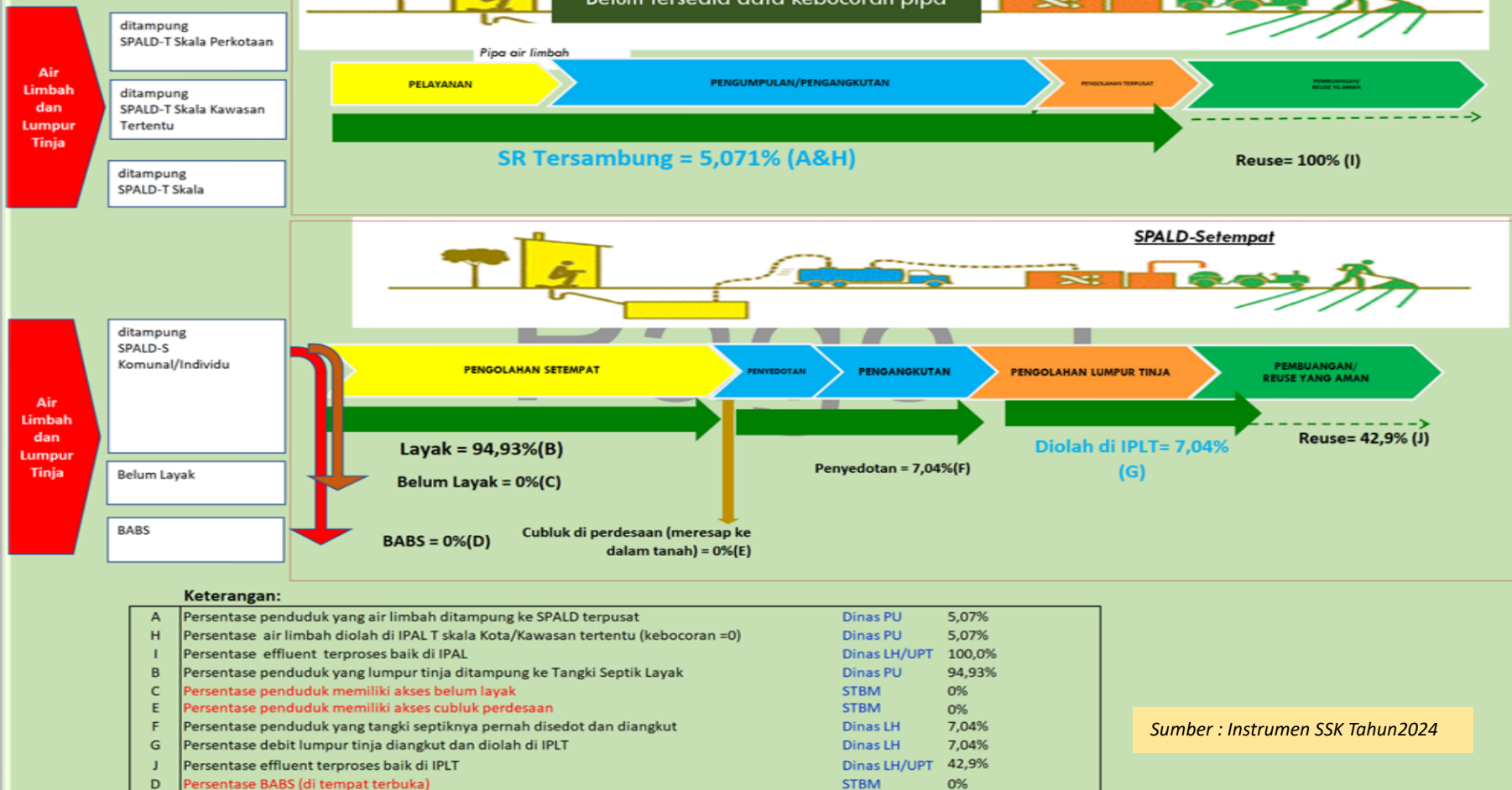
Infrastruktur	Persentase
SPALD-S	
Kapasitas Penggunaan IPLT	9,63%
Kapasitas penggunaan truk	13,54%
Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	71,11%
Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	46,61%
Kapasitas IPLT terhadap total RT	33,15%
SPALDT	
Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	53,52%
Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	60,00%
Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	0%

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2024

Kapasitas IPLT yang dibangun pada tahun 2005 dan 2007 memiliki kapasitas desain 135 m³/hari, dengan kapasitas operasional aktual IPLT sebesar 13 m³/hari sehingga saat ini kapasitas penggunaan IPLT masih mencapai 9,63%. Untuk sarana truk tinja saat ini ada 3 unit yang beroperasi dengan kapasitas angkut aktual 13 m³/hari. Sehingga kapasitas penggunaan truk masih mencapai 13,54%. Apabila semua truk tinja yang dimiliki oleh DLHK3 dan Swasta beroperasi dengan volume rata-rata tangki truk tinja 4 M³ dan optimal ritasi perhari 2 ritasi/hari/unit maka kapasitas angkut terhadap IPLT (desain) telah mencapai 71,11%, kapasitas truk tinja terhadap total RT sebanyak 46,61 % dan kapasitas IPLT terhadap total RT 33,15 dari total jumlah rumah tangga atau 72.831 RT yang menggunakan tangki septik individual dan komunal di Kota Banda Aceh. Sedangkan kapasitas penggunaan SPALDT permukiman telah mencapai 53,52 % atau sebanyak 3.800 SR yang terpasang dari total kapasitas desain sebanyak 71.000 SR.

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

Gambar 2.8. Analisis Rantai Layanan



Sumber : Instrumen SSK Tahun2024

(1) Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

a) Kelembagaan Pemerintah Daerah

Lembaga atau dinas yang mengelola air limbah domestik di Kota Banda Aceh adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3). Dinas-dinas tersebut mempunyai tugas dan wewenang dalam hal pelayanan kepada masyarakat tentang Air Limbah Domestik.

Tabel 2.8. Daftar (pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Air Limbah

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas PUPR	Regulator
DLHK3	Operator

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh 2024

Seperti terlihat pada Tabel 2.8. Daftar (pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelola Air Limbah yang ada di Kota Banda Aceh adalah Dinas PUPR dan DLHK3. DLHK3 selaku pengelola IPLT bertugas dan berfungsi sebagai Operator sedangkan Dinas PUPR bertugas dan berfungsi sebagai Regulator.

Tabel 2.9 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelola Air Limbah

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	PEMANGKU KEPENTINGAN		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
• Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota	Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum Dinas PUPR	-	-
• Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target			
• Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum Dinas PUPR	-	-
PENGADAAN SARANA			
• Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum Dinas PUPR	-	-
• Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)			
• Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum Dinas PUPR	-	-

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	PEMANGKU KEPENTINGAN		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)			
Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum Dinas PUPR	-	-
PENGELOLAAN			
Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum Dinas PUPR	-	-
Mengelola IPLT dan atau IPAL			
Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum Dinas PUPR	-	-
Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestik			
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB	Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum Dinas PUPR	-	-
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum Dinas PUPR	-	-
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik			
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik	Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum Dinas PUPR	-	-
MONITORING DAN EVALUASI			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota	Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum Dinas PUPR	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum Dinas PUPR	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum Dinas PUPR	-	-

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh 2024

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

b) Kelembagaan Masyarakat

Tabel 2.10. Format Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Tahun 2024

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Gp. Blang Kec. Meuraxa (DAK).	- KPP Sago Payalok - 2023	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	- Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gp. Blang Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
2	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Gp. Kuta Alam Kec. Kuta Alam (DAK).	- KPP Sagoe Kulam - 2023	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gp. Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
3	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Gp. Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru (DAK).	- KPP Udep Beusare - 2023	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gp. Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
4	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Gp. Deah Raya 1 Kec. Syiah Kuala (DAK).	- KPP Deah Raya 2 - 2023	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gp. Deah Raya Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
5	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Gp. Deah Raya 2 Kec. Syiah Kuala (DAK).	- KPP Laksamana Banta Muda - 2023	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gp. Deah Raya Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Gp. Deah aya 3 Kec. Syiah Kuala (DAK).	- KPP Kuala Aceh - 2023	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gp. Deah Raya Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
7	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK di Gampong Blang Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.	- KPP But Nanggro - 2022	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gampong Blang Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
8	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK di Gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh.	- KPP Tangguh Berata Lpk - 2022	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
9	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK di Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.	- KPP Sakti - 2022	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
10	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK di Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.	- KPP Rizqi Bahagia - 2022	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK pada Gp. Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.	- KPP Jeumpa - 2021	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gp. Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
12	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK pada Gp. Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.	- KPP Seulawah Gemilang - 2021	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gp. Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
13	Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK Gp. Ulee Lheue Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.	- KSM Lam Kuta - 2021	- KSM\ - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gp. Ulee Lheue Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
14	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Gp. Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.	- KPP - 2021	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gp. Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
15	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Rusunawa Blok A Gp. Keudah Kec. Kuta Raja.	- UPTD Rusunawa - 2020	- UPTD - SK Walikota No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Rusunawa Blok A Gp. Keudah Kec. Kuta Raja.	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
16	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Rusunawa Blok B Gp. Keudah Kec. Kuta Raja.	- UPTD Rusunawa - 2020	- UPTD\ - SK Walikota No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Rusunawa Blok B Gp. Keudah Kec. Kuta Raja.	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Rusunawa Blok C Gp. Keudah Kec. Kuta Raja.	- UPTD Rusunawa - 2020	- UPTD - SK Walikota No. -	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Rusunawa Blok C Gp. Keudah Kec. Kuta Raja.	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
18	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Rusunawa Blok D Gp. Keudah Kec. Kuta Raja.	- UPTD Rusunawa - 2020	- UPTD - SK Walikota No. -	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Rusunawa Blok D Gp. Keudah Kec. Kuta Raja.	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
19	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Rusunawa Blok E Gp. Peulanggahan Kec. Kuta Raja.	- UPTD Rusunawa - 2020	- UPTD - SK Walikota No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Rusunawa Blok E Gp. Peulanggahan Kec. Kuta Raja.	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
20	Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK Gp. Blang Oi Kec. Meuraxa	- KPP Sejahtera - 2020	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gp. Blang Oi Kec. Meuraxa	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
21	Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK Meunasah Batoh Dusun Batoh Jaya Gp. Batoh Kec. Lueng Bata.	- KSM Krueng Lueng Paga Batoh Jaya - 2020	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Meunasah Batoh Dusun Batoh Jaya Gp. Batoh Kec. Lueng Bata.	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
22	Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK Meunasah Tuha Dusun Meunasah Tuha Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala.	- KSM Dayah Quba - 2020	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Meunasah Tuha Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala.	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 50 KK pada Dayah MUQ Darussalam Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala .	- KSM Lampoh Kulam Jie Ee - 2020	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dayah MUQ Darussalam Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala .	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
24	Pembangunan MCK ++ dan jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 siswa menetap pada Yayasan Nurul Nabi Gp. Lambhuk Kec. Ulee Kareng.	- KSM Zawayah Nurun Nabi - 2020	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Yayasan Nurul Nabi Gp. Lambhuk Kec. Ulee Kareng.	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
25	Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 50 KK Dayah Darul Muallimin Gp. Doy.	- KSM Jroh - 2019	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dayah Darul Muallimin Gp. Doy Kec. Ulee Kareng	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
26	Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 50 KK Dayah Sirajussalikin Ilal Jannah Al Amiriah Gp. Baro.	- KSM Rizqi Bahagia - 2019	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dayah Sirajussalikin Ilal Jannah Al Amiriah Gp. Baro Kec. Meuraxa	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
27	SPALD-T	- KPP Mangga - 2019	- KPP - SK Geuchik No.	9 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Mangga Gampong Baro Kampung Baru	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	SPALD-T dan MCK	- KPP Geulumpang - 2019	- KPP - SK Geuchik No.	8 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Geulumpang Gp. Surien	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
29	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Dayah Babul Jannah Gp. Ceurih Kec. Ulee Kareng	- KSM Ceria - 2018	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dayah Babul Jannah Gp. Ceurih Kec. Ulee Kareng	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
30	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala.	- KSM Meutuah - 2018	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Mushalla Al Muhajirin Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala.	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
31	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Dayah Darul Amin Gp. Ilie Kec. Ulee Kareng.	- KSM Darul Amin - 2018	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dayah Darul Amin Gp. Ilie Kec. Ulee Kareng.	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
32	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Gp. Ateuk Deah Tanoh Kec. Baiturrahman.	- KSM Meupakat - 2018	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Lingkungan Meunasah Gp. Ateuk Deah Tanoh Kec. Baiturrahman.	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
33	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Gp. Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru.	- KSM Serba Guna - 2018	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gp. Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru.	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif/ sudah direnovasi

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	MCK Kombinasi + SPALD-T	- KPP Dusun Panyang - 2018	- KPP - SK Geuchik No.	6 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Panyang 1 Gp. Mibo	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
35	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Gp. Deah Raya Kec. Syiah Kuala.	- KSM Bangun Bersama - 2018	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gp. Deah Raya Kec. Syiah Kuala.	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
36	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Gp. Alue Naga Kec. Syiah Kuala.	- KSM Naga Sakti - 2018	- KSM - Akte Noaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gp. Alue Naga Kec. Syiah Kuala.	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
37	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Gp. Batoh Kec. Lueng Bata.	- KSM Abu Hasan Al As Ari - 2018	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gp. Batoh Kec. Lueng Bata.	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
38	MCK Kombinasi + SPALD-T	- KPP Dusun Kali - 2018	- KPP - SK Geuchik No.	11 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Kali Gp. Penteriek	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
39	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Gp. Ulee Lheu Kec. Meuraxa	- Ksm - 2017	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gp. Ulee Lheu Kec. Meuraxa	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Gp. Lampulo Kec. Kuta Alam	- Ksm - 2017	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Mesjid Gp. Lampulo Kec. Kuta Alam	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
41	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal Gp. Asoe Nanggroe Kec. Meuraxa	- Ksm - 2017	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gp. Asoe Nanggroe Kec. Meuraxa	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
42	Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal GP. Lambaro Skep Kec. Kuta Alam	- Ksm - 2017	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Gp. Lambaro Skep Kec. Kuta Alam	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
43	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	- KPP Tgk Meurah - 2017	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Tgk Meurah, Gampong Tibang	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
44	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	KPP Tgk Meulagu - 2017	- KPP - SK Geuhik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Tgk Meulagu, Gampong Tibang	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
45	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	- KPP Tgk Meulinje - 2017	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Tgk Meulinje I, Gampong Tibang	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
46	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	- KPP Kp. Rukoh - 2017	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Jl. Lhok Pata, Gampong Rukoh	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	- KPP Mawar - 2017	- KP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Mawar Lrg Mesjid Al-Ikhlas, Gampong Keuramat Belakang	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
48	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	- KPP sakura - 2017	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Sakura Lrg MesjidBaiturrahman , Gampong Keuramat Depan	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
49	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	- KPP Jeumpa - 2017	- KPP - SK Geuchik No.	7 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Jeumpa, Lr. Timur 6, Gampong Panteriek	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
50	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	- KPP Dusun Kuta Alam - 2017	- KPP - SK Geuchi No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Kuta Alam, Gampong ilie	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
51	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	- KPP Dusun Meunasah Tuha - 2017	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Meunasah Tuha, Gampong Illie	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
52	Pembangunan Toilet Umum Mesjid Gp. Doy	- Ksm - 2016	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Mesjid Sabilli Jannah Gp. Doy Kec. Ulee Kareng	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Pembangunan Toilet Umum Pesantren Gp. Ceurih	- KSM - 2016	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dayah Budi Muthmainnah Gp. Ceurih Kec. Ulee Kareng	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
54	Pembangunan Toilet Umum Mesjid Gp. Blang Cut	- KSM - 2016	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Mesjid Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
55	Pembangunan Toilet Umum Pesantren Gampong Cot Lamkuweuh	- KSM - 2016	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dayah Darul Fikri Al Waliyah Gampong Cot Lamkuweuh	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
56	Pembangunan Toilet Umum Mushalla Gampong Lamjame	- KSM - 2016	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Mushalla Gampong Lamjame	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
57	Pembangunan Toilet Umum Pesantren Gampong Pango Raya	- KSM - 2016	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dayah Raudhatul Hikmah Al WaliyyahGp. Pango Raya Kec. Ulee Kareng	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
58	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	- KPP Ahmadi - 2016	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Jl. Tgk. Bunthok, Dusun Meunasah Raya, Gampong Beurawe	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	- KPP Ilham - 2016	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Meunasah Kayee Jato, Gampong Beurawe	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
60	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	- KPP KP. Mulia - 2016	- KPP - SK Geuhik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Ujong Blang, Kuburan Gampong Mulia	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
61	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	- KPP Sari - 2016	- KPP - SK Geuchik No.	7 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Bambu, Gampong Panteriek	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
62	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	- KPP Junaidi - 2016	- KPP - SK Geuchik No.	7 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Seulanga, Gampong Panteriek	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
63	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	- KPP Saidi - 2016	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Labui, Lr. Sawah, Gampong Ateuk Pahlawan	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
64	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	- KPP Podihagu - 2016	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Podihagu, Gampong Ceurih	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	- KPP Pusara Habib - 2016	- KPP/ - SK Guchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Pusara Habib, Gampong Ceurih	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
66	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	- KPP Dusun Cempaka - 2016 -	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Cempaka, Gampong le Masen Ulee Kareng	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
67	Pembangunan MCK Komunal + IPAL Komunal Gampong Pango Deah, Kec. Ulee Kareng	- Ksm - 2015	- KSM - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Mesjid Gp. Pango Deah, Kec. Ulee Kareng	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
68	Pembangunan MCK Komunal + IPAL Komunal Gampong Lamtemen Timur, Kec. Jaya Baru	- Ksm - 2015	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Mesjid Gp. Lamtemen Timur, Kec. Jaya Baru	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
69	Pembangunan MCK Komunal + IPAL Komunal Gampong le Masen Ulee Kareng, Kec. Ulee Kareng	- Ksm - 2015	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Meunasah Gp. le Masen Ulee Kareng, Kec. Ulee Kareng	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
70	Pembangunan MCK Komunal + IPAL Komunal Gampong Beurawe, Kec. Kuta Alam	- Ksm - 2015	- KSM - Akte Notris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Mesjid Al Furqan Gp. Beurawe, Kec. Kuta Alam	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	- KPP Dusun Tgk. Dicot - 2015	- KPP - SK Geucik	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Tgk. Dicot, Gampong Ceurih	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
72	IPAL Komunal Sistem Perpipaan	- KPP Syahbandar - 2015	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Syech Bandar, Gampong Peulanggahan	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
73	IPAL SANIMAS IsDB Gampong Lam Jabat, Kec. Meuraxa 2019	- KPP Ipal Mandiri - 2019	- KPP - SK Geuchik No.	9 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Blang Gp. Lam Jabat, Kec. Meuraxa	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
74	IPAL SANIMAS IsDB Gampong Lam Jabat, Kec. Meuraxa 2019	- KPP Paya Mandiri - 2019 -	- KPP - SK Geuchik No. -	9 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Paya Mesjid Gp. Lam Jabat, Kec. Meurax	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
75	Pembangunan MCK Plus Gampong Lam Jabat, Kec. Meuraxa	- KSM - 2014	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Mesjid Gp. Lam Jabat, Kec. Meuraxa	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
76	Pembangunan MCK Plus Gampong Pandee, Kec. Kuta Raja	- KSM - 2015	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Mesjid Gp. Pandee, Kec. Kuta Raja	Iuran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	Pembangunan MCK Plus Gampong Pango Raya, Kec. Ulee kareng	- KSM - 2015	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Paud/TK/Mesjid Gp. Pango Raya, Kec. Ulee kareng	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
78	Pembangunan MCK Plus Gampong Ilie, Kec. Ulee kareng	- Ksm Al-Ikhlas - 2015	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Mesjid Gp. Ilie, Kec. Ulee kareng	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
79	Pembangunan MCK Plus Gampong Deah Baru, Kec. Meuraxa	- Ksm - 2014	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Mesjid Gp. Deah Baru, Kec. Meuraxa	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
80	IPAL SANIMAS IsDB Gampong Baro, Kec. Meuraxa 2019	- KPP Nangka - 2019	- KPP - SK Geuchik No.	9 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Nangka Gp. Baro, Kec. Meuraxa	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
81	Pembangunan MCK Plus Gampong Deah Geulumpang, Kec. Meuraxa	- KSM - 2013	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Mesjid Gp. Deah Geulumpang, Kec. Meuraxa	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
82	Pembangunan MCK Plus Gampong Lampoh Daya, Kec. Jaya Baru	- KSM - 2015	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Mesjid Gp. Lampoh Daya, Kec. Jaya Baru	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
83	Pembangunan MCK Plus Gampong Emperom, Kec. Jaya baru	- KSM - 2016	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Mesjid Gp. Emperom, Kec. Jaya baru	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	IPAL Pasar Batoh	- UPTD Pasar Batoh. - 2015	- UPTD - SK Walikota	3 Orang		Pasar Batoh Gp. Batoh Kec. Lueng Bata			Aktif
85	IPAL Pasar Peuniti	- UPTD Pasar Peuniti - 2015	- UPTD SK Walikota	3 Orang		Pasar Ateuk Pahlawan Gp. Peuniti Kec. Baiturrahman			Aktif
86	IPAL Pasar Jl. Kartini Peunayong	- UPTD Pasar Peunayong. - 2016	- UPTD SK Walikota	3 Orang		Pasar sayur Peunayong Gp. Peunayong kec. Kuta Alam			Aktif
87	MCK Plus Peunayong kec. Kuta Alam	- KSM - 2014	- KSM - Akte Notaris No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Mesjid Gp. Peunayong kec. Kuta Alam	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
88	IPAL Pasar Mahira Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam	- UPTD Pasar Mahira. - 2022	- UPTD SK Walikota	3 Orang		Pasar Mahira Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam			Aktif
89	IPAL SANIMAS IsDB Gampong Kota Baru, Kec. Kuta Alam 2019	- KPP Malikiul Saleh - 2019	- KPP - SK Geuchik No.	6 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Malikiul Saleh Gp. Kota Baru, Kec. Kuta Alam	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	IPAL SANIMAS IsDB Gampong Peunayong, Kec. Kuta Alam 2019	- KPP Ipal Cendraga - 2019	- KPP - SK Geuchik No.	8 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Garuda Gp. Peunayong, Kec. Kuta Alam	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
91	IPAL SANIMAS IsDB Gampong Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata 2019	- KPP Lembah Hijau I - 2019	- KPP - SK Geuchik No.	8 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Lembah Hijau Gp. Cot Mesjid, Lueng Bata	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
92	IPAL SANIMAS IsDB Gampong Cot Mesjid II, Kec. Lueng Bata 2019	- KPP Lembah Hijau II - 2019	- KPP - SK Geuchik No.	5 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Lembah Hijau Gp. Cot Mesjid, Lueng Bata	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
93	IPAL SANIMAS IDB Gp. Doy Kec. Ulee Kareng 2017	- KPP Babun Najah - 2017	- KPP - SK Geuchik No.	8 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dayah Babun Najah Doy Kec. Ulee Kareng	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
94	IPAL SANIMAS IDB Gp. Setui Kec. Baiturrahman 2017	- KPP SANIMAS Gampong Setui - 2017	- KPP - SK Geuchik No.	7 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Sibayak 1 Gp. Setui Kec. Baiturrahman	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif
95	IPAL SANIMAS IDB Gp. Panteeriek Kec. Lueng Bata 2019	- KPP Gp. Panteeriek - 2019	- KPP - SK Geuchik No.	7 Orang	Perawatan dan pemeliharaan IPAL	Dusun Jeumpa II Gp. Panteeriek Kec. Lueng Bata	luran warga	Jaringan perpipaan dan fasilitas IPAL	Aktif

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh Tahun 2024



c) Pemetaan Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah Daerah

Tabel 2.11. Pemetaan Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah Domestik

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumber Daya
Anggota Legislatif	Legislasi	Tim anggaran terkait Alokasi
	Penganggaran	APBD
	Pengawasan	Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah
Organisasi Massa (Ormas): • IDB Sanimas	Mendukung salah satu capaian capaian SDGs	Mendukung pendanaan dalam rangka menunjang salah satu target capaian SDGs
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):	Mendukung program sanimas dan SLBM dan rangka penggunaan dana Hibah dan Dana DAK	Sebagai perencana, pelaksana monev dan pemeliharaan pada kegiatan Sanimas dan SLBM
Tokoh Masyarakat	Mendukung Program Penyehatan Lingkungan pada tingkat desa	Menfasilitasi pembentukan kelompok kerja masyarakat dalam hal kegiatan berbasis sanitasi permukiman
	Mendukung program pemerintah daerah dalam hal bidang sanitasi	Mendukung penyediaan tenaga kerja dalam hal kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh Tahun 2024

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesedian Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD Kota Banda Aceh	Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Dewan Perwakilan Rakyat	Sedang	Tinggi	Ya
Pengusaha /Swasta: - Beuna Jasa - Karin Pratama - Jasa Dua Saudara,	Penyedia layanan teknis penyedotan lumpur tinja	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Sedang	Tinggi	Ya
Organisasi Massa (Ormas): - Unicef	Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi pemerintah dan masyarakat berkaitan ALD	MoU kegiatan	Sedang	Sedang	Ya
Yayasan (BKM /KSM/LSM/PKK/ Koperasi dll): - Aceh Hijau - KPP	Pemanfaat dan pemelihara dari sarana IPAL skala permukiman yang telah di bangun	MoU kegiatan	Sedang	Sedang	Ya

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh Tahun 2024

d) Regulasi

Tabel 2.13. Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik

No	Uraian	Ada	Tidak Ada
1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.		
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Qanun Kota Banda Aceh Nomor: 05 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	
a	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD : SPALD-S dan SPALD-T	Ada	
b	Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi	Ada	
c	Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan	Ada	
d	Substansi pembinaan dan pengawasan	Ada	
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Ada	
6	Sebutkan semua turunan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada	Peraturan Walikota tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy sebagai Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Banda Aceh	
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum	Ada Qanun Banda Aceh No 1 Tahun 2024	

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

2. Komunikasi dan Media

Tabel di bawah ini berisi penjelasan mengenai kegiatan komunikasi terkait promosi hygiene dan sanitasi, peta media komunikasi dan kerjasama terkait sanitasi.

Tabel 2.14. Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (Air Limbah)

No.	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Penyedotan berkala tangki septik individual	2020 - 2023	DLHK3	Membuat tangki septik bersih dan aman	Masyarakat umum	Lingkungan bebas pencemaran air limbah	Ada biaya untuk penyedotan tangki septik
2	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	2020-2024	Dinas Kesehatan	Mengubah perilaku masyarakat	Masyarakat umum, tempat umum, rumah sakit/ klinik	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
3	Membangun tangki septik individual	2020-2024	Dinas PUPR	Membuat tangki septik bersih dan aman	Masyarakat umum	Lingkungan bebas pencemaran air limbah	Tangki septik kedap dan ada penyedotan

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

Tabel 2.15. Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Air Limbah

No.	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
1	TV Lokal, Radio FM Lokal, Koran Lokal, Media Sosial	Umum Peran serta masyarakat ikut menjaga	APBK	Peran serta masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan	Jamban sehat dan aman	Efektif
2	Papan Pengumuman, Poster, Banner, Spanduk	Umum	APBK	Perilaku ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah rumah tangga	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Efektif

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

2.2.2. Pengelolaan Sampah

(1) Sistem dan Infrastruktur

Tabel 2.16. Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	16,2%
2	Penanganan Sampah	82,3%
3	Sampah Tidak Terkelola	1,5%
Total		100%

Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh Tahun 2022

Tabel 2.17. Timbulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	188,43
	Perkotaan	ton/hari	188,43
	Perdesaan	ton/hari	0
2	Data Komposisi sampah (apabila ada)	% organik	53
		% anorganik	47

Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh Tahun 2024

Dari tabel 2.17. diatas dijelaskan bahwa timbulan sampah Kota Banda Aceh Tahun 2023 sebesar 188,43 ton/hari atau 68.774, 97 ton/tahun yang berasal dari seluruh Wilayah Perkotaan. Komposisi sampah dari tibulan sampah rumah tangga tersebut 53% merupakan sampah organik dan 47% merupakan sampah anorganik.

Tabel 2.18. Pengumpulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	unit	0
	Gerobak Motor	unit	4
	Pick Up	unit	0
	Becak	unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m3	0
	Gerobak Motor	m3	6
	Pick Up	m3	0
	Becak	m3	0
3	Ritase	Rit/hari	2

Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh Tahun 2024

Infrastruktur persampahan dalam melakukan pengumpulan terdiri dari 4 unit gerobak motor dengan kapasitas angkut total dari unit yang beroperasi adalah 6 m3. Jumlah ini tidak mencukupi untuk melayani keseluruhan gampong yang ada di Kota Banda Aceh sehingga banyak gampong yang tidak terlayani dalam pengumpulan sampah. Peningkatan infrastruktur pengumpulan sampah ini sangat di butuhkan agar sampah-sampah yang berada di gampong-gampong yang belum terlayani pengumpulan sampah dapat dilakukan pengumpulan sampah secara terjadwal.

Gambar 2.9. Sarana Pengumpulan yang dimiliki



Foto 1 : Motor Roda Tiga

Foto diambil : 16/2/2024



Foto 2 : Pick Up

Foto diambil : 16/2/2024

Tabel 2.19. Penampungan Sementara dan Pengangkutan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	unit	1
	TPS	unit	236
	Container	unit	47
	Tong Sampah Pejalan Kaki	unit	222
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m3	0,66
	TPS	m3	0,236
	Kontainer	m3	4
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m3	0,12
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truk	unit	3
	Arm roll truck	unit	5
	Dump Truk	unit	41
	Pick Up	unit	25
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truk	m3	18
	Arm roll truck	m3	30
	Dump Truk	m3	246
	Pick Up	m3	100
5	Ritasi Pengangkutan	rit/hari	4

Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh Tahun 2024

Dari tabel 2.19.diatas dapat dilihat bahwa sarana penampungan sementara yang ada di Kota Banda Aceh terdiri dari 1 unit Transfer Depo dengan kapasitas tampung 0,66 m3, TPS 236 unit dengan kapasitas masing-masing TPS 0,236 m3, Kontainer 47 unit dengan kapasitas 4 m3, dan Tong Sampah Pejalan Kaki 222 unit dengan kapasitas 0,12 m3. Alat angkut berupa Compactor Truk 3 unit dengan kapasitas angkut 18 m3, Arm roll truck 5 unit dengan kapasitas operasional total dari unit yang beroperasi 30 m3, Dump Truck

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

41 unit dengan kapasitas operasional total dari unit yang beroperasi 246 m³ dan Pick Up 25 Unit dengan kapasitas operasional total dari unit yang beroperasi 100 m³. Alat-alat angkut yang ada ini beroperasi 4 rit/hari.

Gambar 2.10. Sarana Pengangkutan yang dimiliki



Foto 1 : Amrol Truck
Foto diambil : 15/2/2024



Foto 2 : Dump Truck
Foto diambil : 16/2/2024



Foto 3 : Pick Up
Foto diambil : 16/2/2024



Foto 4 : Compactor Truck
Foto diambil : 15/2/2024



Foto 5 : Container
Foto diambil : 15/2/2024



Foto 6 : Transfer Depo
Foto diambil : 15/2/2024



Foto 7 : TPS
Foto diambil : 15/2/2024



Foto : Tong Sampah
Foto diambil : 15/2/2024

Tabel 2.20. Pengolahan

Persentase Luas instalasi terhadap luas lahan total (%)	Wilayah Cakupan Layanan	Kondisi Pengelolaan	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika ada)	Kegiatan Pengolahan (Pengomposan/ dll)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos/terjual (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
0	0	Tidak Optimal/Tidak Beroperasi	0	0	Pengolahan menjadi sumber energi	0	0	0	Seksi	Belum Diproses
0	0	Tidak Optimal/Tidak Beroperasi	0	0	Pengolahan menjadi sumber energi	0	0	0	Seksi	Belum Diproses

Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.20. diatas dapat dijelaskan bahwa jenis pengolahan sampah di Kota Banda Aceh belum dilakukan hal ini disebabkan sumber daya manusia yang belum ada, lahan yang belum tersedia dan sumber anggaran yang belum di rencanakan.

Tabel 2.21. Pemrosesan Akhir

No	Deskripsi	Satuan	TPA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nama dan Lokasi TPA		Desa Gampong Jawa Kec. Kuta Raja
	Wilayah Pelayanan		Kec. Kuta Raja, Baiturrahman, Kuta Alam, Syiah Kuala, Ulee Kareng, Lueng Bata, Banda Raya, Jaya Baru, Meuraxa
2	Tahun pembangunan		2009
	Tahun Optimalisasi		0
	Usia Pakai TPA (tahun)		11
3	Status aset (pilih salah satu)		Sudah
4	Luas lahan efektif landfill tersedia	Ha	5,24
5	Luas lahan efektif landfill terpakai	Ha	4,74
6	Sistem TPA yang digunakan	pilih	Controlled Landfill
7	Kondisi TPA	pilih	Beroperasi
8	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	Bulldozer: 1, Excavator: 2, Backhoe: 1
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	1
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah	Aspal
11	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA Kota Banda Aceh	Ton/hari	30,74
12	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya:)	Ton/hari	1,82
13	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	0
14	Listrik	Gwh/hari	0
15	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secara rutin (3-6 bulan sekali)	0	Dilakukan
16	Jarak terdekat dengan area permukiman	km	1

Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh Tahun 2024

Tabel 2.21.diatas menjelaskan bahwa pemrosesan akhir hanya di lakukan di TPA Gampong Jawa yang berada di Kecamatan Kuta Raja. TPA Gampong Jawa di bangun tahun 2009 dengan usia pakai 11 tahun. System TPA yang digunakan adalah Controlled Landfill, dengan jumlah sampah yang ditimbun sebesar 30,74 ton/hari dengan jumlah RT terlayani sebanyak 10.585 RT pada tahun 2023.

Gambar 2.11. Sarana Pengolahan dan Pemrosesan Akhir yang dimiliki



Foto 1 : Landfill TPA Gampong Jawa Foto diambil : 15/2/2024



Foto 2 : Kolam Lindi TPA Gampong Jawa Foto diambil : 15/2/2024



Foto 3 : Timbangan TPA Gampong Jawa Foto diambil : 15/2/2024



Foto 4 : Sumur Pantau TPA Gampong Jawa Foto diambil : 15/2/2024



Foto 5 : Excavator
Jumlah 5 unit
Kondisi : 3 RB, 2 RR (Befungsi)
Foto diambil : 15/2/2024



Foto 6 : Bulldozer
Jumlah 2 unit
Kondisi : 1 RB, 1 Baik (Befungsi)
Foto diambil : 15/2/2024



Foto 7 : Backhoe Loader
Jumlah 1 unit
Kondisi : Rusak Ringan (Berfungsi)
Foto diambil : 15/2/2024



Foto 8 : Loader
Jumlah 1 unit
Kondisi : Rusak Berat(Tdk. Berfungsi)
Foto diambil : 15/2/2024

Berdasarkan tabel 2.22. Kota Banda Aceh telah memiliki TPS-3R sebanyak 3 unit yang dibangun pada tahun 2009 yang tersebar di 3 gampong yaitu gampong Ilie, Surien dan Lambung, Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda) sebanyak 8 unit yang tersebar di 6 gampong yaitu Gampong Jawa 2 unit, Gampong Mulia 2 unit dan Gampong Keudah, Lantemen Timur, Lam Ara, Batoh masing-masing 1 unit. Selanjutnya Bank Sampah 19 unit yang tersebar di beberapa gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh. Jumlah sampah yang tereduksi di TPS3R sebesar 0,093% atau 63,89 ton/tahun, di Bank Sampah 0,14% atau 93 ton/tahun dan di Sektor Informal sebesar 15,98% atau 10.989 ton/tahun.

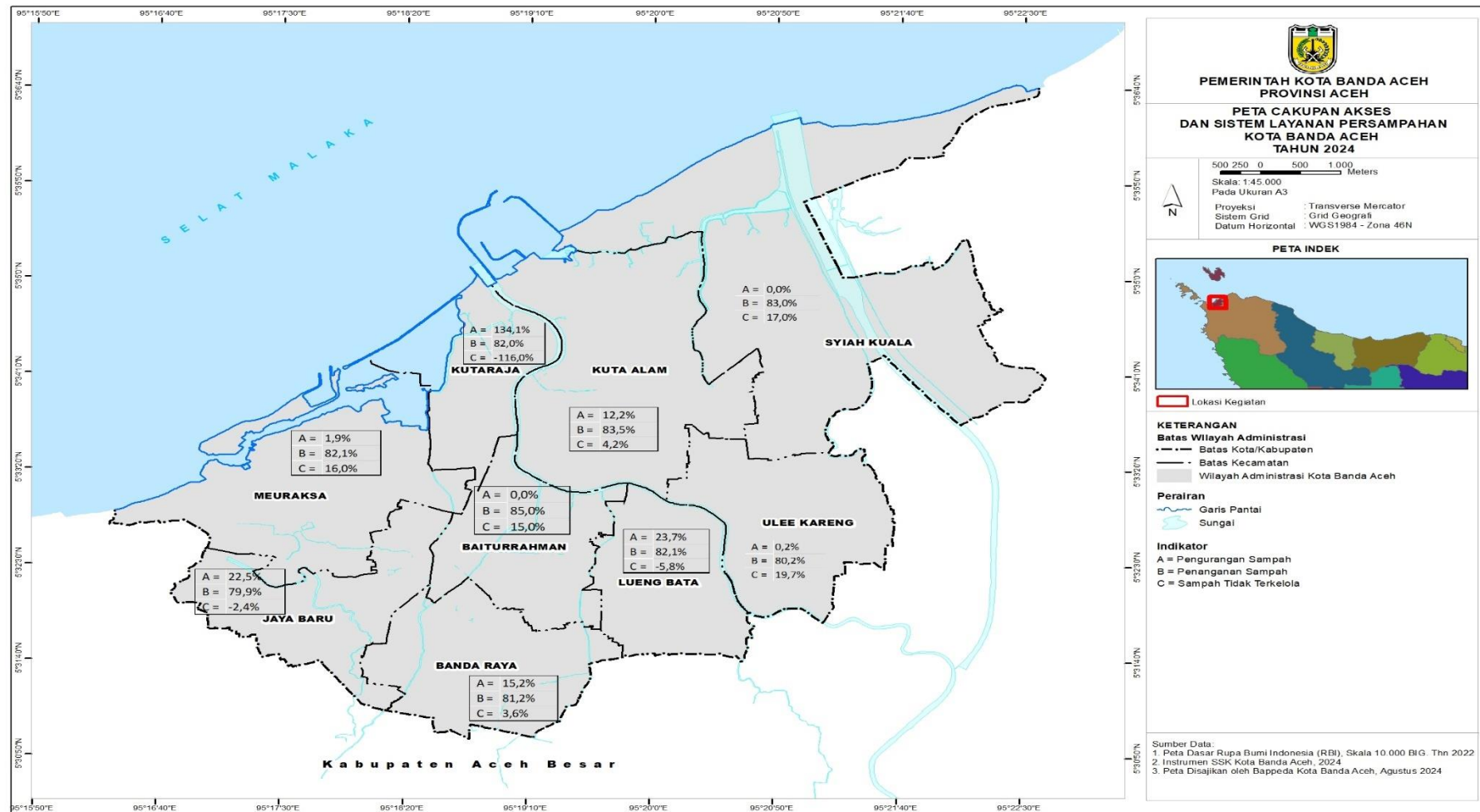
Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

Tabel 2.22. Pengurangan Sampah

No	Jenis Infrastruktur	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos/terjual (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Estimasi jumlah RT terlayani dari jumlah sampah masuk (RT)	Efisiensi Keberfungsian	Kondisi Pengelolaan	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
1	TPS 3R	Desa Iie; (-5.5459500, 95.3435400)	2009	0	Pengomposan	0,0522	0,0501	0,00210	18	4%	Optimal	Seksi	Sudah
2	TPS 3R	Desa Surien; (-5.5403100, 95.2975500)	2016	0	Pengomposan	0,5740	0,2148	0,35920	74	167%	Kurang Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
3	TPS 3R	Desa Lambung; (-5.5544500, 95.2928100)	2015	0	Daur Ulang	0	0	0	0		Tidak Optimal/Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
4	Sektor informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Desa Mulia; (-5.5702887, 95.3286602)	2009	0	Daur Ulang	0,8163	0,8123	0,0040	280	0%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
5	Sektor informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Desa Mulia; (-5.5619800, 95.3215800)	2009	0	Daur Ulang	1,0016	0,9982	0,0034	344	0%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
6	Sektor informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Desa Keudah; (-5.5606700, 95.3163800)	2009	0	Daur Ulang	0,9322	0,9304	0,0018	321	0%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
7	Sektor informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Desa Gampong Jawa; (-5.5714383, 95.3211164)	2009	0	Daur Ulang	3,5215	3,5094	0,0121	1209	0%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
8	Sektor informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Desa Lamtemen Timur; (-5.5361689, 95.3045604)	2009	0	Daur Ulang	2,1144	2,1070	0,0074	726	0%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
9	Sektor informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Desa Lam Ara; (-5.3122900, 95.1835600)	2009	0	Daur Ulang	1,3946	1,3909	0,0037	479	0%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
10	Sektor informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Desa Baloh; (-5.5332990, 95.3279400)	2009	0	Daur Ulang	2,1076	2,1019	0,0056	724	0%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
11	Sektor informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	Desa Gampong Jawa; (-5.5714383, 95.3211164)	2009	0	Daur Ulang	2,4639	2,4519	0,0120	845	0%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
12	Bank Sampah	Desa Gampong Jawa; (-5.57788100, 95.314420)	2009	0	Daur Ulang	0,90382	0,90372	0,00010	312	0%	Optimal	Swasta	Dalam Proses
13	Bank Sampah	Desa Kopelma Darussalam 1; (-5.5676900, 95.3737300)	2019	0	Pengomposan dan Daur Ulang	0,8983	0,8873118	0,01099	306	1%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
14	Bank Sampah	Desa Surien; (-5.5403100, 95.2975500)	2019	0	Daur Ulang	0,0478	0,0342657	0,01353	12	39%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
15	Bank Sampah	Desa Alue Deah Teungoh; (-5.5635800, 95.3033500)	2016	0	Daur Ulang dan Pengomposan	0,0163	0,0157	0,00065	6	4%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
16	Bank Sampah	Desa Deah Glumpang ; (-5.5590300, 95.2899600)	2017	0	Daur Ulang	0,0030	0,0029	0,00015	1	5%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
17	Bank Sampah	Desa Kopelma Darussalam; (-5.5692120, 95.3741690)	2018	0	Daur Ulang	0,0011	0,00100	0,00010	1	10%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
18	Bank Sampah	Desa Seutul; (-5.54210005, 95.3137700)	2018	0	Daur Ulang	0,0011	0,0009	0,00023	1	25%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
19	Bank Sampah	Desa Lamjamee; (-5.5395100, 95.2865800)	2019	0	Daur Ulang	0,0008	0,00050	0,00027	1	53%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
20	Bank Sampah	Desa Peurada; (-5.5535400, 95.2866810)	2018	0	Daur Ulang	0,0010	0,0008	0,00019	1	25%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
21	Bank Sampah	Desa Pie; (-5.5535400, 95.2866810)	2019	0	Daur Ulang	0,0006	0,00041	0,00021	1	50%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
22	Bank Sampah	Desa Lambaro Skep; (-5.5856544, 95.3312451)	2020	0	Daur Ulang	0,0007	0,00048	0,00025	1	53%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
23	Bank Sampah	Desa Kuta Alam; (-5.5856544, 95.3312451)	2022	0	Daur Ulang	0,0011	0,00098	0,00016	1	17%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
24	Bank Sampah	Desa Neusu Aceh; (-5.5385000, 95.3177300)	2020	0	Daur Ulang	0,0006	0,00031	0,00026	1	85%	Kurang Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
25	Bank Sampah	Desa Blang; (-5.5481700, 95.2887200)	2019	0	Daur Ulang	0,0006	0,00035	0,00022	1	63%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
26	Bank Sampah	Desa Lamtemen Barat ; (-5.5309400, 95.2933900)	2021	0	Daur Ulang	0,0006	0,00041	0,00023	1	57%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
27	Bank Sampah	Desa Iie; (-5.5509500, 95.3495200)	2020	0	Daur Ulang	0,0005	0,00020	0,00026	1	132%	Kurang Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
28	Bank Sampah	Desa Peunyerat; (-5.5310250, 95.3255310)	2019	0	Daur Ulang	0,0005	0,00025	0,00028	1	109%	Kurang Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
29	Bank Sampah	Desa Gampong Jawa; (-5.577200, 95.315140)	2018	0	Daur Ulang	0,0491	0,0467	0,00247	17	5%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
30	Bank Sampah	Desa Kota Baru; (-5.5699950, 95.3422710)	2015	0	Pengomposan	0,0010	0,00074	0,00026	1	35%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2024

Gambar 2.12. Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Sampah Perkotaan



Sumber : Bappeda Kota Banda Aceh/Instrumen SSK Tahun 2024

Tabel 2.23.

Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan Berdasarkan Target RPJMN 2020-2024

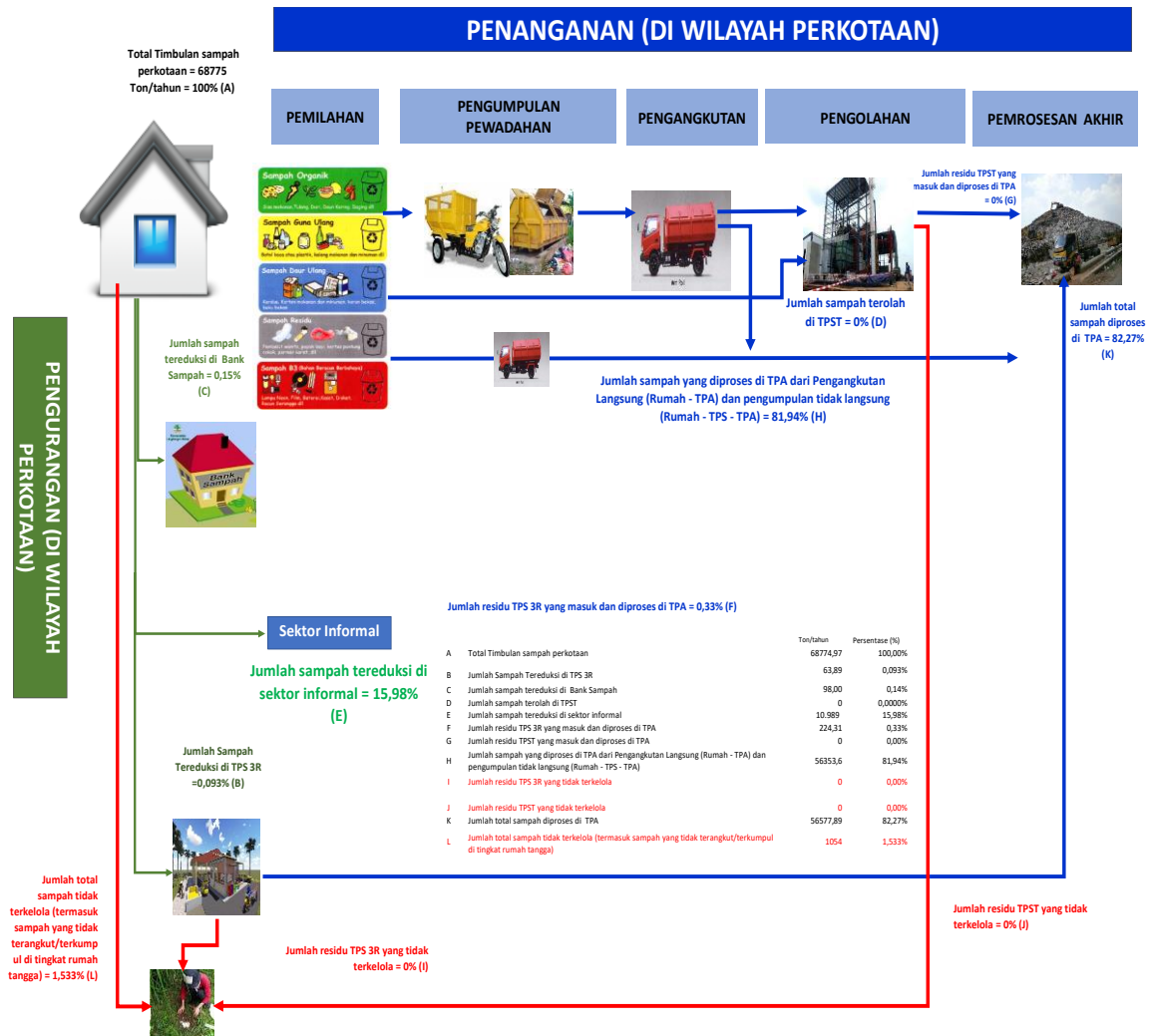
No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target - 2029 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun:2023	GAP (%) Terhadap Target 2029	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Aceh	Kota BANDA ACEH	Kota BANDA ACEH			
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	79,0%	62,0%	68,0%	82,3%	-20,3%	-14,3%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	21,0%	38,0%	32,0%	16,2%	21,8%	15,8%

Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian Penanganan Sampah Perkotaan Kota Banda Aceh Tahun 2023 sebesar 82,3% dan Pengurangan Sampah Perkotaan sebesar 16,2%. Capaian tersebut belum dapat memenuhi target jangka panjang Penanganan Sampah Perkotaan sebesar 62% dan Pengurangan Sampah Perkotaan Kota Banda Aceh sebesar 38%. Antara capaian Tahun 2023 dengan terget capaian yang ditetapkan Tahun 2029 terdapat Gap sebesar -20,3% untuk Penangan dan 21,8% untuk Pengurangan Sampah Perkotaan.

Target jangka pendek Penanganan Sampah Perkotaan Kota Banda Aceh sebesar 68% dan Pengurangan Sampah Perkotaan sebesar 32% sehingga terdapat Gap terhadap target jangka pendek untuk Penangan Sampah Perkotaan sebesar -14,3% dan 15,8% untuk Pengurangan. Kondisi capaian Penanganan dan Pengurangan Sampah Perkotaan Kota Banda Aceh Tahun 2023 belum mendukung capaian target 5 Tahun Nasional.

Gambar 2.12. Analisis Rantai Layanan Sanitasi



Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 2.12. Rantai Layanan Sampah diatas dapat di jelaskan bahwa timbulan sampah Kota Banda Aceh 68.775 ton/tahun. Dikumpulkan di tong sampah, container dan becak motor diangkut dengan menggunakan dump truck dan arm roll truck dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA sebesar 81,94% atau 56.353,3 ton/tahun. Tereduksi di Bank sampah sebesar 0,15%, tereduksi disektor Informal sebesar 15,98% dan tereduksi di TPS3R sebesar 0,033%. Residu TPS3R yang masuk dan di proses di TPA sebesar 0,33%. Sedangkan total sampah tidak terkelola (termasuk sampah yang tidak terangkut/terkumpul di Tingkat rumah tangga) sebesar 1,53% atau 1.054 ton/tahun.

(2) **Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan.**

Kegiatan pengelolaan persampahan di Kota Banda Aceh dilaksanakan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Kota Banda Aceh.

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Tabel 2.24.
Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah

No	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
1	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota	Tugas
		Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota sebagai mana tertuang dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016.
		Fungsi
		Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Lingkungan Hidup; d. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh Tahun 2024

Tabel 2.25. Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
• Menyusun target pengelolaan sampah skala kabupaten/kota,	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada DLHK3	-	-
• Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada DLHK3	-	-
• Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada DLHK3	-	-
PENGADAAN SARANA			
• Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah	Bidang Kebersihan pada DLHK3	-	-
• Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	Bidang Kebersihan pada DLHK3	-	-
• Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Bidang Kebersihan pada DLHK3	-	-
• Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Bidang Kebersihan pada DLHK3	-	-
• Membangun sarana TPA	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada DLHK3	-	-
• Menyediakan sarana pengolahan sampah (komposting, pembangkitan listrik dll)	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada DLHK3	-	-
PENGLOLAAN			
• Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	Bidang Kebersihan pada DLHK3	-	-
• Mengelola sampah di TPS	Bidang Kebersihan pada DLHK3	-	-
• Mengangkut sampah dari TPS ke TPA	Bidang Kebersihan pada DLHK3	-	-
• Mengelola TPA	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada DLHK3	-	-
• Melakukan pemilahan sampah	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada DLHK3	-	-
• Melakukan penarikan retribusi sampah	Bidang Kebersihan pada	-	-

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
	DLHK3		
• Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	Bidang Tata Lingkungan	-	-
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
• Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Bidang Kebersihan pada DLHK3	-	-
• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada DLHK3	-	-
• Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendampingan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sampah	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada DLHK3	-	-
• Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada DLHK3	-	-
MONITORING DAN EVALUASI			
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada DLHK3	-	-
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan	Bidang Kebersihan pada DLHK3	-	-
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan Persampahan	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada DLHK3	-	-

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.25 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan diatas dapat dijelaskan bahwa tugas dan fungsi pengelolaan persampahan di Pemerintahan Daerah Kota Banda Aceh baik Perencanaan, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Pengaturan dan Pembinaan serta Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Bidang/Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3).

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

b. Kelembagaan Masyarakat

Tabel 2.26.
Format Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2023

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pendanaan	Status/Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persampahan									
1	TPS 3R	Guna Bersama 2016	KSM SK Kepala Desa No. 5 Tahun 2018	5 orang	Pengangkutan Pemilahan Daur Ulang Sampah Organik (Kompos)	Desa Surien Kec. Meuraxa	Dana Desa dan iuran retribusi Pengangkutan serta hasil kompos	Mesin ayakan Mesin Pencacah Motor roda 3 Hibah Kementerian PUPR	aktif
2	TPS 3R	Ile 2009	KSM SK No. 06 Tahun 2019	5 orang	Pengangkutan Pemilahan Daur Ulang Sampah Organik (Kompos)	Desa Ile Kec. Ulee Kareng	APBD Kota	Mesin ayakan Mesin Pencacah Hibah Kementerian PUPR	aktif
3	Bank Sampah	Sadar Mandiri	KSM SK Walikota No. 83 Tahun 2014	6 orang	Tabungan sampah an organik	Kota Banda Aceh dan Aceh Besar	Hasil Penjualan Sampah An Organik	Mesin Pencacah Mesin Press Truck Pengangkut Milik Pribadi	Aktif
4	Bank Sampah	- USK - 2019	- KSM - SK Walikota No 342 Tahun 2019	10 orang	- Pengangkutan - Pemilahan - Daur Ulang Sampah Organik (Kompos) - Tabungan sampah	Desa Kopelma Darussalam dan sekitarnya	Hasil Penjualan Sampah An Organik dan Pupuk Kompos serta Dana USK	- Mesin Pencacah plast - Mesin Pencacah sampah organik - Mesin Pencacah ranting Hibah USK	Aktif
5	Bank Sampah	- Guna Bersama - 2018	- KSM - SK Kepala Desa No. 082 Tahun 2018	4 orang	Tabungan sampah	Desa Surien	Hasil Penjualan sampah	-	Aktif
6	Bank Sampah	- WCP Alue Deah Teungoh - 2016	- KSM - SK Kepala Desa No. 38 Tahun 2020	10 orang	- Tabungan Sampah - Daur Ulang Kreatif - Kegiatan Kebun organik - Kompos	Desa Alue Deah Teungoh	- Dana Desa - Iuran Kelompok, - Hasil penjualan sayuran organik - Hasil Penjualan Sovener daur ulang	- Mesin Jahit Hibah Telkomsel	Aktif
7	Bank Sampah	- WCP Deah Glumpang - 2017	- KSM - SK Kepala Desa No. 14.1 Tahun 2020	5 orang	- Memilah - Tabungan Sampah	Desa Deah Glumpang	- Dana Desa - Iuran Kelompok	-	Aktif
8	Bank Sampah	- WCP Peurada - 2018	- KSM - SK Kepala Desa No. 36.A Tahun 2019	3 orang	- Memilah - Tabungan Sampah	Desa Peurada	- Dana Desa - Iuran Kelompok	-	Aktif
9	Bank Sampah	- WCP Kopelma Darussalam - 2018	- KSM - SK Kepala Desa No.15/SK/Tahun 2019	4 orang	- Memilah - Tabungan Sampah	Desa Kopelma Darussalam	- Dana Desa - Iuran Kelompok	-	Aktif
10	Bank Sampah	- WCP Seutui - 2018	- KSM - SK Kepala Desa No.22 Tahun 2019	3 orang	- Memilah - Tabungan Sampah	Desa Seutui	- Dana Desa - Iuran Kelompok	-	Aktif
11	Bank Sampah	- WCP Lamjamee - 2019	- KSM - SK Kepala Desa No.019 Tahun 2019	4 orang	- Memilah - Tabungan Sampah	Desa Lamjamee	- Dana Desa - Iuran Kelompok	-	Aktif
12	Bank Sampah	- WCP Lambaro Skep - 2020	- KSM - SK Kepala Desa No.21 Tahun 2020	4 orang	- Memilah - Tabungan Sampah	Desa Lambaro Skep	- Dana Desa - Iuran Kelompok	-	Aktif
13	Bank Sampah	- WCP Neusu Aceh - 2020	- KSM - SK Kepala Desa No.16 Tahun 2022	3 orang	- Memilah - Tabungan Sampah	Desa Neusu Aceh	- Dana Desa - Iuran Kelompok	-	Aktif
14	Bank Sampah	- WCP Blang - 2020	- KSM - SK Kepala Desa No.16 Tahun 2022	3 orang	- Memilah - Tabungan Sampah	Desa Blang	- Dana Desa - Iuran Kelompok	-	Aktif
15	Bank Sampah	- WCP Lamtemen Barat - 2021	- KSM - SK Kepala Desa No.18 Tahun 2022	3 orang	- Memilah - Tabungan Sampah	Desa Lamtemen Barat	- Dana Desa - Iuran Kelompok	-	Aktif
16	Bank Sampah	- WCP Pie - 2019	- KSM - SK Kepala Desa No.025 Tahun 2020	3 orang	- Memilah - Tabungan Sampah	Desa Pie	- Dana Desa - Iuran Kelompok	-	Aktif
17	Bank Sampah	- WCP Ile - 2019	- KSM - SK Kepala Desa No.025 Tahun 2020	3 orang	- Memilah - Tabungan Sampah	Desa Ile	- Dana Desa - Iuran Kelompok	-	Aktif
18	Bank Sampah	- WCP Kuta Alam - 2022	- KSM - SK Kepala Desa No.	3 orang	- Memilah - Tabungan Sampah	Desa Kuta Alam	- Dana Desa - Iuran Kelompok	-	Aktif
19	Bank Sampah	- WCP Peunyerat - 2019	- KSM - SK Kepala Desa No.5 A Tahun 2019	3 orang	- Memilah - Tabungan Sampah	Desa Penyerat	- Dana Desa - Iuran Kelompok	-	Aktif
20	Bank Sampah	- Subur Makmur - 2018	- KSM - SK Kepala Dinas No.29 Tahun 2018	5 orang	- Memilah - Tabungan Sampah	Desa Gampong Jawa	- Dana Desa - Iuran Kelompok	-	Aktif
21	Bank Sampah	- Mitra - 2015	- KSM - SK Kepala Desa No.82 Tahun 2014	4 orang	- Memilah - Tabungan Sampah	Desa Kota Baru	- Dana Desa - Iuran Kelompok	-	Aktif

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh Tahun 2024

c. Pemetaan pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah

Tabel 2.27. Pemetaan Kelembagaan Non Pemerintah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumber Daya
Anggota Legislatif	- Legislasi - Penganggaran - Pengawasan	- Tim anggaran terkait Alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung program pengelolaan persampahan
Pengusaha / Swasta:	Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah dalam rangka mendukung pelayanan sampah kepada masyarakat
Organisasi Massa (Ormas):	Mendukung program pengurangan sampah pada sumbernya	- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada tingkatan sekolah dan pemukiman Masyarakat berkaitan pengelolaan sampah - Memberikan insentif kepada Masyarakat melalui pemotongan harga tarif penyedotan tinja
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll): - Kami Kita - Aceh Hijau	Mendukung program pengurangan sampah pada sumbernya	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada tingkatan sekolah dan pemukiman Masyarakat berkaitan pengelolaan sampah
Tokoh Masyarakat - Rama Herawati (Ketua Bank Sampah Unsyiah) - Muhammad Nadir (Ketua Bank Sampah Induk Sadar Mandiri, Gp. Jawa)	Mendukung program pengurangan sampah pada sumbernya	- Melakukan pengolahan sampah secara langsung - Mengedukasi Masyarakat untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesedian Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	- Alokasi usulan terkait pengelolaan sampah dalam APBD - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan sampah	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
Pengusaha / Swasta: - BSI - Ban Aceh - PLN	- Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah dalam rangka pengurangan sampah pada sumber nya - Penataan taman median jalan untuk menciptakan keindahan	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Sedang	Sedang	ya
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll): Yayasan Kami Kita	Edukasi secara langsung ke masyarakat dan siswa/l terkait pengelolaan sampah serta melakukan penolahan sampah	UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah	Sedang	Sedang	ya
Tokoh Masyarakat - Ketua Bank sampah induk sadar mandiri - Ketua Bank Sampah Unsyiah	Edukasi secara langsung ke masyarakat dan siswa/l terkait pengelolaan sampah serta melakukan penolahan sampah	UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah	Sedang	Sedang	ya

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

d. Regulasi

Tabel 2.28. Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Persampahan

Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan			
No			
1	Perda Pengelolaan Sampah	Ada	Tidak Ada
		Ada	
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, sebutkan.		
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah	
4	Apakah Substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut :	Ada	Tidak Ada
		Ada	
a	Substansi pengaturan : tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.	Ada	
b	Substansi pengaturan : tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah		Tidak Ada
c	Substansi pengaturan : Pengurangan sampah (<i>pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah</i>)	Ada	
d	Substansi pengaturan : Penanganan sampah (<i>pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah</i>)	Ada	
e	Substansi pengaturan : pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah		Tidak Ada
f	Substansi pengaturan : Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negative kegiatan TPA	Ada	
g	Substansi pengaturan : Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	Ada	
h	Substansi pengaturan : larangan, sanksi pidana kurungan/ denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampah	Ada	
i	Substansi pengaturan : Pengawasan pengelolaan sampah	Ada	
j	Substansi pengaturan : Penerapan sanksi administratif	Ada	

Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan			
No			
5	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/ Pedoman sudah ada?	Sudah ada	Belum ada
		Sudah Ada	
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada.	1. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Sistem Waste Collecting Point 2. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall. 3. Qanun Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota	

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh Tahun 2024

(3) Komunikasi dan Media

Tabel 2.29.
Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (Persampahan)

No.	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
Sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat	2020 - 2023	DLHK3	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengelola sampah	Masyarakat umum	Kelola sampah menjadi nilai tambah serta menciptakan lingkungan bersih dan sehat	Maksud dan tujuan pengelolaan sampah	Sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat
Penyuluhan kebersihan lingkungan dan sosialisasi pengelolaan sampah sekolah	2020 - 2023	DLHK3	Mengubah perilaku anak sekolah	Sekolah TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA	Anak Sekolah bisa jadi Duta Sanitasi	Meningkatkan kesadaran sekolah untuk hidup bersih dan sehat	Penyuluhan kebersihan lingkungan dan sosialisasi pengelolaan sampah sekolah
Penyuluhan melalui mobil penyuluhan dan secara langsung terkait menjaga kebersihan, menyediakan wadah sampah, mengemas sampah dengan baik dan tidak membakar sampah	2020 - 2023	DLHK3	Mengubah perilaku pelaku usaha, pedagang kaki lima, Kawasan wisata, pasar	masyarakat, pelaku usaha, pedagang kaki lima, Kawasan wisata, pasar	Lingkungan bersih dan sehat	Meningkatkan kesadaran dan lingkungan bersih dan sehat	Penyuluhan melalui mobil penyuluhan dan secara langsung terkait menjaga kebersihan, menyediakan wadah sampah, mengemas sampah dengan baik dan tidak membakar sampah

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh Tahun 2024

Tabel 2.30.
Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Persampahan

No.	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
1	TV Lokal, Radio FM Lokal, Koran Lokal, Media Sosial DLHK3 dan Pemerintah Kota	Umum	APBK	Peran serta masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dan membayar retribusi sampah tepat pada waktunya	Bersahabat dengan sampah	Efektif
2	Papan Pengumuman, Poster, Banner, Spanduk, leaflet	Umum	APBK	Pengelolaan sampah serta larangan membuang sampah sembarangan	Tidak membuang sampah sembarangan	efektif
3	Mobil Penyuluhan	Umum	APBK	Mengajak masyarakat, pelaku usaha, pedagang kaki lima, Kawasan wisata, pasar untuk menjaga kebersihan, menyediakan wadah sampah, mengemas sampah dengan baik dan tidak membakar sampah	Penanganan sampah dengan baik	efektif

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh Tahun 2024

2.2.3. Drainase Lingkungan

(1) Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan

Penanganan permasalahan drainase menjadi penting untuk menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan sanitasi, dikarenakan kondisi geografis wilayah Kota Banda Aceh yang rawan banjir dan genangan pada musim penghujan. Lokasi genangan di Kota Banda Aceh terdapat di 5 gampong dengan luas genangan yang bervariasi mulai dari 0,50 Ha sampai dengan 2,40 Ha. Lokasi dengan luas genangan paling besar adalah Lamdingin. Ketinggian genangan yang terjadi di Kota Banda Aceh rata-rata sekitar 30 cm dan lama genangan kurang dari 2 jam. Genangan ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas drainase untuk mengalirkan air hujan. Hal ini biasanya terjadi sekitar 1 sampai 2 kali dalam setahun. Adapun data mengenai lokasi genangan di Kota Banda Aceh seperti terlihat pada tabel 2.31. dibawah ini :

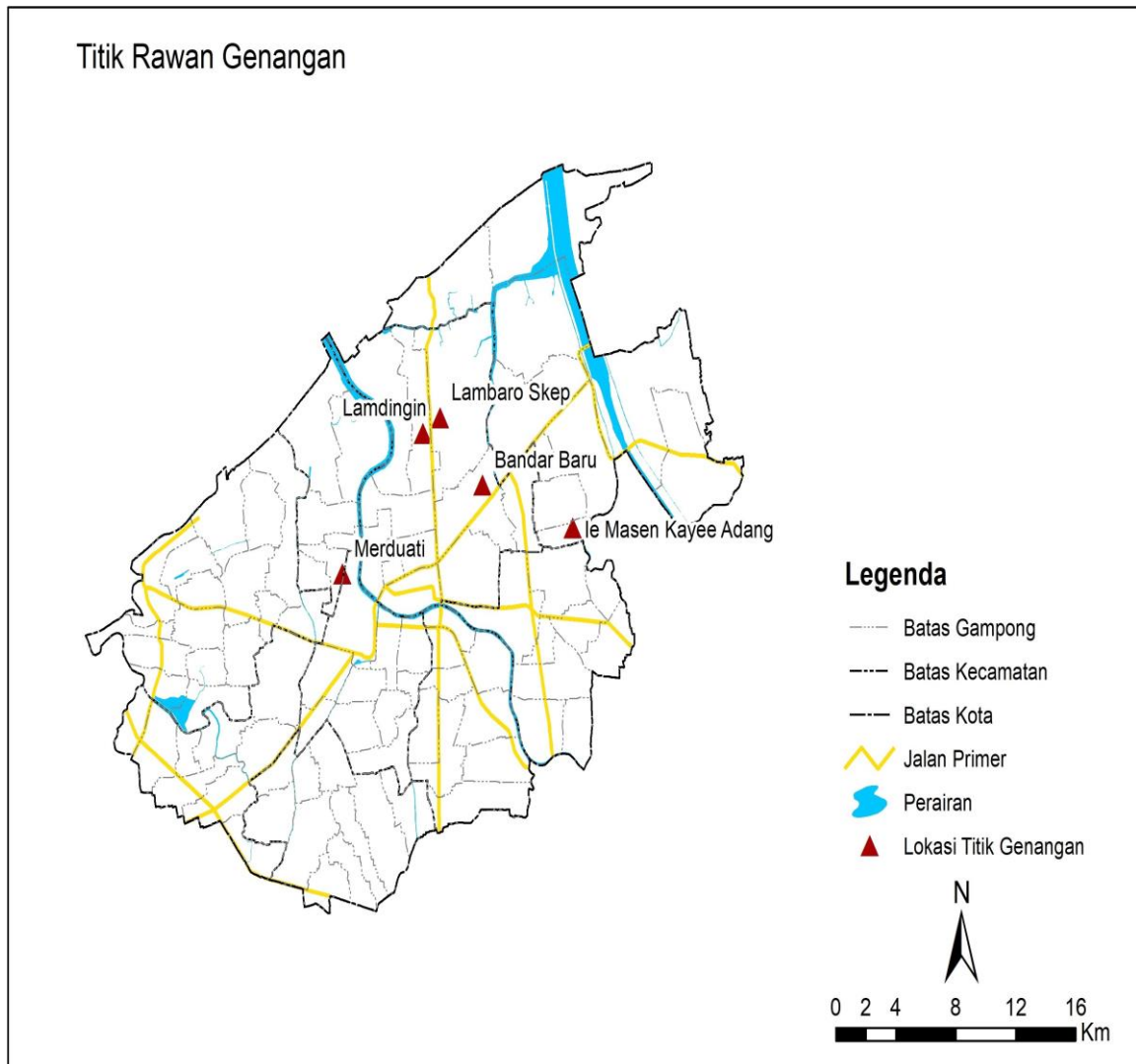
Tabel 2.31
Lokasi Genangan Kota Banda Aceh

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				
		Luas (Ha)	Ketinggian (m)	Lama (jam/hari)	Frekwensi (kali/tahun)	Penyebab
1	2	3	4	5	6	7
1	Merduati	0,50	0,30	≥ 2	1 - 2	Kapasitas drainase kurang memadai untuk mengalirkan air hujan dalam waktu singkat
2	LambaroSkep	1,50	0,30	≥ 2	1 - 2	
3	Lamdingin	2,40	0,30	≥ 2	1 - 2	
4	Bandar Baru	0,50	0,30	≥ 2	1 - 2	
5	Ile Masen	0,50	0,30	≥ 2	1 - 2	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Pendataan Ruang Kota Banda Aceh, 2024

(2) Peta Lokasi Genangan

Gambar 2.13.
Peta Lokasi Genangan



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Pendataan Ruang Kota Banda Aceh, 2024

(3) Sistem dan Infrastruktur

Jaringan drainase Kota Banda Aceh dibagi menjadi 8 zona. Selain drainase, beberapa zona juga didukung dengan infrastuktur lainnya seperti kolam retensi, pompa dan mobile pump. Kolam retensi terdapat di zona I, IV, V, VI, dan VII. Sementara pompa terdapat di zona II, III, IV; V; dan VI, dimana pada zona II dan III masing-masing terdapat 3 pompa. Mobile pump hanya terdapat di zona IV. Untuk desain drainase, di Kota Banda Aceh umumnya memiliki bentuk penampang segiempat dan trapesium dengan dimensi yang berbeda-beda untuk setiap lokasi sebagaimana dapat dilihat di Tabel 2.32 dibawah ini :

Tabel 2.32. Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan di Kota Banda Aceh

No.	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B**	H**	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
1	Saluran Primer zona I (Kec. Meuraxa dan Jaya Baru)	m	Segiempat & Trapesium	0,8 – 2,6	0,7 – 1,8	v		
2	Saluran Primer zona II (Kec. Kutaraja dan sebagian Baiturrahman)	m	Segiempat & Trapesium	0,9 – 2,4	0,6 – 1,2	v		
3	Saluran Primer zona III (Kec. Kuta Alam)	m	Segiempat & Trapesium	0,6 – 5,2	0,6 – 2,5	v		
4	Saluran Primer zona IV (Kec. Baiturrahman dan Banda Raya)	m	Segiempat & Trapesium	1,0 – 3,9	0,7 – 1,9	v		
5	Saluran Primer zona V (Kec. Syiah Kuala, sebagian Kuta Alam, dan sebagian Ulee Kareng)	m	Segiempat & Trapesium	1,1 – 3,5	0,7 – 1,9	v		
6	Saluran Primer zona VI (Kec. Lueng Bata dan sebagian Banda Raya)	m	Segiempat & Trapesium	1,3 – 3,0	0,7 – 2,1	v		
7	Saluran Primer zona VII (Kec. Ulee Kareng dan sebagian Kuta Alam)	m	Segiempat & Trapesium	1,4 – 3,2	0,8 – 1,3	v		
8	Saluran Primer zona VIII (sebagian Kec. Syiah Kuala)	m	Segiempat & Trapesium	9,0 – 0,9	0,6 – 1,6	v		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Pendataan Ruang Kota Banda Aceh, 2024

2.3. Area Berisiko dan Permasalahan Sanitasi

Penetapan area berisiko sanitasi per sektor, dipandang sangat penting oleh Pokja PKP Kota Banda Aceh. Hal ini ditujukan untuk menjadi bahan rujukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah sebagai pengambil kebijakan dalam menentukan arah pembangunan. Dimana pembangunan dalam bidang sanitasi yang akan dilaksanakan oleh OPD, swasta, masyarakat maupun pihak lainnya dimasa yang akan datang, dapat mengacu pada prioritas pembangunan yaitu berdasarkan area berisiko yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan sanitasi akan lebih terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.

Proses penetapan area beresiko ini merupakan proses klasifikasi dan pemetaan wilayah kota berdasarkan tingkat atau derajat resiko sanitasi yang dimiliki kawasan tersebut. Resiko dimaksud mencakup resiko: penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam melakukan penilaian area beresiko sanitasi, Pokja PKP Kota Banda Aceh mengklasifikasikan berdasarkan nilai skoring grade 1- 4, dengan rincian sebagai berikut :

- Skor 4 : Resiko Sangat Tinggi
- Skor 3 : Resiko Tinggi
- Skor 2 : Resiko Rendah
- Skor 1 : Resiko Sangat Rendah

Hasil akhir penilaian area beresiko sanitasi, merupakan kesepakatan Pokja PKP sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan berdasarkan skoring terhadap data sekunder, persepsi OPD terkait sektor sanitasi dan hasil olah data survey EHRA. Area beresiko sanitasi diharapkan dapat menjadi sumber data yang valid dalam pengambilan kebijakan terkait pembangunan sanitasi di Kota Banda Aceh. Dengan adanya data area beresiko sanitasi nantinya dapat menjadi pedoman dalam rangka perencanaan pembangunan bidang sanitasi, sehingga lebih tepat sasaran. Sebagai prioritas permasalahan terkait sanitasi di Kota Banda Aceh, pada area beresiko 4 dan 3 tentulah yang akan menjadi prioritas utama untuk segera ditangani. Hal ini bukan berarti area beresiko 2 dan 1 tidak akan menjadi prioritas, namun untuk langkah awal yang perlu ditangani segera adalah wilayah yang mempunyai tingkat resiko sangat tinggi dan resiko tinggi.

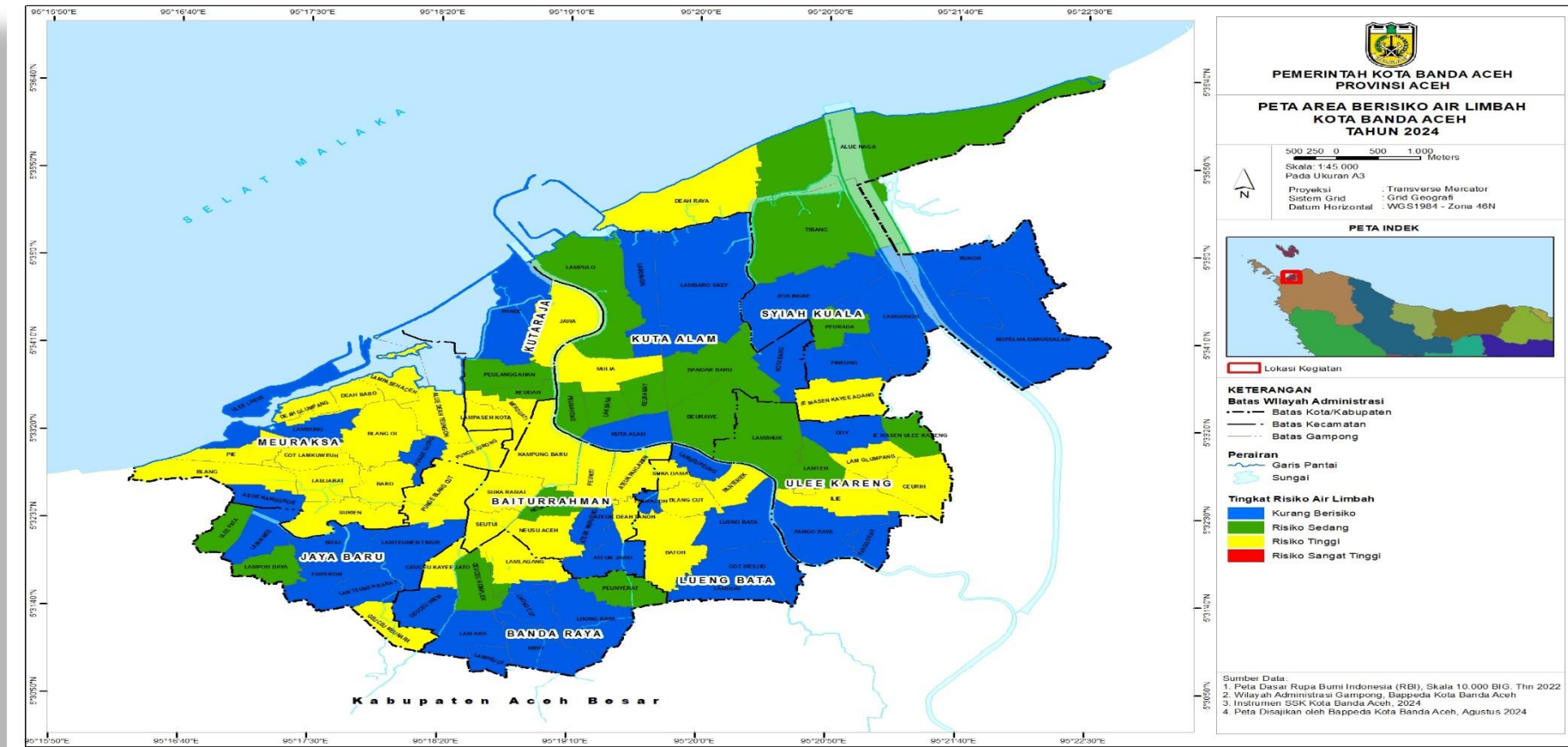
a. Area Beresiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik

Meningkatkan keterlibatan masyarakat menjadi langkah strategis dalam pencapaian pembangunan bidang air limbah, dengan melakukan serangkaian kegiatan pemicuan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat, kesadaran akan pentingnya memiliki tanki septik yang kedap dan melakukan penyedotan tangki septik secara berkala dalam kurun waktu 3 – 5 tahun sekali dan juga kesadaran dalam memelihara sarana dan prasarana sanitasi yang telah ada serta pembentukan kelompok - kelompok masyarakat yang peduli terhadap kesehatan lingkungan, dimana kelompok tersebut nantinya akan menjadi agen perubahan dilingkungannya masing - masing.

Sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga, mulai dari truk tinja sampai dengan sarana instalasi pengolahan lumpur tinja masih perlu untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan. Faktor penganggaran masih dirasakan belum mencukupi dalam mendukung pengembangan pengelolaan air limbah rumah tangga di Kota Banda Aceh.

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

Gambar 2.14
Peta Area Beresiko Air Limbah



Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh Tahun 2024

Tabel 2.33.
Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

No	Area Berisiko *)	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Gampong
1	Resiko 3 (tinggi)	Meuraxa	Surien
2	Resiko 3 (tinggi)	Meuraxa	Gampong Blang
3	Resiko 3 (tinggi)	Meuraxa	Lamjabat
4	Resiko 3 (tinggi)	Meuraxa	Gampong Baro
5	Resiko 3 (tinggi)	Meuraxa	Punge Jurong
6	Resiko 3 (tinggi)	Meuraxa	Lampaseh Aceh
7	Resiko 3 (tinggi)	Meuraxa	Cot Lamkuweueh
8	Resiko 3 (tinggi)	Meuraxa	Gampong Pie
9	Resiko 3 (tinggi)	Meuraxa	Deah Glumpang
10	Resiko 3 (tinggi)	Meuraxa	Blang Oi
11	Resiko 3 (tinggi)	Meuraxa	Alue Deah Teungoh
12	Resiko 3 (tinggi)	Meuraxa	Deah Baro
13	Resiko 3 (tinggi)	Jaya Baru	Geuceu Menara
14	Resiko 3 (tinggi)	Jaya Baru	Punge Balng Cut
15	Resiko 3 (tinggi)	Banda Raya	Lam Lagang
16	Resiko 3 (tinggi)	Banda Raya	Geuceu Kayee Jato
17	Resiko 3 (tinggi)	Baiturrahman	Ateuk Deah Tanoh
18	Resiko 3 (tinggi)	Baiturrahman	Ateuk Pahlawan
19	Resiko 3 (tinggi)	Baiturrahman	Neusu Aceh
20	Resiko 3 (tinggi)	Baiturrahman	Seutui
21	Resiko 3 (tinggi)	Baiturrahman	Sukaramai
22	Resiko 3 (tinggi)	Baiturrahman	Peuniti
23	Resiko 3 (tinggi)	Baiturrahman	Kampung Baru
24	Resiko 3 (tinggi)	Lueng Bata	Batoh
25	Resiko 3 (tinggi)	Lueng Bata	Blang Cut
26	Resiko 3 (tinggi)	Lueng Bata	Sukadamai
27	Resiko 3 (tinggi)	Lueng Bata	Panteriek

28	Resiko 3 (tinggi)	Kuta Alam	Mulia
29	Resiko 3 (tinggi)	Kuta Raja	Lampaseh Kota
30	Resiko 3 (tinggi)	Kuta Raja	Merduati
31	Resiko 3 (tinggi)	Kuta Raja	Gampong Jawa
32	Resiko 3 (tinggi)	Syiah Kuala	Iemasen Kaye Adang
33	Resiko 3 (tinggi)	Syiah Kuala	Deah Raya
34	Resiko 3 (tinggi)	Ulee Kareng	Ilie
35	Resiko 3 (tinggi)	Ulee Kareng	Lamglumpang
36	Resiko 3 (tinggi)	Ulee Kareng	Ceurih

Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh Tahun 2024

Dari penyusunan Rantai Layanan Air Limbah Domestik, dapat ditarik kesimpulan mengenai permasalahan mendasak terkait pengelolaan air limbah sebagai berikut :

Tabel 2.34. Daftar permasalahan terkait pengelolaan air limbah domestik

No	Permasalahan Mendasak
Aspek Teknis : Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan lumpur tinja/pengolahan terpusat, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
a.	Capaian akses air limbah domestik aman 7,04% melalui penggunaan tangki septik individual yang disedot
b.	Capaian akses ALD aman 5,07% melalui penggunaan IPAL
c.	Capaian akses layak individu (tidak termasuk aman) 87,89% atau 67.430 RT
d.	Belum ada pemisahan fungsi antara regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah domestik
e.	Terbatasnya truk tinja yang dimiliki dinas DLHK3 dalam melayani kebutuhan masyarakat
f.	Masih banyaknya tangki septik yang dimiliki oleh masyarakat belum memenuhi SNI
g.	Masih adanya armada milik swasta yang melakukan pembuangan lumpur tinja tanpa pengolahan ke sungai/sawah/kebun
h.	IPAL Permukiman dan Kawasan ada yang tidak berfungsi dengan baik dan optimal

No	Permasalahan Mendesak
i	Layanan penyedotan lumpur tinja belum memenuhi pelayanan dan operasinal IPLT yang ada
j.	Belum dilakukan penyedotan secara berkala terhadap IPAL yang ada
Aspek Non-Teknis :	Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi
a.	Belum adanya Perda atau Qanun yang mengatur pengelolaan air limbah domestik
b.	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik
c.	Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) IPAL belum berfungsi secara aktif
d.	Belum memiliki sumber daya manusia yang khusus dan terampil (tenaga ahli air limbah) dalam menangani sektor air limbah domestik
f.	Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas terhadap pihak swasta terbatas
g.	Koordinasi antar OPD terkait dalam pengelolaan sektor air limbah domestik masih kurang
h.	Tarif retribusi sedot tinja dari pihak swasta belum sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh No. 1/2024 tentang Pajak kota dan Retribusi kota
k	Sumber pendanaan alternatif belum ada
l	Anggaran untuk sektor air limbah domestik belum menjadi prioritas
n	Komitmen stacholder terhadap anggaran sektor air limbah domestik masih rendah
o	Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan berupa swadaya masyarakat dan partisipasi dunia usaha/swasta.

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

b. Area Beresiko dan Permasalahan Persampahan

Limbah padat atau yang sering disebut sampah, menjadi hal yang sangat penting untuk dikelola. Baik dan buruknya suatu kawasan sering dinilai dari pengelolaan sampah diwilayah tersebut, bahkan dalam penilaian adipura menjadi hal yang sangat menentukan.

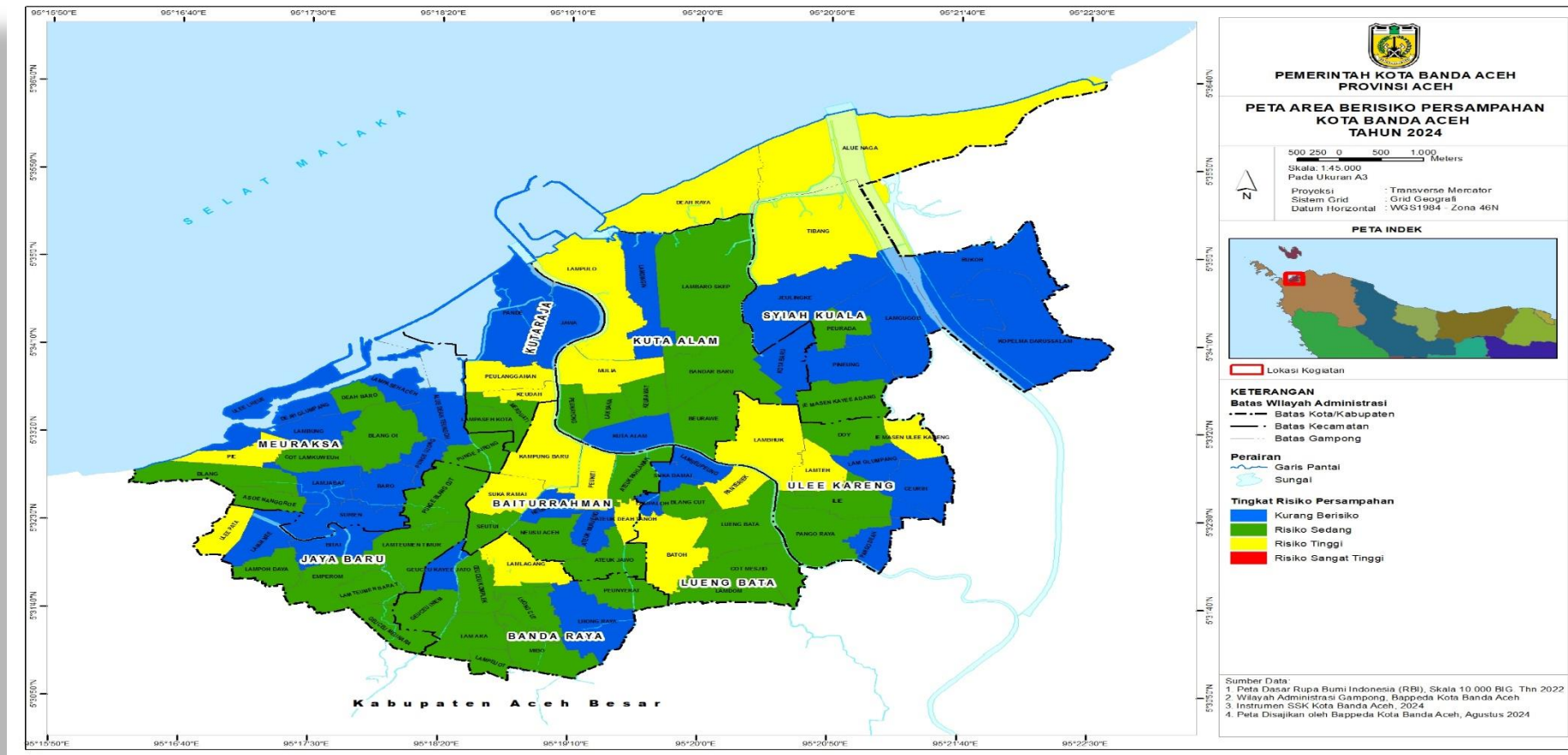
Dalam pengelolaan sampah, masyarakat sangat memegang peran penting karena volume dan kualitas sampah yang terangkut sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Konsep reduce, reuse dan recycle (3R) masih belum difahami oleh sebagian masyarakat sehingga beban tempat pemrosesan akhir sampah menjadi semakin berat karena harus menampung sebagian besar sampah.

Perlu dikembangkan konsep 3R dilingkungan masyarakat sehingga dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah, beban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah menjadi berkurang dan masyarakat mendapatkan keuntungan dalam pengelolaan sampah tersebut.

Faktor pendanaan menjadi salah satu penentu dalam keberhasilan pengelolaan sampah, dimana anggaran untuk Seksi Kebersihan dirasakan masih belum mencukupi untuk mendukung operasional pengelolaan persampahan. Berdasarkan hasil olah data dalam profil sanitasi Kota Banda Aceh oleh Pokja PKP Kota Banda Aceh, peta area beresiko persampahan terlihat seperti berikut ini :

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

Gambar 2.15
Peta Area Beresiko Persampahan



Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh Tahun 2024

Tabel 2.35
Area Berisiko Sanitasi Persampahan

No	Area Berisiko *)	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Gampong
1	Resiko 3 (tinggi)	Meuraxa	Gampong Pie
2	Resiko 3 (tinggi)	Jaya Baru	Ulee Pata
3	Resiko 3 (tinggi)	Banda Raya	Lam Lagang
4	Resiko 3 (tinggi)	Baiturrahman	Ateuk Deah tanoh
5	Resiko 3 (tinggi)	Baiturrahman	Sukaramai
6	Resiko 3 (tinggi)	Baiturrahman	Peuniti
7	Resiko 3 (tinggi)	Baiturrahman	Kampung Baru
8	Resiko 3 (tinggi)	Lueng Bata	Batoh
9	Resiko 3 (tinggi)	Lueng Bata	Panteriek
10	Resiko 3 (tinggi)	Kuta Alam	Mulia
11	Resiko 3 (tinggi)	Kuta Alam	Lampulo
12	Resiko 3 (tinggi)	Kuta Raja	Keudah
13	Resiko 3 (tinggi)	Kuta Raja	Pelanggahan
14	Resiko 3 (tinggi)	Syiah Kuala	Tibang
15	Resiko 3 (tinggi)	Syiah Kuala	Deah Raya
16	Resiko 3 (tinggi)	Syiah Kuala	Alue Naga
17	Resiko 3 (tinggi)	Ulee Kareng	Lamteh
18	Resiko 3 (tinggi)	Ulee Kareng	Iemasen Ulee Kareng
19	Resiko 3 (tinggi)	Ulee Kareng	Lambhuk

Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh Tahun 2024

Dalam pengelolaan persampahan, terdapat beberapa permasalahan mendasak terkait aspek teknis dan aspek non teknis. Untuk aspek teknis, beberapa permasalahan diantaranya terkait UPTD yang khusus menangani persampahan masih belum dibentuk, alokasi APBK masih kurang, penerapan SOP pelayanan persampahan, serta rute pengangkutan. Terkait aspek non teknis, terdapat beberapa permasalahan terkait kesediaan masyarakat dalam membayar retribusi sampah, sosialisasi metode pengolahan sampah mandiri kepada masyarakat, ketersediaan SDM, perilaku masyarakat dalam penanganan sampah yang tidak ramah lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan perlu terus didorong agar masyarakat selalu ikut berperan serta secara aktif dalam rangka pengelolaan persampahan dengan konsep 3R (reduce, reuse dan recycle), sehingga beban tempat pemrosesan akhir sebagai tempat pengolahan akhir sampah bisa berkurang dan biaya operasional dapat menjadi lebih rendah. Berdasarkan pemetaan diagram sistem sanitasi dan penyusunan area beresiko, disepakati permasalahan mendasak dibidang persampahan sebagai mana terlihat pada Tabel 2.36. berikut :

Tabel 2.36 Permasalahan Persampahan

No	Permasalahan Mendasak
Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (User Interface- Pengumpulan Setempat- Penampungan Sementara- Pengangkutan-Pengolahan Akhir Terpusat-Pembuangan Akhir)	
a.	Masih ada sampah yang tidak terkelola sebesar 1,5% atau sebesar 1.054 Ton/Tahun
b.	Pengurangan sampah perkotaan baru 16,2% atau 11.143 Ton/Tahun, ada Gap sebesar 23,8% dari yang ditargetkan 40% pada tahun 2029
c.	Penanganan sampah perkotaan 82,3% atau sebesar 56.578 Ton/Tahun, ad Gap sebesar -22,3% dari yang ditargetkan 60% pada tahun 2029
d.	Belum ada UPTD yang menangani pengelolaan persampahan
e.	DLHK3 belum memiliki mesin pemilah sampah
f.	Keberadaan TPS3R dan Bank Sampah masih kurang
g.	Jumlah depo pemilah sampah masih kurang
h.	Kondisi armada pengangkutan sampah yang dimiliki oleh DLHK3 banyak yang rusak
i.	Belum adanya TPST pada tahap pengolahan

No	Permasalahan Mendesak
j.	Sampah belum diolah menjadi energi (industrialisasi pengolahan sampah)
k.	TPA Kota Banda Aceh sudah over kapasitas
Aspek Non-Teknis : Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang- undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
a.	Kurangnya koordinasi antara pengelola TPA Regional dengan pemerintah kabupaten/kota terkait jadwal buka tutup TPA Regional
b.	Kurangnya kelompok pemilah sampah di gampong
c.	Kurangnya pemahaman masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya
d.	Belum masifnya gerakan hidup minim sampah
e.	Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap jadwal pembuangan sampah
f.	Masih ada perilaku masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat, membakar sampah dan tidak menyediakan wadah sampah rumah tangga
g.	Rendahnya alokasi APBK untuk penyediaan sarana dan prasarana persampahan
h.	Belum optimalnya pengutipan retribusi sampah
i.	Belum maksimalnya pemanfaatan sumber pendanaan alternatif

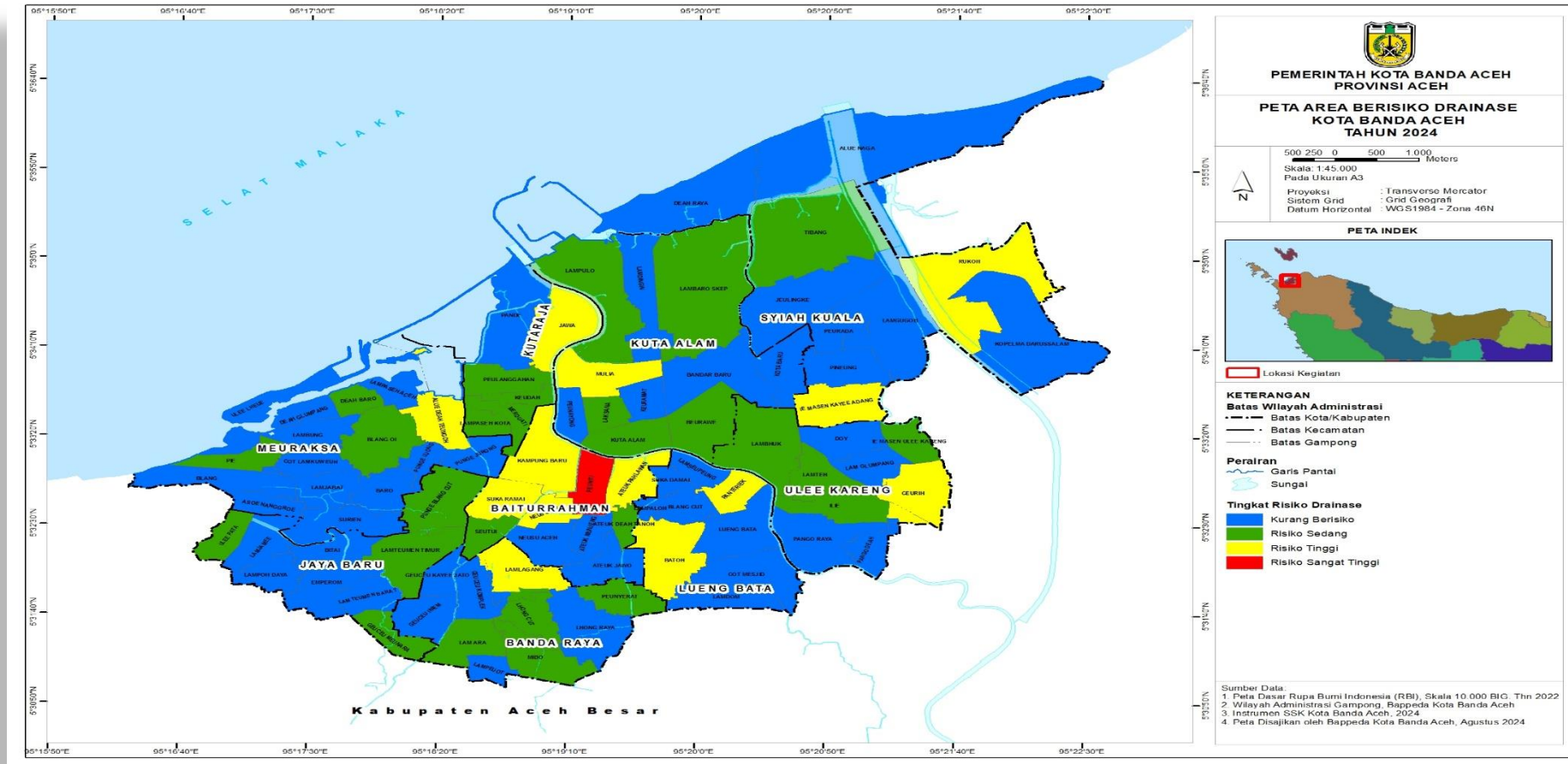
Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

c. Area Beresiko dan Permasalahan Drainase Lingkungan

Masih tercampurnya air hujan dan grey water menjadi permasalahan yang umum terjadi di Kota Banda Aceh. Perlu sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan drainase lingkungan agar tidak terjadi genangan yang sangat mengganggu kesehatan masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana drainase yang rusak menjadi permasalahan mengingat keterbatasan pendanaan dari APBK Kota Banda Aceh. Perlu diupayakan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan saluran drainase, agar kondisi drainase dapat terawat dengan baik. Adapun peta area beresiko drainase seperti terlihat pada gambar 2.16 berikut :

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

Gambar 2.16
Peta Area Beresiko Drainase



Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.37
Area Berisiko Drainase

No	Area Berisiko *)	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Gampong
1	Resiko 4 (sangat tinggi)	Baiturrahman	Peuniti
2	Resiko 3 (tinggi)	Meuraxa	Alue Deah Teungoh
3	Resiko 3 (tinggi)	Banda Raya	Lam Lagang
4	Resiko 3 (tinggi)	Baiturrahman	Ateuk Pahlawan
5	Resiko 3 (tinggi)	Baiturrahman	Sukaramai
6	Resiko 3 (tinggi)	Baiturrahman	Neusu Jaya
7	Resiko 3 (tinggi)	Baiturrahman	Kampung Baru
8	Resiko 3 (tinggi)	Lueng Bata	Batoh
9	Resiko 3 (tinggi)	Lueng Bata	Panteriek
10	Resiko 3 (tinggi)	Kuta Alam	Mulia
11	Resiko 3 (tinggi)	Kuta Raja	Gampong Jawa
12	Resiko 3 (tinggi)	Syiah Kuala	Iemasen Kayee Adang
13	Resiko 3 (tinggi)	Syiah Kuala	Rukoh
14	Resiko 3 (tinggi)	Ulee Kareng	Ceirih

Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh Tahun 2024

Apabila dilihat dari permasalahan yang teridentifikasi dalam peta resiko sektor drainase, maka dapat dilihat bahwa resiko genangan masih menjadi permasalahan utama yang harus dihadapi Kota Banda Aceh. Hal ini diperparah dengan kenyataan masih tercampurnya grey water dengan air hujan menyebabkan pencemaran lingkungan.

Anggaran yang terbatas juga menjadi permasalahan dalam penanganan masalah drainase. Luas wilayah yang harus dibangun belum sebanding dengan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ataupun rehab saluran drainase. Kesadaran masyarakat juga memegang peranan penting, dimana masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase yang menyebabkan penyumbatan aliran air dan pada saat musim hujan dapat menyebabkan banjir.

Dengan melihat kenyataan tersebut, Pokja PKP Kota Banda Aceh menyepakati bahwa permasalahan terkait pengelolaan drainase adalah sebagai berikut :

Tabel 2.38
Permasalahan Drainase

No	Permasalahan Mendesak
1. Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (User Interface-Pengaliran-Pembuangan /Daur Ulang)	
a.	Drainase yang ada belum memisahkan antara <i>grey water</i> dan air hujan mengakibatkan genangan
b.	Saluran air belum ideal sehingga terjadi sedimentasi diselokan
c.	Masih banyak sampah yang dibuang diselokan
d.	Kesadaran masyarakat masih rendah/pembuangan dari kamar mandi, wastafel, air hujan dan industri rumah tangga tercampur jadi satu sehingga mengakibatkan polusi bau
e.	Kurangnya sumber daya manusia yang khusus untuk pengelolaan rumah pompa
2. Aspek Non-Teknis : Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
a.	Belum memiliki qanun tentang pengelolaan drainase
b.	Tidak ada pihak swasta dalam pengelolaan drainase
c.	Kondisi topografi kota cenderung datar sehingga menyulitkan aliran air secara grafitasi
d.	Adanya bangunan liar diatas drainase kota
e.	Pendangkalan saluran oleh penumpukan sedimentasi dan sampah sering terjadi
f.	Drainase kota menerima limpasan air hujan dan sampah dari Kabupaten Aceh Besar

Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh Tahun 2024

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1. Visi dan Misi Sanitasi

Perumusan visi dan misi merupakan salah satu proses dalam penyusunan SSK. Dengan adanya visi dan misi sanitasi maka tujuan pembangunan sanitasi menjadi lebih terarah dan terukur. Penyusunan visi dan misi sanitasi merupakan hasil dari kolaborasi pemikiran dari berbagai OPD yang tergabung dalam Pokja PKP Kota Banda Aceh. Dengan adanya visi dan misi, maka akan memudahkan untuk dilakukan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan pada akhir periode pelaksanaan.

Visi dan misi sanitasi Kota Banda Aceh sangat erat kaitannya dengan visi dan misi Kota Banda Aceh, yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 – 2045 yang saat ini masih dalam tahap rancangan akhir. Misi Kota Banda Aceh yang erat kaitannya dengan sanitasi adalah misi ke enam yaitu pembangunan perkotaan yang merata dan berkeadilan, misi ke tujuh yaitu sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan misi ke delapan yaitu mewujudkan kesinambungan pembangunan. Berdasarkan misi-misi tersebut maka dirumuskan visi sanitasi Kota Banda Aceh yaitu "Terwujudnya Sanitasi Kota Banda Aceh yang Aman, Terintegrasi dan Berkelanjutan Tahun 2029".

Visi sanitasi kemudian dijabarkan menjadi misi untuk masing-masing sektor sanitasi, yaitu sektor air limbah domestik dan persampahan. Perumusan misi sanitasi Kota Banda Aceh dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya aspek teknis terkait ketersediaan dan keberfungsian sarana dan prasarana serta ketersediaan dokumen perencanaan teknis dan aspek non teknis berkaitan pendanaan, kelembagaan, regulasi, peranserta masyarakat dan dunia usaha/swasta. Penjabaran visi dan misi sanitasi Kota Banda Aceh untuk periode pelaksanaan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1.
Visi Misi Sanitasi Kota Banda Aceh

Visi Kota Banda Aceh	Misi Kota Banda Aceh	Visi Sanitasi Kota Banda Aceh	Misi Sanitasi Kota Banda Aceh
Banda Aceh Kota Islami, Maju dan Berkelanjutan (draf RPJPD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045)	Mewujudkan Transpormasi Sosial dan implementasi Syariat Islam	Terwujudnya Sanitasi Kota Banda Aceh yang Aman, Terintegrasi, dan Berkelanjutan Tahun 2029	Misi Air Limbah Domestik
	1		1 Menyediakan regulasi pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan
	2 Mewujudkan Transpormasi Ekonomi		2 Mewujudkan sistem kelembagaan dan SDM yang profesional dalam pengelolaan air limbah domestik
	3 Mewujudkan Transpormasi Tata Kelola		3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur air limbah domestik yang aman dan berkelanjutan dengan penerapan teknologi tepat guna
	4 Mewujudkan keamanan daerah, tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi		4 Meningkatkan pengamanan dan pengawasan kualitas influen IPLT dan SPALD-T
	5 Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang berketahanan sosial budayadan ekologis		5 Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik
	6 Pembangunan perkotaan yang merata dan berkeadilan		6 Melibatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penanganan dan pengelolaan air limbah
	7 Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan		7 Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dalam pengelolaan air limbah domestik
	8 Mewujudkan kesinambungan pembangunan		Misi Persampahan
			1 Meningkatkan implementasi peraturan/regulasi persampahan
			2 Mengurangi timbulan sampah melalui pengelolaan persampahan dari sumbernya
			3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pengelolaan persampahan menjadi sumber energi terbarukan
			4 Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan
			5 Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan persampaha
			6 Meningkatkan kemampuan pengelolaan persampahan melalui prinsip partisipasi masyarakat
			7 Memberdayakan masyarakat dan stakeholder dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

3.2. Rencana Pengembangan Sanitasi

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik

Tujuan	Sasaran	Data dasar
(1)	(2)	(3)
Tercapainya akses ALD aman sebesar 20% pada tahun 2029 melalui SPALD_S	Pada tahun 2029 sebanyak 15.344 RT telah terlayani dengan L2T2	Akses ALD aman dari SPALD_S 7,04%
Tercapainya akses ALD aman sebesar 13% pada tahun 2029 melalui SPALD_T	9.974 RT terlayani melalui SPAL_T pada tahun 2029	Akses ALD aman dari SPALD_T 5,07%
67% atau 51.403 RT memiliki akses layak pada tahun 2029	20,89% atau 16.027 RT telah memiliki akses aman pada tahun 2029	Akses Layak Individu (tidak termasuk aman) 87, 89%
Terpisahnya regulator dan operator pengelola air limbah domestik	Terbentuknya UPTD/BUMD sebagai operator pengelola ALD pada Tahun 2025	Belum terpisahnya antara regulator dan operator pengelola ALD
Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terbentuknya Peraturan Daerah Tentang Air Limbah Domestik 2025	Belum tersedianya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
Membangun kesadaran publik mengenai pentingnya pengelolaan air limbah yang baik guna menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan, serta mencegah pencemaran air dan tanah.	Masyarakat memahami tentang sistem pengelolaan air limbah domestik dan kesehatan lingkungan	Pemahaman masyarakat tentang sistem pengelolaan air limbah domestik dan kesehatan lingkungan masih kurang
Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dari IPAL yang ada berfungsi dan aktif	KPP IPAL Skala Permukiman yang ada berfungsi dan aktif pada Tahun 2025	Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) IPAL permukiman berbasis masyarakat belum berfungsi dan aktif
Tersedianya SDM yang khusus dan terampil dalam menangani sektor air limbah domestik	Meningkatnya SDM yang khusus dan terampil dalam menangani sektor air limbah domestik	Belum memiliki sumber daya manusia yang khusus dan terampil (tenaga ahli air limbah) dalam menangani sektor air limbah domestik

Tujuan	Sasaran	Data dasar
(1)	(2)	(3)
Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terbentuknya Peraturan Daerah Tentang Air Limbah Domestik 2025	Armada milik swasta masih ada yang membuang lumpur tinja ke luar IPLT dan kewenangan Dinas terhadap swasta terbatas

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

Tabel 3.3.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Persampahan

Tujuan	Sasaran	Data dasar
(1)	(2)	(3)
Mengurangi angka sampah tidak terkelola dari 1,5% atau 1.054 ton/tahun pada tahun 2029	Berkurangnya angka sampah tidak terkelola dari 1,5% atau 1.054 ton/tahun pada tahun 2029	Sampah tidak terkelola 1,5% atau 1.054 Ton/Tahun
Meningkatkan kegiatan pengurangan sampah dari 16,2% menjadi 38% di tahun 2029	Meningkatkan kegiatan pengurangan sampah dari 16,2% menjadi 38% di tahun 2029 dengan mengembangkan program daur ulang dan pengomposan	Kegiatan pengurangan sampah 16,2%
Mengurangi penanganan sampah perkotaan dari 82,3% menjadi 62% di tahun 2029	Mengurangi penanganan sampah perkotaan dari 82,3% menjadi 62% di tahun 2029 dengan meningkatkan kegiatan pemilahan sampah pada sumbernya	Penanganan sampah perkotaan 82,3%
Terpisahnya regulator dan operator pengelola persampahan perkotaan	Terbentuknya UPTD/BUMD sebagai operator pengelola persampahan pada Tahun 2026	Peraturan Daerah Tentang kelembagaan Pengelolaan Persampahan belum ada
Meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dengan memilah material yang dapat didaur ulang, dikompos, atau dibuang secara lebih tepat guna, mengurangi volume sampah yang harus ditimbun, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.	Tersedianya mesin pemilah sampah skala besar di TPA Kota Banda Aceh	Sampah yang masuk ke TPA belum terpilah

Tujuan	Sasaran	Data dasar
(1)	(2)	(3)
Menjamin kelancaran operasional pengangkutan sampah dari sumbernya (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dengan meminimalkan gangguan operasional, memperpanjang umur kendaraan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kebersihan kota.	Optimalnya layanan pengangkutan sampah	Armada angkutan sampah banyak yang dalam kondisi tidak layak dan belum modern
Menyediakan infrastruktur penampungan sampah yang lebih efisien, estetik, dan ramah lingkungan, terutama di kawasan perkotaan dengan keterbatasan ruang dan kebutuhan untuk menjaga kebersihan serta keindahan kota.	Mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah di perkotaan dengan menyediakan tempat penampungan sementara yang tersembunyi dan terintegrasi	Belum adanya lahan
Terkelola dan terdistribusikannya sampah yang ada di TPA Kota Banda Aceh ke TPA Regional	Sampah di TPA Kota Banda Aceh terkelola dan terangkut ke TPA Regional	Sampah yang ada di TPA Kota Banda Aceh belum terdistribusi secara optimal ke TPA Regional
Mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menangani sampah, sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan, mendukung daur ulang, serta meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup.	Mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam hal memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendaur ulang sampah sehingga terjadi pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

3.2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi

A. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Banda Aceh

Tahapan pengembangan air limbah domestik dalam jangka pendek direncanakan fokus pada wilayah yang mempunyai risiko sanitasi tinggi. Untuk jangka menengah, tahapan pengembangan diupayakan dapat menyelesaikan semua permasalahan air limbah domestik di semua wilayah berdasarkan target yang telah ditentukan. Tahapan pengembangan sanitasi untuk sub sektor air limbah domestik secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Gambar 3.1.

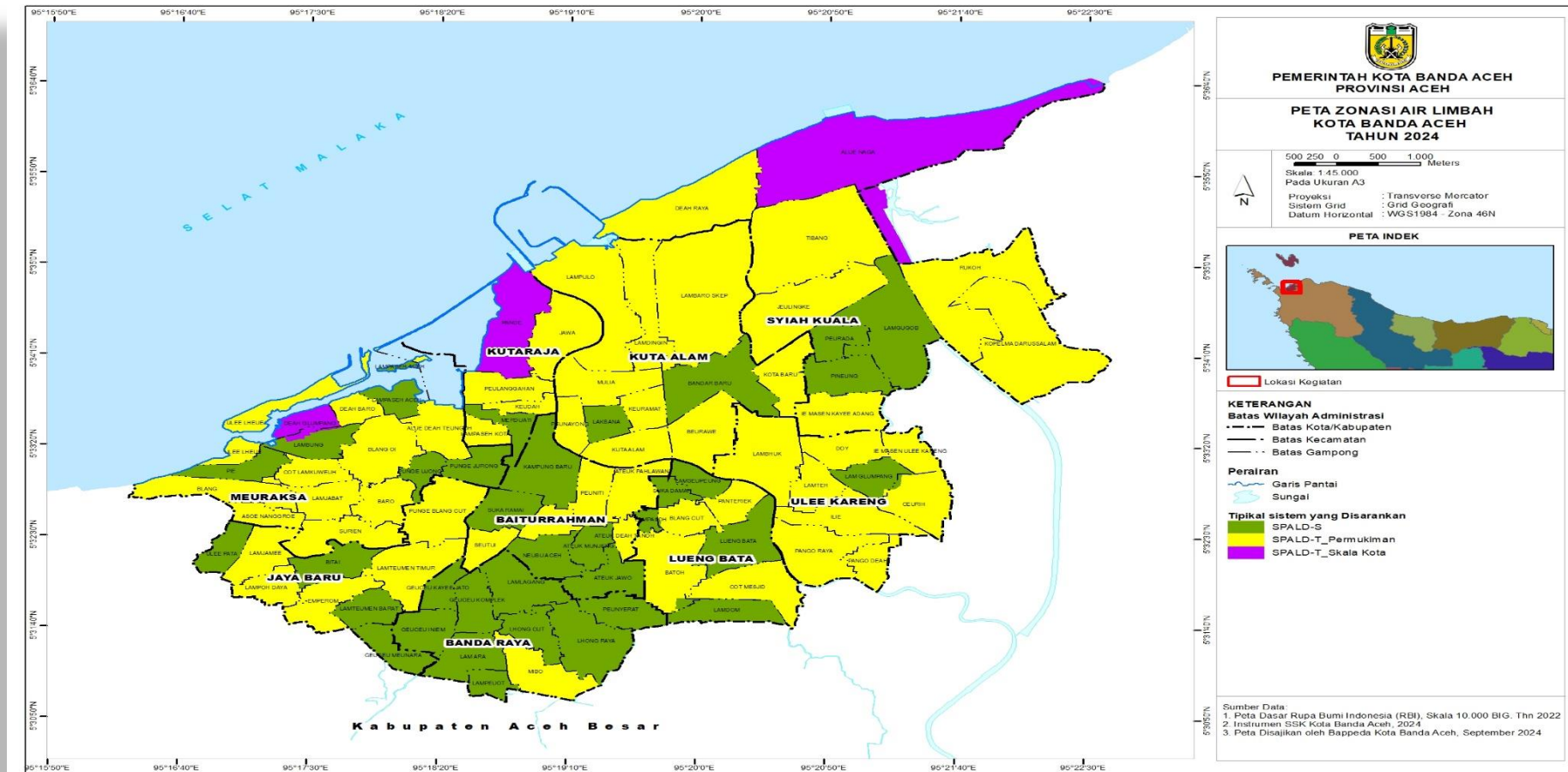
Tabel 3.4.
Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Banda Aceh

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target cakupan layanan ⁽¹⁾ (%)	
			Jangka pendek	Jangka menengah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Wilayah Perkotaan			
A	BABS di Tempat Terbuka	0%	0%	0%
B	BABS di Tempat Tertutup	0%	0%	0%
C	Akses Belum Layak	0%	0%	0%
D	Akses Layak	87,89%	77,44%	67%
E	Akses Aman	12,11%	22,56%	33%
	Wilayah Perdesaan			
A	BABS di Tempat Terbuka	0%	0%	0%
B	BABS di Tempat Tertutup	0%	0%	0%
C	Akses Belum Layak	0%	0%	0%

Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh, 2024

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

Gambar 3.1 Peta Zonasi Air Limbah



Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh, 2024

B. Tahapan Pengembangan Persampahan Kota

Rencana tahapan pengembangan persampahan dibagi dalam 3 sistem, yaitu: 1) pengurangan sampah yang lebih berfokus pada pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R, 2) penanganan sampah yang dalam jangka pendek direncanakan difokuskan pada wilayah yang mempunyai resiko sanitasi tinggi, dan 3) pengurangan sampah yang tidak terkelola. Tahapan pengembangan sanitasi untuk sub sektor persampahan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Gambar 3.2.

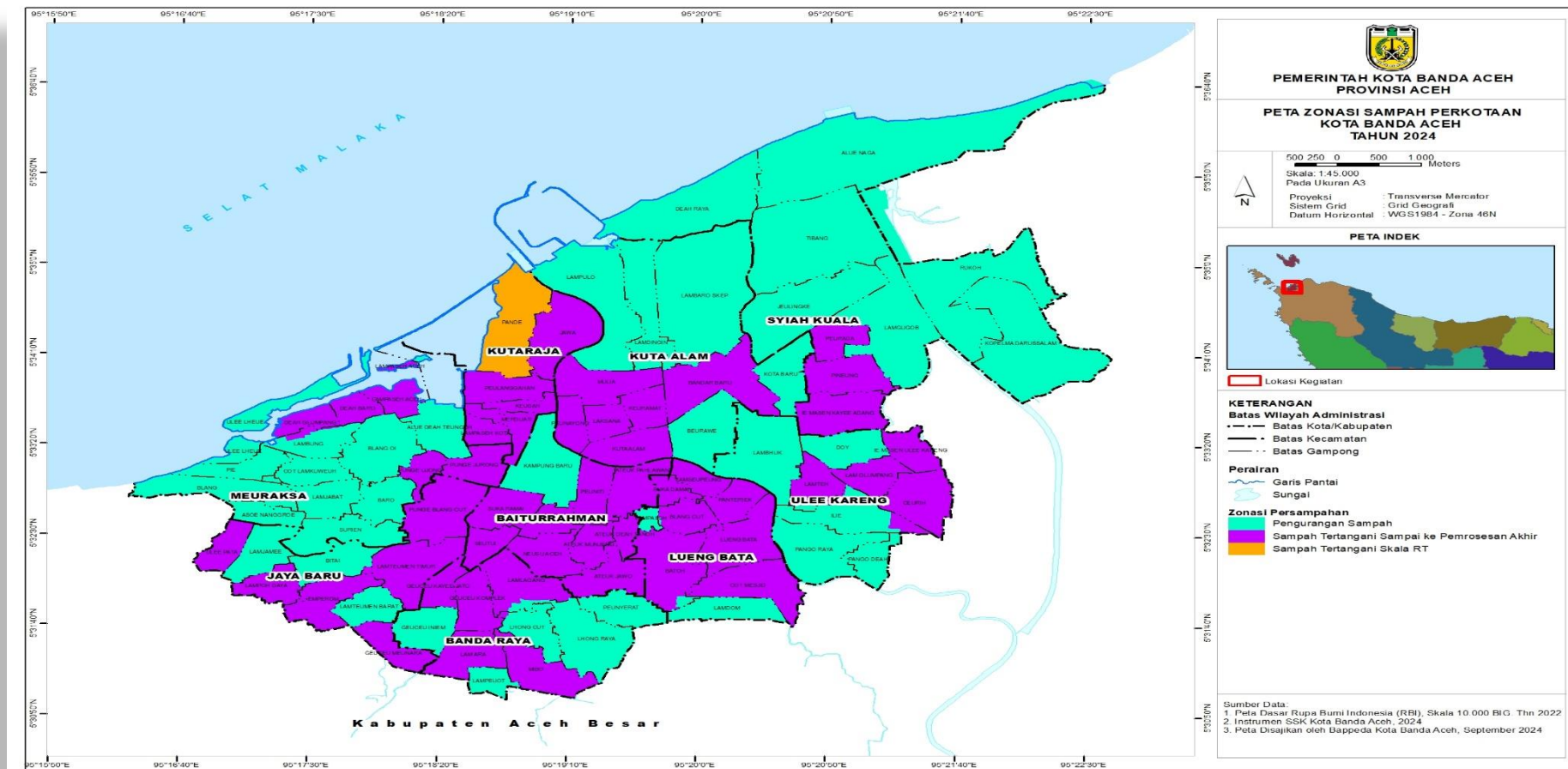
Tabel 3.5.
Tahapan Pengembangan Sampah Perkotaan

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Cakupan layanan (%)	
			Jangka pendek	Jangka menengah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Wilayah Perkotaan			
1	Pengurangan Sampah	16,2%	32%	38%
2	Penanganan Sampah	82,3%	68%	62%
3	Sampah Tidak Terkelola	1,5%	0%	0%
Total		100%	100%	100%

Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh, 2024

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

Gambar 3.2. Peta Zonasi Sampah Perkotaan



Sumber : Instrumen SSK Kota Banda Aceh, 2024

3.3. Skenario Pencapaian Sasaran

Tabel 3.6.
Skanario pencapaian Sasaran

Komponen	Tahun					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Air Limbah Domestik						
Akses Aman	15,59%	19,07%	22,56%	26,04%	29,52%	33%
Akses Layak	84,41%	80,93%	77,44%	73,96,00%	70,48%	67%
Akses Layak Perdesaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%
Akses Belum Layak	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%
BABS Tertutup	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%
BABS Terbuka	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%
Persampahan						
Penanganan	71%	70%	68%	66%	64%	62%
Pengurangan	28%	30%	32%	34%	36%	38%
Sampah Tidak Terkelola	1%	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

3.3 Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

Memproyeksikan kemampuan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pendanaan pembangunan sektor sanitasi sampai tahun 2029, perlu dilakukan kajian terhadap kemampuan pendanaan selama 5 (lima) tahun terakhir, yang secara spesifik dijabarkan pada Tabel 3.7. Proyeksi kemampuan pendanaan dengan sumber dana daerah ini perlu dilakukan untuk menentukan strategi pendanaan alternatif untuk mewujudkan pemenuhan layanan dasar sanitasi bagi masyarakat.

Tabel 3.7.
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Banda Aceh untuk Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2)	20.261.955.935,00	21.859.240.938,00	19.638.671.377,00	20.475.776.146,00	27.902.366.679,00	9,56%
1,1	Air Limbah Domestik	3.752.704.370,00	8.002.986.389,00	4.892.122.000,00	6.284.555.950,00	9.742.624.587,00	39,47%
1,2	Sampah Domestik	16.509.251.565,00	13.856.254.549,00	14.746.549.377,00	14.191.220.196,00	18.159.742.092,00	3,64%
2	Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2 + 2.3)	5.962.396.000,00	7.975.871.000,00	3.861.238.000,00	3.618.041.000,00	20.634.203.000,00	111,55%
2,1	DAK Sanitasi	2.357.681.000,00	5.081.800.000,00	1.501.238.000,00	3.618.041.000,00	7.878.381.000,00	75,96%
2,2	DAK Lingkungan Hidup	848.465.000,00	-	-	-	-	-25,00%
2,3	DAK Perumahan dan Permukiman	2.756.250.000,00	2.894.071.000,00	2.360.000.000,00	-	12.755.822.000,00	
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)		14.299.559.935,00	13.883.369.938,00	15.777.433.377,00	16.857.735.146,00	7.268.163.679,00	-9,83%
Total Belanja Langsung		636.724.216.062,59	684.750.955.769,65	1.020.064.933.595,44	1.111.586.388.667,36	1.065.456.683.063,58	15,33%
% APBD murni terhadap Belanja Langsung		2,25%	2,03%	1,55%	1,52%	0,68%	-22,60%
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)							5%

Sumber : APBD Tahun 2019-2023, Analisis Pokja PKP Kota Banda Aceh 2024

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, realisasi pendanaan APBD Kota Banda Aceh untuk sanitasi 5 (lima) tahun terakhir secara total mengalami pertumbuhan rata-rata 9,56%. Dilihat per sub sektor, maka pada sub sektor air limbah domestik mengalami pertumbuhan rata-rata 39,47%. Sementara untuk sub sektor persampahan

mengalami pertumbuhan rata-rata 3,64%. Data-data lain menunjukkan bahwa, DAK sektor sanitasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan, ditunjukkan dengan angka pertumbuhan rata-rata 75,96%. Belanja APBK murni untuk sanitasi mengalami penurunan yang sangat signifikan yang ditunjukkan dengan angka pertumbuhan rata-rata -9,83%. Untuk belanja langsung, mengalami trend positif dengan pertumbuhan rata-rata 15,33%. Trend negatif terjadi pada persentase APBD murni terhadap belanja langsung, dimana pertumbuhan rata-rata berada pada angka -22,60%.

Tabel 3.8.
Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Perkiraan Belanja Langsung	1.417.164.882.399	1.634.416.258.871	1.884.972.271.356	2.173.938.520.555	2.507.203.295.756	9.617.695.228.938
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	20.649.625.557	21.682.106.834	22.766.212.176	23.904.522.785	25.099.748.924	114.102.216.277
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	20.649.625.557	21.682.106.834	22.766.212.176	23.904.522.785	25.099.748.924	114.102.216.277

Sumber : Analisis Pokja PKP Kota Banda Aceh 2024

Berdasarkan tabel 3.8 di atas dapat dijelaskan bahwa alokasi pendanaan APBD murni untuk sektor sanitasi harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan layanan sektor sanitasi. Berdasarkan perkiraan dan kemampuan daerah untuk pendanaan sanitasi, maka sampai akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2029 total komitmen pendanaan APBK murni untuk sektor sanitasi mencapai Rp. 114.102.216.277,- atau 1,19% dari Belanja Langsung.

Tabel 3.9.

Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Banda Aceh untuk Operasional/ Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Pertumbuhan rata-rata
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Belanja Sanitasi	20.261.955.935	21.859.240.938	19.638.671.377	20.475.776.146	27.902.366.679	9,56%
1.1	Air Limbah Domestik	3.752.704.370	8.002.986.389	4.892.122.000	6.284.555.950	9.742.624.587	39,47%
1.1.1	Investasi	3.752.704.370	8.002.986.389	4.670.722.000	5.581.460.150	9.268.473.428	39,29%
1.1.2	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	-	-	221.400.000	703.095.800	474.151.159	46,25%
1,2	Sampah domestik	16.509.251.565	13.856.254.549	14.746.549.377	14.191.220.196	18.159.742.092	3,64%
1.2.1	Investasi	9.639.415.450	6.728.041.690	8.851.242.900	5.606.520.300	5.838.513.379	-7,79%
1.2.2	Biaya operasional/pemeliharaan (justified)	6.869.836.115	7.128.212.859	5.895.306.477	8.584.699.896	12.321.228.713	18,90%

Sumber : Analisis Pokja PKP Kota Banda Aceh 2024

Mengacu pada tabel 3.9 diatas, pertumbuhan pendanaan APBD Kota Banda Aceh untuk Belanja Sanitasi untuk sanitasi 5 (lima) tahun terakhir secara total mengalami pertumbuhan rata-rata 9,56%. Apabila dilihat per sub sektor, maka pada sub sektor air limbah domestik mengalami pertumbuhan rata-rata 39,47%. Sementara untuk sub sektor sampah dokestik dengan pertumbuhan rata-rata 3,64%.

Tabel 3.10.
Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kota Banda Aceh
untuk Kebutuhan Operasional/ Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2029

No	Uraian	Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp)					Total Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Belanja Sanitasi	26.174.446.743	27.483.169.080	28.857.327.534	30.300.193.911	31.815.203.606	144.630.340.873
1,1	Air Limbah Domestik	10.218.491.954	10.729.416.552	11.265.887.380	11.829.181.749	12.420.640.836	56.463.618.471
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	522.751.653	548.889.235	576.333.697	605.150.382	635.407.901	2.888.532.869
1,2	Sampah domestik	6.436.961.000	6.758.809.050	7.096.749.503	7.451.586.978	7.824.166.327	35.568.272.859
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan (justified)	8.996.242.135	9.446.054.242	9.918.356.954	10.414.274.802	10.934.988.542	49.709.916.675

Sumber : Analisis Pokja PKP Kota Banda Aceh 2024

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 3.10 diatas, dapat diketahui bahwa perkiraan kebutuhan pendanaan sanitasi untuk operasional/pemeliharaan akan meningkat setiap tahunnya. Kebutuhan operasional/pemeliharaan pada sub sektor persampahan lebih besar dari pada sub sektor air limbah domestik. Salah satu penyebabnya adalah belum maksimal berfungsinya IPLT sebagai tempat pengolahan akhir lumpur tinja.

Tabel 3.11.
Perkiraan Kemampuan APBD Kota Banda Aceh dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No	Uraian	Pendanaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan	9.518.993.788	9.994.943.477	10.494.690.651	11.019.425.184	11.570.396.443	52.598.449.544
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	20.649.625.557	21.682.106.834	22.766.212.176	23.904.522.785	25.099.748.924	114.102.216.277
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	20.649.625.557	21.682.106.834	22.766.212.176	23.904.522.785	25.099.748.924	114.102.216.277
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)	11.130.631.769	11.687.163.357	12.271.521.525	12.885.097.601	13.529.352.481	61.503.766.733
5	Kemampuan Mendanai SSK(Komitmen)(3-1)	11.130.631.769	11.687.163.357	12.271.521.525	12.885.097.601	13.529.352.481	61.503.766.733

Sumber : Analisis Pokja PKP Kota Banda Aceh 2024

Tabel 3.11 menunjukkan tren positif dalam alokasi dan kemampuan pendanaan sektor sanitasi di Kota Banda Aceh selama periode 2025-2029. Total kebutuhan operasional/pemeliharaan diproyeksikan mencapai Rp. 52.598.449.544,- sementara perkiraan alokasi APBD Murni dan komitmen pendanaan sanitasi masing-masing sebesar Rp. 114.102.216.277,-. Dengan demikian kemampuan pemerintah Kota Banda Aceh untuk mendanai program/kegiatan SSK kedepan diperkirakan sebesar Rp. 61.503.766.733,- melalui APBD Murni dan Komitmen Pendanaan Sanitasi.



STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh, merupakan kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota, tantangan dalam hal sanitasi semakin meningkat. Sanitasi yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mendukung perkembangan kota yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh telah merumuskan strategi pengembangan sanitasi yang komprehensif dan terintegrasi.

Strategi yang disusun menggunakan alat bantu Kerangka Kerja Logis (KKL). KKL membantu memastikan bahwa proses penyusunan strategi pengembangan sanitasi dilakukan secara sistematis, terukur, dan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan sanitasi yang berkelanjutan. Dengan menggunakan KKL sebagai alat bantu, strategi pengembangan sanitasi dapat dirancang dengan logika yang kuat, memastikan fokus pada prioritas, dan menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat komitmen semua pihak untuk bekerja bersama dalam mewujudkan sanitasi yang lebih baik.

4.1 Air Limbah Domestik

Strategi 1.

Menindaklanjuti pembentukan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk memisahkan antara regulator dan operator pengelola air limbah domestik di Kota Banda Aceh. Dengan harapan pengelolaan sarana dan prasarana air limbah seperti IPLT akan menjadi lebih optimal dan terkendali.

Strategi 2.

Meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan air limbah dan pelayanan sanitasi kota

Strategi ini diperlukan untuk mencapai 5 sasaran pembangunan sanitasi sektor air limbah yang berkaitan dengan infrastruktur pengelolaan air limbah. Salah satu permasalahan terkait kualitas infrastruktur adalah masih terdapat **87,89%** akses layak individu (tidak termasuk aman).

Strategi 3.

Meningkatkan SDM terkait pengelolaan air limbah domestik baik kualitas maupun kuantitas

Saat ini, sumber daya manusia dengan keahlian khusus terkait pengelolaan air limbah masih kurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas SDM seperti pelatihan, sertifikasi dan penambahan SDM. Dengan demikian pengelolaan air limbah dapat dilaksanakan secara maksimal. Implementasi dari strategi ini akan membantu dalam pengembangan air limbah baik SPALD-S maupun SPALD-T.

Strategi 4.

Meningkatkan pengolahan air limbah dengan SPALD-S dan SPALD-T

Strategi ini merupakan upaya terstruktur untuk mengoptimalkan pengelolaan air limbah domestik dengan memanfaatkan dua sistem pengolahan yang berbeda, yakni SPALD-S untuk pengolahan di tingkat individual atau kelompok kecil, dan SPALD-T untuk pengolahan terpusat di tingkat kawasan.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan air limbah domestik sehingga mampu menjaga kesehatan lingkungan dan mengurangi pencemaran, serta mematuhi standar lingkungan hidup yang ditetapkan.

Strategi 5.

Melakukan edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pengolahan air limbah domestik.

Strategi ini adalah upaya terencana untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik. Tujuan utamanya adalah untuk membangun kesadaran publik mengenai pentingnya pengelolaan air limbah yang baik guna menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan, serta mencegah pencemaran air dan tanah.

Beberapa langkah yang dapat diambil dalam penerapan strategi ini adalah

- Program Pendidikan Sanitasi di Sekolah: Pendidikan tentang pentingnya sanitasi dan kebersihan akan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Siswa akan diajarkan cara mencuci tangan yang benar dan penggunaan toilet yang higienis
- Kampanye Kesadaran Melalui Media: Pemerintah kota akan bekerja sama dengan media lokal untuk menyebarkan informasi dan kampanye kesadaran tentang penggunaan tangki septik kedap air. melalui televisi, radio, dan media sosial.
- Pelatihan dan Penyuluhan Masyarakat: Kelompok masyarakat dan kader kesehatan akan dilatih untuk menjadi agen perubahan yang dapat menyebarkan informasi tentang mengelola air limbah rumah tangga dan lingkungan mereka secara aman.

Strategi 6.

Menyediakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Selama ini Pemerintah Kota Banda Aceh belum memiliki Peraturan Daerah yang menjadi pedoman untuk pengelolaan air limbah domestik. Oleh karena itu, penyusunan regulasi tentang pengelolaan air limbah domestik ini diperlukan untuk memberi dasar dan acuan bagi rencana pengembangan jangka panjang pengelolaan air limbah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini dalam rangka pencapaian Misi Sanitasi yang pertama yaitu menyediakan regulasi pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan.

4.2 Pengolahan Persampahan

Strategi 1.

Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi

Penyampaian informasi melalui media sosial maupun media komunikasi lainnya terkait pengelolaan persampahan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, beberapa sasaran pembangunan sanitasi persampahan dapat tercapai, diantaranya meningkatkan jumlah masyarakat yang melakukan pengolahan sampah pada sumbernya, pengendalian sampah plastik yang masuk ke laut, serta pembinaan masyarakat bantaran sungai.

Strategi 2.

Meningkatkan peran serta masyarakat melakukan pengurangan sampah dari sumbernya

Strategi ini dirumuskan untuk meningkatkan jumlah sampah yang tertangani dari sumbernya. Dengan demikian jumlah sampah yang terangkut ke TPA akan berkurang. Hal ini merupakan salah satu target pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengurangi beban TPA. Implementasi dari strategi ini diperlukan untuk mencapai salah satu sasaran pembangunan sanitasi persampahan, yaitu meningkatkan jumlah masyarakat yang melakukan pengolahan sampah dari sumbernya.

Strategi 3.

Menindaklanjuti pembentukan UPTD Pengelolaan Persampahan.

Strategi ini dipandang perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi kinerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam penanganan persampahan dengan membentuk kelembagaan setingkat UPTD yang secara khusus menangani dan melakukan

pengelolaan persampahan perkotaan. Dengan terbentuknya UPTD dan tersedianya sumber daya manusia dalam kuantitas dan kualitas maka kinerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam penanganan persampahan dapat di optimalkan

Strategi 4.

Menyediakan mesin pemilah sampah di TPA Kota Banda Aceh

Strategi ini merupakan suatu rencana komprehensif yang melibatkan serangkaian langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui pemilahan otomatis. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dengan memilah material yang dapat didaur ulang, dikompos, atau dibuang secara lebih tepat guna, mengurangi volume sampah yang harus ditimbun, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Strategi 5.

Melakukan Operation and Maintenance armada pengangkutan sampah

Strategi ini adalah perencanaan dan penerapan langkah-langkah untuk memastikan armada pengangkutan sampah, seperti truk dan kendaraan pendukung lainnya, beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Tujuan utama strategi ini adalah untuk menjamin kelancaran operasional pengangkutan sampah dari sumbernya (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dengan meminimalkan gangguan operasional, memperpanjang umur kendaraan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kebersihan kota.

Strategi 6.

Pengadaan armada pengangkutan sampah yang baru

Dalam upaya peningkatan pelayanan persampahan di Kota Banda Aceh salah satu strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengadakan armada pengangkutan sampah yang baru dengan tujuan tersedianya armada pengangkutan sampah yang layak dan modern. Dengan adanya dukungan armada pengangkutan sampah yang layak dan modern diharapkan dapat melayani sampah perkotaan secara optimal.

Strategi 7.

Pengadaan lahan untuk Pembangunan TPS Bawah Tanah

Strategi ini adalah perencanaan sistematis untuk memperoleh dan mengelola lahan yang sesuai bagi pembangunan fasilitas penampungan sampah yang terletak di bawah permukaan tanah. Tujuan utamanya adalah menyediakan infrastruktur penampungan sampah yang lebih efisien,

estetis, dan ramah lingkungan, terutama di kawasan perkotaan dengan keterbatasan ruang dan kebutuhan untuk menjaga kebersihan serta keindahan kota.

Strategi 8.

Meningkatkan jumlah armada truck besar pengangkut sampah

Saat ini DLHK3 melakukan pengangkutan sampah dari TPA Kota Banda Aceh ke TPA Regional dengan armada yang terbatas sehingga sampah yang menumpuk di TPA Kota Banda Aceh sudah over kapasitas. Untuk ini diperlukan strategi dengan meningkatkan jumlah armada truck pengangkut sampah sehingga sampah di TPA Kota Banda Aceh dapat dikelola baik dan terangkut ke TPA Regional

Strategi 9.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik

Strategi ini merupakan pendekatan sistematis untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menangani sampah, sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan, mendukung daur ulang, serta meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup.

Kerangka Kerja Logis yang digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan strategi pengembangan sanitasi sektor air limbah domestik dan persampahan disampaikan pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 berikut ini :

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

Tabel 4.1 KKL Air Limbah Domestik

No	Permasalahan Mendesak	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan
AIR LIMBAH DOMESTIK						
1	Capaian akses air limbah domestik aman 7,04% melalui penggunaan tangki septik individual yang disedot	Tercapainya akses ALD aman sebesar 20% pada tahun 2029 melalui SPALD_S	Pada tahun 2029 sebanyak 15.344 RT telah terlayani dengan L2T2	Meningkatkan pengelolaan SPALD-S dan SPALD-T	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1 Pendataan kepemilikan toilet dan tangki septik sesuai dengan standar (Survey SPM Air Minum dan Air Limbah)
						2 Penyediaan Layanan L2T2
						3 Pengadaan Truk Tinja
2	Capaian akses ALD aman 5,07% melalui penggunaan IPAL	Tercapainya akses ALD aman sebesar 13% pada tahun 2029 melalui SPALD_T	9.974 RT terlayani melalui SPAL_T pada tahun 2029	Meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan air limbah dan pelayanan sanitasi kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1 Pembangunan/penyediaan SPALD-T Skala Permukiman
						2 Optimalisasi Idle capacity dari IPAL Skala Permukiman yang ada
						3 Penambahan Jaringan SR IPAL Skala Kota
3	Capaian akses layak individu (tidak termasuk aman) 87,89% atau 67.430 RT	67% atau 51.403 RT memiliki akses layak pada tahun 2029	20,89% atau 16.027 RT telah memiliki akses aman pada tahun 2029	Meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan air limbah dan pelayanan sanitasi kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1 Sosialisasi pembangunan SPALD-S
						2 Pembangunan SPALD-S (tangki septik komunal dan individual)
4	Belum ada pemisahan fungsi antara regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah domestik	Terpisahnya regulator dan operator pengelola air limbah domestik	Terbentuknya UPTD/BUMD sebagai operator pengelola ALD pada Tahun 2025	Menindaklanjuti pembentukan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1 Analisis kajian penyiapan Perumdam Tirta Daroy sebagai penyelenggara pengelolaan air limbah domestik Kota Banda Aceh
5	Belum adanya Perda atau Qanun dan turunannya yang mengatur pengelolaan air limbah domestik	Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terbentuknya Peraturan Daerah Tentang Air Limbah Domestik 2025			1 Penyusunan Qanun/perwali dan turunannya tentang PALD Kota Banda Aceh
						2 Sosialisasi Qanun Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Banda Aceh
6	Masih adanya armada milik swasta yang melakukan pembuangan lumpur tinja ke luar IPLT dan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas terhadap pihak swasta terbatas	Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terbentuknya Peraturan Daerah Tentang Air Limbah Domestik 2025	Meningkatkan SDM terkait pengelolaan air limbah domestik baik kualitas maupun kuantitas	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1 Penyusunan MoU tentang kerjasama pengelolaan ALD dengan pihak swasta
7	Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) IPAL permukiman berbasis masyarakat belum berfungsi secara aktif	Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dari IPAL yang ada berfungsi dan aktif	KPP IPAL Skala Permukiman yang ada berfungsi dan aktif pada Tahun 2025			1 Pengembangan dan penguatan kapasitas KPP
8	Belum memiliki sumber daya manusia yang khusus dan terampil (tenaga ahli air limbah) dalam menangani sektor air limbah domestik	Tersedianya SDM yang khusus dan terampil dalam menangani sektor air limbah domestik	Meningkatnya SDM yang khusus dan terampil dalam menangani sektor air limbah domestik			1 Bimbingan Teknis (Pengembangan SDM tenaga air limbah)
9	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik dan kesehatan lingkungan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sistem pengelolaan air limbah domestik dan kesehatan lingkungan	Masyarakat memahami tentang sistem pengelolaan air limbah domestik dan kesehatan lingkungan	Melakukan edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pengolahan air limbah domestik.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1 Sosialisasi terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Kesehatan Lingkungan

Sumber : KKL Pemutakhiran SSK Banda Aceh

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

Tabel 4.2 KKL Persampahan

No	Permasalahan Mendesak	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan
PERSAMPAHAN						
1	Masih ada sampah yang tidak terkelola sebesar 1,5% atau sebesar 1.054 Ton/Tahun	Mengurangi angka sampah tidak terkelola dari 1,5% atau 1.054 ton/tahun pada tahun 2029	Mengurangi angka sampah tidak terkelola 1,5% atau 1.054 ton/tahun Tahun 2029	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	Pengelolaan Persampahan (DLHK3)	1 Sosialisasi 2 Penguatan Penegakan Hukum (lintas Sektor)
2	Pengurangan sampah perkotaan baru 16,2% atau 11.143 Ton/Tahun, ada Gap sebesar 23,8% dari yang ditargetkan 40% pada tahun 2029	Meningkatkan kegiatan pengurangan sampah dari 16,2% menjadi 40% di tahun 2029	Meningkatkan kegiatan pengurangan sampah dari 16,2% menjadi 40% di tahun 2029 dengan mengembangkan program daur ulang dan pengomposan	Meningkatkan peran serta masyarakat melakukan pengurangan sampah dari sumbernya	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (PUPR)	1 Pembangunan TPS3R/TPS/TPST
3	Penanganan sampah perkotaan 82,3% atau sebesar 56.578 Ton/Tahun, ada Gap sebesar -22,3% dari yang ditargetkan 60% pada tahun 2029	Mengurangi penanganan sampah perkotaan dari 82,3% menjadi 60% di tahun 2029	Mengurangi penanganan sampah perkotaan dari 82,3% menjadi 60% di tahun 2029 dengan meningkatkan kegiatan pemilahan sampah pada sumbernya		Pengelolaan Persampahan (DLHK3)	1 Sosialisasi
4	Belum adanya regulasi kelembagaan pengelolaan persampahan	Tersedianya Peraturan Daerah Tentang kelembagaan Pengelolaan Persampahan	Terbentuknya Peraturan Daerah Tentang Kelembagaan Pengelola Persampahan pada tahun 2027	Menyediakan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (DLHK3)	1 Penyusunan Revisi ganun no. 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah
5	DLHK3 belum memiliki mesin pemilah sampah	Terpilahnya sampah masuk ke TPA	Tersedianya mesin pemilah sampah skala besar di TPA Kota Banda Aceh	Menyediakan mesin pemilah sampah di TPA Kota Banda Aceh	Pengelolaan Persampahan (DLHK3)	1 Pengadaan mesin pemilah sampah skala besar
6	Kondisi armada pengangkutan sampah yang dimiliki oleh DLHK3 banyak yang rusak dan tidak modern	Tersedianya armada pengangkutan sampah layak dan modern	Optimalnya layanan pengangkutan sampah	Melakukan OM armada pengangkutan sampah	Pengelolaan Persampahan (DLHK3)	1 Pemeliharaan rutin armada angkutan sampah
				Pengadaan armada pengangkutan sampah yang baru	Pengelolaan Persampahan (DLHK3)	2 Pengadaan armada angkutan sampah yang modern (truck compactor)
					Pengelolaan Persampahan (DLHK3)	3 Pengadaan truck crane sampah
7	Belum ada lahan untuk Pembangunan TPS	Tersedianya lahan untuk pembangunan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dalam tanah	Lahan untuk pembangunan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dalam tanah tersedia pada tahun 2029	Pengadaan lahan untuk pembangunan TPS Bawah tanah	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (PUPR)	1 Pengadaan lahan untuk pembangunan TPS bawah tanah
8	Sampah di TPA Kota Banda Aceh belum dimanfaatkan sehingga mengakibatkan over kapasitas	Terkelola dan terdistribusikannya sampah yang ada di TPA Kota Banda Aceh ke TPA Regional	Sampah di TPA Kota Banda Aceh terkelola dan terangkut ke TPA Regional	Meningkatkan jumlah armada truck besar pengangkut sampah	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (PUPR)	1 Pengadaan Truck pengangkut sampah ke TPA Regional 2 Pembangunan TPS3R/TPS/TPST
9	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah terkait 3R dan perilaku hidup bersih dan sehat	Terkelolanya sampah dengan baik dari sumbernya	Mengurangi sampah yang masuk ke TPA Kota Banda Aceh	Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik	Pengelolaan Persampahan (DLHK3)	1 Sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan sampah

Sumber : KKL Pemutakhiran SSK Banda Aceh



PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

5.1 Ringkasan

Indikasi program dan kegiatan pembangunan sanitasi disusun sebagai bentuk jawaban dari strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi, misi pembangunan sanitasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan pembangunan Kota Banda Aceh. Kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini dihasilkan melalui rangkaian proses tahapan perencanaan yang telah di rumuskan sebelumnya, mengacu pada instrument SSK, dan merupakan kebutuhan investasi pengembangan pembangunan sanitasi di Kota Banda Aceh untuk 5 tahun mendatang, yaitu meliputi pendanaan sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan.

Tabel berikut adalah rekapitulasi total anggaran yang menjadi kebutuhan investasi pengembangan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, dilihat berdasarkan sumber anggaran yaitu APBD Kota Banda Aceh, APBD Provinsi, APBN, DAK, Swasta/CSR, maupun masyarakat diuraikan sebagai berikut;

Tabel 5.1.
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	
1	Air Limbah Domestik	12.543	25.910	26.410	24.329	24.021	113.213
2	Persampahan	4.215	6.830	16.060	6.720	4.790	38.615
Jumlah		16.758	32.740	42.470	31.049	28.811	151.828

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel diatas bahwa Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Kota Banda Aceh selama 5 tahun kedepan sebesar Rp. 151.858.000.000,- dengan rincian dari kegiatan Air Limbah Domestik sebesar Rp. 113.213.000.000,- dan kegiatan Persampahan sebesar Rp. 38.615.000.000,-.

Tabel 5.2.
Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 tahun

X Rp. 1 Juta

No.	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	
1	Kebutuhan Pendanaan	16.758	32.740	42.470	31.049	28.811	151.828
2	Kemampuan Pendanaan	11.131	11.687	12.272	12.885	13.529	61.504
3	Selisih (Rp)	5.627	21.053	30.198	18.164	15.282	90.324
4	Selisih (%)	34%	64%	71%	59%	53%	59%

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas bahwa hasil perhitungan funding gap Kota Banda Aceh selama 5 tahun kedepan dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 151.858.000.000,- dimana kemampuan pendanaan sebesar Rp. 61.504.000.000,- sehingga terdapat selisih anggaran dari yang dibutuhkan untuk memenuhi target sebesar Rp. 90.324.000.000,- atau 59%. Dengan demikian Kota Banda Aceh tidak mampu membiayai pengembangan sanitasinya untuk 5 tahun kedepan dengan dana APBD, diharapkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat melalui APBA dan APBN dapat membantu memenuhi kekurangan anggaran tersebut.

Tabel 5.3.
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran

X Rp. 1 Juta

No.	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	
A.	Pemerintah						
1	APBD Kota Banda Aceh	1.706	4.680	2.335	2.070	1.995	12.786
2	APBD Provinsi	100	100	100	100	-	400
3	APBN	8.150	-	24.000	15.000	15.000	62.150
4	DAK	2.502	23.860	7.400	6.400	6.400	46.562
Jumlah A		12.458	28.640	33.835	23.570	23.395	121.898
B.	Non-Pemerintah						
1	CSR Swasta	100	-	1.615	1.799	2.156	5.670
2	Masyarakat	-	-	-	-	60	60
Jumlah B		100	-	1.615	1.799	2.216	5.730
Total (A + B)		12.558	28.640	35.450	25.369	25.611	127.628
Daftar Tunggu (Kebutuhan - A - B)		4.200	4.000	7.400	5.400	3.200	24.200

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel diatas Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun kedepan di Kota Banda Aceh sebesar Rp.151.828.000.000,- yang bersumber dari APBD Kota Banda Aceh sebesar Rp.12.786.000.000,- dari APBA Provinsi sebesar Rp. 400.000.000,- dari APBN sebesar Rp. 62.150.000.000,- dari DAK sebesar Rp. 46.562.000.000,- dan anggaran non Pemerintah dari CSR/Swasta sebesar Rp. 5.670.000.000,- dan dari Masyarakat sebesar Rp. 60.000.000,-. Sedangkan yang masih masuk dalam daftar tunggu sebesar Rp. 24.200.000.000,-.

5.2 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

Rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kota Banda Aceh dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029, berdasarkan sumber anggaran pemerintah (APBD Kota Banda Aceh, APBD Provinsi, APBN dan DAK) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kota Banda Aceh X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	
1	Air Limbah Domestik	1.691	2.550	1.295	1.030	1.005	7.571
2	Persampahan	15	2.130	1.040	1.040	990	5.215
Jumlah		1.706	4.680	2.335	2.070	1.995	12.786

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, Kota Banda Aceh selama 5 tahun kedepan melalui APBD Kota Banda Aceh mengalokasikan anggaran untuk kegiatan air limbah domestik sebesar Rp. 7.571.000.000,- dan untuk kegiatan persampahan sebesar Rp. 5.215.000.000,-. Kebutuhan anggaran untuk Pengembangan Sanitasi di Kota Banda Aceh selama 5 Tahun kedepan dari sumber APBD sebesar Rp. 12.786.000.000,-.

Tabel 5.5.
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	
1	Air Limbah Domestik	100	-	100	-	-	200
2	Persampahan	-	100	-	100	-	200
Jumlah		100	100	100	100	-	400

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel diatas, Kota Banda Aceh selama 5 tahun kedepan mengharapkan dukungan dari APBD Provinsi sebesar Rp. 200.000.000,- untuk kegiatan air limbah domestik dan untuk kegiatan persampahan sebesar Rp. 200.000.000,-. Kebutuhan anggaran untuk Pengembangan Sanitasi di Kota Banda Aceh selama 5 Tahun kedepan dari sumber APBD Provinsi sebesar Rp. 400.000.000,-.

Tabel 5.6.
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	
1	Air Limbah Domestik	8.150	-	17.000	15.000	15.000	55.150
2	Persampahan	-	-	7.000	-	-	7.000
Jumlah		8.150	-	24.000	15.000	15.000	62.150

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, Kota Banda Aceh selama 5 tahun kedepan mengharapkan dukungan dari APBN untuk kegiatan air limbah domestik sebesar Rp. 55.150.000.000,- dan untuk kegiatan persampahan sebesar Rp. 7.000.000.000,-. Kebutuhan anggaran untuk Pengembangan Sanitasi di Kota Banda Aceh selama 5 Tahun kedepan dari sumber APBN adalah sebesar Rp. 62.150.000.000,-.

Tabel 5.7.
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	
1	Air Limbah Domestik	2.502	23.260	5.800	5.800	5.800	43.162
2	Persampahan	-	600	1.600	600	600	3.400
Jumlah		2.502	23.860	7.400	6.400	6.400	46.562

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, Kota Banda Aceh selama 5 tahun kedepan mengharapkan dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan air limbah domestik sebesar Rp. 43.162.000.000,- dan untuk kegiatan persampahan sebesar Rp. 3.400.000.000,-. Kebutuhan anggaran untuk Pengembangan Sanitasi di Kota Banda Aceh selama 5 Tahun kedepan dari sumber DAK adalah sebesar Rp. 46.562.000.000,-.

5.3 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari swasta belum menjadi salah satu sumber pendanaan bagi kegiatan pengembangan sanitasi di Kota Banda Aceh. Upaya-upaya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan pelibatan pihak swasta secara aktif untuk berinvestasi dan menjadi salah satu sumber pendanaan pada kegiatan sanitasi juga masih kurang. Maka oleh karenanya pada Dokumen Pemutakhiran SSK tahun 2025-2029, Pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan dan berupaya menyerap anggaran untuk pendanaan sanitasi yang bersumber dari CSR/Swasta. Besaran rencana pendanaan sanitasi yang bersumber dari CSR/Swasta dapat dilihat pada Tabel 5.8. di bawah ini :

Tabel 5.8.
Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	
1	Air Limbah Domestik	100	-	1.615	1.799	2.156	5.670
2	Persampahan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		100	-	1.615	1.799	2.156	5.670

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, Kota Banda Aceh selama 5 tahun kedepan mengharapkan dukungan pendanaan sanitasi dari partisipasi Swasta/CSR untuk kegiatan air limbah domestik sebesar Rp. 5.670.000.000,-.

Tabel 5.9.
Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	
1	Air Limbah Domestik	-	-	-	-	60	60
2	Persampahan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	60	60

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

Tabel diatas menjelaskan bahwa pendanaan sanitasi partisipasi masyarakat di Kota Banda Aceh di sektor air limbah domestik sebesar Rp. 60.000.000,- pada matrik program, kegiatan dan indikasi pendanaan

terlihat dana partisipasi masyarakat tersebut diperuntukkan pada kegiatan Rehabilitasi IPAL Komunal Skala Permukiman yang direncanakan diimplementasikan pada tahun 2026-2029.

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Strategi monitoring dan evaluasi merupakan salah satu strategi pendukung yang akan turut menentukan keberhasilan program pembangunan di bidang sanitasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai bagian dalam perencanaan strategi sanitasi Kota Banda Aceh untuk mengetahui sejauh mana batasan kegiatan dan hasil dari pelaksanaan SSK yang telah dicapai setiap tahun selama 5 tahun perencanaan SSK. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga merupakan kontrol untuk perencanaan program tahun berikutnya dan membahas penyelesaian kegiatan yang tertunda bahkan sebagai data dasar kegiatan dari perencanaan yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tujuan penyusunan SSK Kota Banda Aceh maka tujuan penyusunan strategi monitoring dan evaluasi sanitasi adalah menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, untuk memastikan tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan capaian target *Sustainable Development Goals* serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan secara efektif.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SSK adalah usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam pencapaian visi pembangunan sanitasi, yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Menilai kembali kerangka hasil/kerangka strategi SSK. Kerangka hasil seperti tujuan, sasaran, *input*, kegiatan dan *output* sesuai kaidah **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound*) serta memiliki indikator jelas.
- Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK di tingkat Pokja
- Memasukkan informasi kerangka hasil ke dalam sistem monitoring dan evaluasi berbasis web ke NAWASIS (National Water Supply and Sanitation Information Services)

Tabel 6.1.
Tabel Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK Tahun 2025-2029

No	Objek Pemantauan	Rencana Movev												Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data/Pemantau		Penerima Laporan (Dinas/Badan /Institusi)
1	Input Capaian Strategis									*	*	*	*	Pokja PKP Kota Banda Aceh	Pokja PKP Kota Banda Aceh	Pokja PKP Kota Banda Aceh	3 Bulan	Walikota
2	Input menu investasi	*	*	*	*	*	*							Pokja PKP Kota Banda Aceh	Pokja PKP Kota Banda Aceh	Pokja PKP Kota Banda Aceh	6 Bulan	Walikota
3	Input menu akses	*	*	*	*	*	*							Pokja PKP Kota Banda Aceh	Pokja PKP Kota Banda Aceh	Pokja PKP Kota Banda Aceh	6 Bulan	Walikota
4	Input menu infrastruktur				*	*	*	*	*					Pokja PKP Kota Banda Aceh	Pokja PKP Kota Banda Aceh	Pokja PKP Kota Banda Aceh	5 Bulan	Walikota
5	Input menu progres							*	*	*	*	*	*	Pokja PKP Kota Banda Aceh	Pokja PKP Kota Banda Aceh	Pokja PKP Kota Banda Aceh	6 Bulan	Walikota
6	Pelatihan Nawasis	*	*											PPSP	PPSP	PPSP	2 Bulan	Walikota

Sumber : Pokja PKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF KAJIAN EHRA (Environmental Health Risk Assessment)

Kajian Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/*Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) adalah sebuah survei partisipatif di tingkat Kabupaten/Kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Dalam pelaksanaan kajian EHRA menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yakni 1) wawancara (*interview*) dan 2) pengamatan (observasi). Pewawancara dan pelaku pengamatan dalam EHRA adalah Enumerator yang merupakan kader desa/Kesehatan/PKK. Sementara Sanitarian bertugas menjadi Supervisor selama pelaksanaan survei. Unit sampling utama (*Primary Sampling*) adalah RT (Rukun Tetangga)/Pemangku. Unit sampling ini dipilih secara proporsional dan acak berdasarkan total Pemangku/RT di semua RW dalam setiap Desa/Kelurahan yang telah ditentukan menjadi area survei. Jumlah sampel RT per Desa/Kelurahan minimal 8 RT dan jumlah sampel per RT sebanyak 8 responden. Dengan demikian jumlah sampel per desa/kelurahan adalah minimal 45 responden. Yang menjadi responden adalah Ibu atau anak yang sudah menikah, dan berumur antara 18 sampai dengan 60 tahun.

Metode penentuan target area survei dilakukan berdasarkan kondisi geografi dan demografi melalui proses yang dinamakan Stratifikasi. Hasil stratifikasi ini juga sekaligus bisa digunakan sebagai indikasi awal lingkungan berisiko. Kriteria utama penetapan strata tersebut adalah kepadatan penduduk, angka kemiskinan, daerah/wilayah yang dialiri sungai/kali/saluran drainase/saluran irigasi, daerah terkena banjir. Jumlah desa/kelurahan yang akan dijadikan objek.

Kajian ini adalah 45 desa/kelurahan yang terdistribusi dalam 4 (empat) strata yaitu strata 1 sebanyak 1 desa/kelurahan, strata 2 sebanyak 13 desa/kelurahan, strata 3 sebanyak 21 desa/kelurahan dan strata 4 sebanyak 10 desa/kelurahan. Karena di Kota Banda Aceh sampel yang akan dijadikan target survei adalah desa/kelurahan, maka hasil olah data adalah tidak per strata melainkan per desa/kelurahan.

Di Kota Banda Aceh responden yang digunakan dalam kajian EHRA ini adalah sejumlah 360 responden yang telah dilakukan random sampling dan terdistribusi dalam 45 desa/kelurahan terpilih. Kondisi sampah di Kabupaten/Kota Banda Aceh adalah sebanyak 12 % melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara dibakar. Sebesar 7% rumah tangga melakukan pemilahan sampah, sedangkan 28% rumah tangga yang mengumpulkan sampah dan dibuang ke

TPS, dan 27% yang mengumpulkan sampah pada tempat sampah yang tertutup, kuat dan mudah dibersihkan sedangkan 26% tidak melakukan pengelolaan sampah dengan benar.

Jumlah rumah tangga yang memiliki sarana jamban pribadi adalah sebesar 100%, dimana sebanyak 70% rumah tangga yang menggunakan jenis kloset leher angsa dan 30% jenis kloset leher angsa dengan tangki saptik konstruksi sendiri. Tempat penyaluran akhir tinja 63% menggunakan sumur resapan, 28% menggunakan drainase dan 9% menyalurkan ketempat yang tidak memenuhi syarat kesehatan .

Untuk pengelolaan air bersih rumah tangga, sumber air yang terlindungi kategori tercemar sebanyak 47,35% dan yang tidak tercemar sebanyak 52,65%. Sementara itu, penggunaan air tak terlindungi yang kondisi tidak aman sebesar 18,33% dan aman sebesar 81,67%. Perilaku Cuci tangan pakai sabun yang melakukan setiap hari sebanyak 96% sedangkan yang tidak melakukan cucitangan pakai sabun sebesar 4%. Untuk tempat melakukan praktik Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dikamar mandi sebesar 36%, ditempat cuci piring 35%, dijamban 18%, tidak tau 10% dan ditempat lainnya 1%. Sedangkan responden yang melakukan cuci tangan pakai sabun di 5 (lima) waktu penting, sebanyak 71% responden melakukannya, dan sisanya sebesar 29% tidak melakukan CTPS. Persentase tertinggi praktek Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dilakukan saat sebelum makan yaitu sebesar 17%, dan saat setelah buang air besar sebanyak 17%.

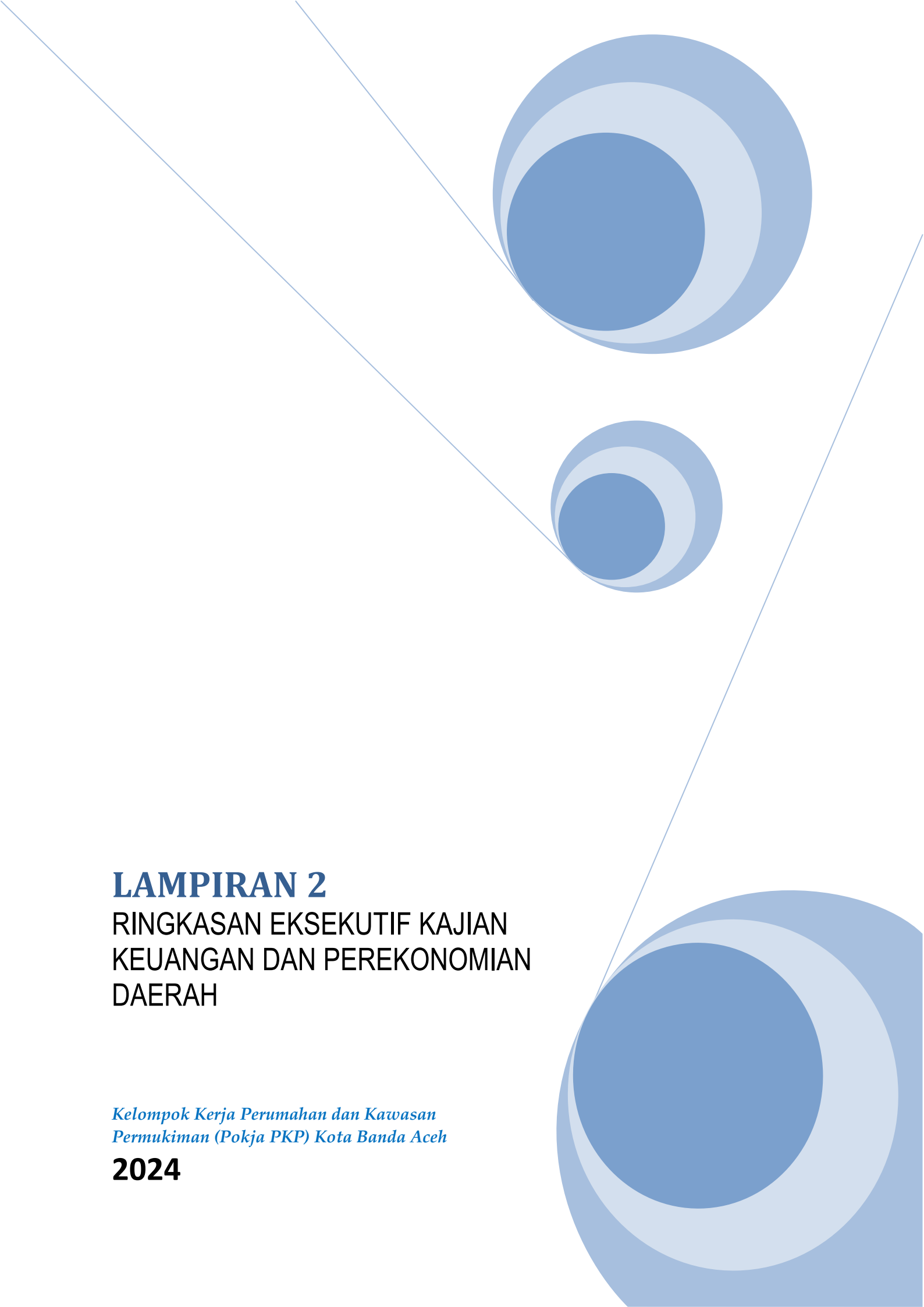
Hasil analisa indeks risiko sanitasi adalah sebagai berikut:

1. Kategori area berisiko sangat tinggi pada anggota strata 3 yaitu dengan nilai/skor 76, dimana risiko sanitasi paling tinggi adalah air limbah domestik sebesar 27%, persampahan 22 %, perilaku STBM 5 pilar 15,8%, sumber air 9,3% dan genangan air 2,5%.
2. Kategori area berisiko tinggi pada anggota Strata 2 yaitu dengan nilai/skor 47, dimana risiko sanitasi paling tinggi adalah air limbah domestik sebesar 16,68%, dan persampahan sebesar 14,59%, perilaku STBM 5 pilar sebesar 9,32% dan sumber air 5,4%, dan genangan air 0,56%.
3. Kategori area berisiko sedang pada anggota Strata 4 yaitu dengan nilai/skor 36, dimana risiko sanitasi paling tinggi adalah air limbah domestik sebesar 11,98%, dan persampahan sebesar 10,33% dan perilaku hidup bersih dan sehat sebesar 7,65%.
4. Kategori area berisiko rendah pada anggota Strata 1 dengan nilai/skor 4, dimana risiko sanitasi paling tinggi yaitu persampahan sebesar 1,4% dan air limbah domestik 1,34%.

Keterangan :

- a. Strata 1 adalah Gampong Lamglumpang

- b. Strata 2 adalah Gampong Baro, Gampong Punge Ujong, Gampong Lampoh Daya, Gampong Lhong Raya, Gampong Geuceu Kayee Jato, Gampong Kampung Baru, Gampong Peunayong, Gampong Kota Baru, Gampong Pande, Gampong Kopelma Darussalam, Gampong Deah Raya, Gampong Alue N dan Gampong Pango Deah.
- c. Strata 3 adalah Gampong Blang, Gampong Pie, Gampong Lambung, Gampong Alue Deah Teungoh, Gampong Ulee Pata, Gampong Lamtemen Barat, Gampong Lhong Cut, Gampong Lam Lagang, Gampong Ateu Jawo, Gampong Ateuk Munjeng, Gampong Suka Ramai, Gampong Cot Mesjid, Gampong Lueng Bata, Gampong Lampaloh, Gampong Panteriek, Gampong Beurawe, Gampong Lampulo, Gampong Jawa, Gampong Jelingke, Gampong Iemasen Ulee Kareng dan Gampong Lambhuk.
- d. Strata 4 adalah Gampong Surien, Gampong Lampaseh Aceh, Gampong Bitai, Gampong Punge Blang Cut, Gampong Mibo, Gampong Neusu Jaya, Gampong Kuta Alam, Gampong Lamdingin, Gampong Lampaseh Kota dan Gampong Ilie.



LAMPIRAN 2

RINGKASAN EKSEKUTIF KAJIAN KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH

*Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Pokja PKP) Kota Banda Aceh*

2024

Lampiran 1.1 : Keuangan Daerah dan Struktur Organisasi Daerah
A. Keuangan dan Perekonomian Daerah

Tabel 1.1 Rekapitulasi Realisasi APBD Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2023

No	REALISASI	TAHUN					Rata rata Pertumbuhan
		2019 Rp.	2020 Rp.	2021 Rp.	2022 Rp.	2023 Rp.	
A	Pendapatan (a.1+a.2+a.3)	1.215.834.088.158,63	1.258.996.719.879,62	1.209.597.173.418,43	1.355.586.767.032,27	1.272.623.511.811,12	
a.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	235.123.074.164,05	227.747.620.343,43	224.364.761.635,43	314.828.148.941,83	287.367.598.251,12	
a.1.1	Pajak Daerah	85.244.712.485,50	74.892.825.562,79	75.063.608.785,74	85.533.440.411,05	104.643.250.135,95	
a.1.2	Retribusi Daerah	25.670.816.165,00	19.981.218.989,00	21.064.925.048,77	24.528.838.525,25	25.149.883.618,17	
a.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.029.633.175,00	5.999.134.330,00	4.850.599.755,00	5.413.864.365,03	3.773.273.748,75	
a.1.4	Zakat	16.461.357.998,67	16.834.841.547,32	15.456.225.041,54	15.679.393.464,40	15.535.234.020,01	
a.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	102.716.554.339,88	110.039.599.914,32	107.929.403.004,38	183.672.612.176,10	138.265.956.728,24	
a.2	Dana Perimbangan (Transfer)	752.795.789.176,00	708.592.641.961,00	814.110.253.075,00	868.512.177.209,00	970.178.051.536,00	
a.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.187.097.917,00	37.035.613.531,00	51.918.404.818,00	50.318.308.489,00	43.454.565.823,00	
a.2.2	Dana Alokasi Umum	605.014.830.000,00	547.629.398.000,00	539.238.114.000,00	524.217.025.537,00	554.980.386.831,00	
a.2.3	Dana Alokasi Khusus	111.593.861.259,00	123.927.630.430,00	134.589.048.057,00	173.321.324.183,00	147.494.092.151,00	
a.2.4	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	10.998.041.000,00	50.554.816.000,00	5.781.382.000,00	
a.2.5	Dana Desa	-	-	77.366.645.200,00	70.100.703.000,00	76.172.967.000,00	
a.2.6	Pendapatan Transfer Antar Daerah					142.294.657.731,00	
a.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	227.915.224.818,58	322.656.457.575,19	171.122.158.708,00	172.246.440.881,44	15.077.862.024,00	
a.3.1	Pendapatan Hibah	25.172.080.000,00	36.710.686.042,19	-	50.000.000,00	-	
a.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	
a.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kepada Kab.	33.697.507.240,58	39.183.527.017,00	34.256.571.353,00	36.323.527.416,78	-	

a.3.4	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	96.185.703.875,00	117.122.012.000,00	34.612.174.000,00	-	-	
a.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintahan Daerah Lainnya	72.859.933.703,00	129.640.232.516,00	102.253.413.355,00	123.172.767.840,66	-	
a.3.6	Pendapatan Yang Sah Lainnya (JKN)			-	12.700.145.624,00	15.077.862.024,00	
B	Belanja Daerah (b1+b2)	1.230.049.045.898,61	1.272.346.415.655,20	1.207.566.184.958,10	1.334.880.241.909,79	1.283.554.951.050,97	
b.1	Belanja Tidak Langsung	593.324.829.836,02	587.595.459.885,55	187.501.251.362,66	223.293.853.242,43	218.098.267.987,39	
b.1.1	Belanja Pegawai	435.654.112.053,00	436.193.989.475,00	-	-	-	
b.1.2	Belanja Bunga	2.645.251.114,02	2.541.992.606,55	2.121.063.639,36	1.795.518.341,31	1.588.950.039,97	
b.1.3	Belanja Subsidi	-	-	285.400.000,00	1.081.250.000,00	2.384.650.000,00	
b.1.4	Belanja Hibah	8.339.258.400,00	13.488.356.771,00	52.421.197.558,30	88.835.948.048,12	79.192.778.956,42	
b.1.5	Belanja bantuan Sosial	5.400.494.000,00	4.844.367.000,00	1.791.881.000,00	3.718.531.500,00	2.916.446.400,00	
b.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	1.022.748.954,00	1.550.096.206,00	851.819.226,00	1.591.249.121,00	
b.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	141.285.714.269,00	124.839.455.707,00	127.108.508.230,00	126.757.248.627,00	130.372.476.451,00	
b.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	4.664.549.372,00	2.223.104.729,00	253.537.500,00	51.717.019,00	
b.2	Belanja Langsung	636.724.216.062,59	684.750.955.769,65	1.020.064.933.595,44	1.111.586.388.667,36	1.065.456.683.063,58	
b.2.1	Belanja Pegawai	105.459.225.391,47	117.421.866.188,28	443.495.524.864,17	458.367.729.152,68	489.427.505.895,00	
b.2.2	Belanja Barang dan Jasa	382.300.608.432,57	372.721.786.556,58	390.136.638.804,99	440.609.240.985,43	476.346.378.113,14	
b.2.3	Belanja Modal	148.964.382.238,55	194.607.303.024,79	186.432.769.926,28	212.609.418.529,25	99.682.799.055,44	
c.3	Pembiayaan	26.569.553.139,02	32.699.603.370,04	8.424.138.218,46	7.655.126.678,79	25.561.651.801,27	
c.3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	30.369.553.139,02	36.499.603.370,04	19.349.907.594,46	10.455.126.678,79	28.361.651.801,27	
c.3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	10.925.769.376,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	
	Surplus/(Defisit)	-14.214.957.739,98	-13.349.695.775,58	2.030.988.460,33	20.706.525.122,48	-10.931.439.239,85	
	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	12.354.595.399,04	19.349.907.594,46	10.455.126.678,79	28.361.651.801,27	14.630.212.561,42	

Sumber : Realisasi APBD Tahun 2019 – 2023 (data diolah)

Tabel 1.2 Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi OPD Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2023

No.	SKPD	2019	2020	2021	2022	2023
1	PUPR	2.282.075.000,00	6.619.725.000,00	4.824.681.500,00	5.357.657.800,00	8.635.325.016,00
1a	<i>Investasi</i>	2.282.075.000,00	6.619.725.000,00	4.824.681.500,00	4.842.312.000,00	8.384.733.857,00
	Persampahan	-	-	537.571.000,00	371.340.000,00	410.427.009,00
	ALD	2.282.075.000,00	6.619.725.000,00	4.287.110.500,00	4.470.972.000,00	7.974.306.848,00
1b	<i>OM</i>	-	-	-	515.345.800,00	250.591.159,00
	Persampahan	-	-	-	34.900.000,00	-
	ALD	-	-	-	480.445.800,00	250.591.159,00
2	DLHK3	16.509.251.565,00	13.856.254.549,00	14.430.378.377,00	14.007.630.196,00	17.972.875.083,00
2a	<i>Investasi</i>	9.639.415.450,00	6.728.041.690,00	8.313.671.900,00	5.235.180.300,00	5.428.086.370,00
	Persampahan	9.639.415.450,00	6.728.041.690,00	8.313.671.900,00	5.235.180.300,00	5.428.086.370,00
	ALD	-	-	-	-	-
2b	<i>OM</i>	6.869.836.115,00	7.128.212.859,00	6.116.706.477,00	8.772.449.896,00	12.544.788.713,00
	Persampahan	6.869.836.115,00	7.128.212.859,00	5.895.306.477,00	8.549.799.896,00	12.321.228.713,00
	ALD	-	-	221.400.000,00	222.650.000,00	223.560.000,00
3	DINKES	1.470.629.370,00	1.383.261.389,00	383.611.500,00	1.110.488.150,00	1.294.166.580,00
3a	<i>Investasi</i>	1.470.629.370,00	1.383.261.389,00	383.611.500,00	1.110.488.150,00	1.294.166.580,00
3b	<i>OM</i>	-	-	-	-	-
4	BAPPEDA	-	-	-	-	-
4a	<i>Investasi</i>	-	-	-	-	-
4b	<i>OM</i>	-	-	-	-	-
5	Belanja Sanitasi (1+2+3+4)	20.261.955.935,00	21.859.240.938,00	19.638.671.377,00	20.475.776.146,00	27.902.366.679,00

6	Pendanaan Investasi Sanitasi Total (1a+2a+3a+4a)	13.392.119.820,00	14.731.028.079,00	13.521.964.900,00	11.187.980.450,00	15.106.986.807,00
7	Pendanaan OM Sanitasi Total (1b+2b+3b+4b)	6.869.836.115,00	7.128.212.859,00	6.116.706.477,00	9.287.795.696,00	12.795.379.872,00
8	Belanja Langsung	636.724.216.062,59	684.750.955.769,65	1.020.064.933.595,44	1.111.586.388.667,36	1.065.456.683.063,58
9	Proporsi Belanja Sanitasi-Belanja Langsung (5/8)	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03
10	Proporsi Investasi Sanitasi - total Belanja sanitasi (6/5)	0,66	0,67	0,69	0,55	0,54
11	Proporsi OM Sanitasi - Total Belanja Sanitasi (7/5)	0,34	0,33	0,31	0,45	0,46

Sumber : Realisasi APBD Tahun 2019 - 2023 (data diolah)

Tabel 1.3 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan Sanitasi Oleh APBD Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2023

NO	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Belanja Sanitasi	20.261.955.935,00	21.859.240.938,00	19.638.671.377,00	20.475.776.146,00	27.902.366.679,00	36,27%
01.01	Air Limbah Domestik	2.282.075.000,00	6.619.725.000,00	4.508.510.500,00	5.174.067.800,00	8.448.458.007,00	63,28%
01.02	Persampahan	16.509.251.565,00	13.856.254.549,00	14.746.549.377,00	14.191.220.196,00	18.159.742.092,00	27,96%
01.03	Drainase lingkungan	-	-	-	-	-	300,00%
01.04	PHBS	1.470.629.370,00	1.383.261.389,00	383.611.500,00	1.110.488.150,00	1.294.166.580,00	16,54%
2	Dana Alokasi Khusus	5.962.396.000,00	7.975.871.000,00	3.861.238.000,00	3.618.041.000,00	20.634.203.000,00	470,31%
02.01	DAK Sanitasi	2.357.681.000,00	5.081.800.000,00	1.501.238.000,00	3.618.041.000,00	7.878.381.000,00	117,75%
02.02	DAK Lingkungan Hidup	848.465.000,00	-	-	-	-	0,00%
02.03	DAK Perumahan dan Permukiman	2.756.250.000,00	2.894.071.000,00	2.360.000.000,00	-	12.755.822.000,00	0,00%
3	Pinjaman/Hibah Untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	0,00%
4	Bantuan Keuangan Provinsi Untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	0,00%
Belanja APBK Murni Untuk Sanitasi (1-2-3)		14.299.559.935,00	13.883.369.938,00	15.777.433.377,00	16.857.735.146,00	7.268.163.679,00	-56,89%
Total Belanja Langsung		636.724.216.062,59	684.750.955.769,65	1.020.064.933.595,44	1.111.586.388.667,36	1.065.456.683.063,58	-4,15%
% APBK Murni terhadap Belanja Langsung		2,25%	2,03%	1,55%	1,52%	0,68%	-55,02%

Sumber : Realisasi APBD Tahun 2019 - 2023 (data diolah)

Tabel 1.4 Belanja Sanitasi Perkapita Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2023

No	Deskripsi	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Total Belanja Sanitasi Kabupaten/Kota	20.261.955.935,00	21.859.240.938,00	19.638.671.377,00	20.475.776.146,00	27.902.366.679,00	9,56%
2	Jumlah Penduduk	245.779	248.892	253.198	255.198	259.538	1,37%
Belanja Sanitasi Perkapita (1/2)		82.439,74	87.826,21	77.562,51	80.234,86	107.507,83	8,07%

Sumber : APBD dan Badan Pusat Statistik (data diolah)

Tabel 1.5 Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi per Kapita Tahun 2019 – 2023

No	SKPD	Retribusi Sanitasi Tahun (Rp)					Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Retribusi Air Limbah	267.805.000,00	284.735.000,00	280.585.000,00	109.970.000,00	118.768.000,00	-13,99%
1.a	Realisasi retribusi	67.805.000,00	62.215.000,00	58.065.000,00	39.970.000,00	48.768.000,00	-11,52%
1.b	Potensi retribusi	200.000.000,00	222.520.000,00	222.520.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-14,32%
2	Restribusi Sampah	11.798.010.300,00	12.935.570.599,00	16.386.287.199,00	16.111.791.000,00	16.166.558.000,00	8,66%
2.a	Realisasi retribusi	4.948.010.300,00	5.316.636.000,00	5.884.768.500,00	6.610.291.000,00	6.665.058.000,00	7,62%
2.b	Potensi retribusi	6.850.000.000,00	7.618.934.599,00	10.501.518.699,00	9.501.500.000,00	9.501.500.000,00	9,88%
3	Retribusi Drainase	-	-	-	-	-	-
3.a	Realisasi retribusi	-	-	-	-	-	-
3.b	Potensi retribusi	-	-	-	-	-	-
4	Total Realisasi Retribusi Sanitasi (1a+2a+3a)	5.015.815.300,00	5.378.851.000,00	5.942.833.500,00	6.650.261.000,00	6.713.826.000,00	7,41%
5	Total Potensi Retribusi Sanitasi (1b+2b+3b)	7.050.000.000,00	7.841.454.599,00	10.724.038.699,00	9.571.500.000,00	9.571.500.000,00	9,31%
6	Proporsi Total Realisasi – Potensi Retribusi Sanitasi (4/5)	0,71	0,69	0,55	0,69	0,70	0,64%

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh (data diolah)

Tabel 1.6 Peta Perekonomian Kabupaten Tahun 2019 – 2023

No	Deskripsi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Harga Konstan (struktur perekonomian) (Rp)	15.157.978.100.000,00	14.644.288.070.000,00	15.449.901.480.000,00	16.257.333.330.000,00	17.079.852.700.000,00
2	Pendapatan Perkapita Kabupaten (Rp)	61.673.202,76	58.837.921,95	61.019.050,23	63.704.783,46	65.808.678,11
3	Pertumbuhan Ekonomi	4,13	-3,29	5,50	5,23	5,06

Sumber : Rankhir RPJPD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045 (data diolah)